



Pemerintah  
Kota Surakarta

Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah

# RKPD

Kota Surakarta  
Tahun 2023



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surakarta untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Pasal 2...

## Pasal 2

RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

## Pasal 3

RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII : Penutup.

## Pasal 4

Dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 01 Juli 2022

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 01 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-10
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika RKPD.....	I-14
BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis .....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah .....	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	II-3
2.1.1.3 Klimatologi .....	II-3
2.1.1.4 Penggunaan Lahan .....	II-4
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-6
2.1.3 Kondisi Demografis .....	II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-15
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB .....	II-15
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-19
2.2.1.3 PDRB Per Kapita .....	II-20
2.2.1.4 Laju Inflasi .....	II-21
2.2.1.5 Kemiskinan .....	II-22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-31
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	II-31
2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender .....	II-37
2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender .....	II-40
2.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	II-42
2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	II-44
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-45
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-46
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-62
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-90
2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-96
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-111
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-111
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-113
2.4.2.1 Angka Kriminalitas .....	II-113
2.4.2.2 Perizinan .....	II-113

2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia .....	II-114
2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja .....	II-114
2.4.3.2 Angka Ketergantungan .....	II-114
2.4.4 Fokus Fasilitas.....	II-115
2.4.4.1 Sarana Perdagangan .....	II-115
2.4.4.2 Sarana Olahraga dan Kesenian .....	II-116
2.5 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2021-2026....	II-116
2.6 Permasalahan Pembangunan .....	II-155
2.6.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-155
2.6.2 Permasalahan per urusan pemerintahan .....	II-156
2.7 Isu strategis Pembangunan .....	II-164
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional .....	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	III-5
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Surakarta .....	III-8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-10
3.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
3.2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah .....	III-12
3.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-13
3.2.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	IV-26
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-26
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	IV-29
4.2.3 Pokok Pikiran DPRD .....	IV-31
4.2.4 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2023	IV-34
4.2.5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-66
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Terpadu.....	IV-67
4.3.1 Tantangan Pembangunan Wilayah Kota Surakarta.....	IV-67
4.3.2 Arah Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041 (Tujuan, Kebijakan, dan Strategi).....	IV-72
4.3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah .....	IV-75
4.3.4 Prioritas Program Pengembangan Wilayah Kota Surakarta.....	IV-77
4.4 Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten/ Kota.....	IV-88
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V-1
5.1 Kerangka Pendanaan.....	V-1

5.2 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 .....	V-1
5.2.1 Program dan Kegiatan prioritas yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 serta dukungannya pada Prioritas Nasional .....	V-2
5.2.2 Rencana Kerja dan Program Prioritas RKPD 2023 .....	V-22
5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	V-32
5.4 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	V-35
5.5 Program Inovasi Daerah .....	V-62
5.5.1 Latar Belakang .....	V-62
5.5.2 Permasalahan .....	V-64
5.5.3 Inovasi PAPI SARIMAH (Paksa Pilih Sampah dari Rumah).....	V-65
5.6 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 .....	V-68
5.6.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar .....	V-68
5.6.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	V-73
5.6.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .....	V-82
5.6.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-86
5.6.5 Program Seluruh Perangkat Daerah .....	V-89
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	VI-2
6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	VI-6
BAB VII PENUTUP .....	VII-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendekatan Berorientasi Substansi yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 .....	I-4
Gambar 1. 2 Diagram Proses Musrenbang RKPD Tahun 2023.....	I-6
Gambar 1. 3 Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023.....	I-9
Gambar 1. 4 Diagram Hubungan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-12
Gambar 2. 1 Peta Kota Surakarta .....	II-1
Gambar 2. 2 Peta Administratif Kota Surakarta.....	II-2
Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020 .....	II-6
Gambar 2. 4 Pola Ruang Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 .....	II-12
Gambar 2. 5 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-15
Gambar 2.6 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 – 2021 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	II-19
Gambar 2. 7 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2021.....	II-20
Gambar 2. 8 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2017 – 2021 .....	II-21
Gambar 2. 9 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021.....	II-22
Gambar 2. 10 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	II-25
Gambar 2. 11 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-26
Gambar 2. 12 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017–2021 .....	II-26
Gambar 2. 13 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-27
Gambar 2. 14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017-2021 (Jiwa).....	II-28
Gambar 2. 15 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017-2021 .....	II-28
Gambar 2. 16 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 .....	II-29
Gambar 2. 17 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-30
Gambar 2. 18 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 .....	II-30
Gambar 2. 19 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021.....	II-31
Gambar 2. 20 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 .....	II-32
Gambar 2. 21 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-33

Gambar 2. 22 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .....	II-33
Gambar 2. 23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-34
Gambar 2. 24 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-35
Gambar 2. 25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-35
Gambar 2. 26 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .....	II-36
Gambar 2. 27 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-36
Gambar 2. 28 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Ribu Rupiah) .....	II-37
Gambar 2. 29 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-38
Gambar 2. 30 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021.....	II-38
Gambar 2. 31 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II-40
Gambar 2. 32 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-41
Gambar 2. 33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%) .....	II-43
Gambar 2. 34 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%).....	II-43
Gambar 2. 35 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%) .....	II-44
Gambar 2. 36 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%) .....	II-45
Gambar 2. 37 Rata - rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota - Kota Lain dan Rata – rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan) .....	II-112
Gambar 2. 38 Angka Ketergantungan Kota Surakarta Tahun 2015 – 2020 .....	II-115
Gambar 4. 1 Delapan Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV-29
Gambar 4. 2 Keterkaitan Prioritas Kota Surakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV-41
Gambar 4. 3 Keterkaitan Prioritas Kota Surakarta dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	IV-42

Gambar 4. 4 PDRB Perkapita di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN....	IV-69
Gambar 4. 5 Perkembangan Kota Surakarta dan Daerah Sekitarnya telah Membentuk Menjadi Kawasan Metropolitan.....	IV-70
Gambar 4. 6 MICE Kota Surakarta dan Wisata Pemprov Jateng.....	IV-89
Gambar 5. 1 Penanganan Sampah yang Paling Sering Dilakukan, 2017.	V-63
Gambar 5. 2 Foto sampah berserakan .....	V-64
Gambar 5. 3 Pembinaan Petugas Sampah dalam rangka pelaksanaan PAPI SARIMAH .....	V-65
Gambar 5. 4 Foto Sampah yang telah dipilah .....	V-66

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	II-2
Tabel 2. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-3
Tabel 2. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta.....	II-3
Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020.....	II-5
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-13
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2021	II-14
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	II-14
Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021 .....	II-16
Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021, .....	II-18
Tabel 2. 10 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020 .....	II-23
Tabel 2. 11 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2020 .....	II-24
Tabel 2. 12 Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021 .....	II-39
Tabel 2. 13 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	II-34
Tabel 2. 14 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-47
Tabel 2. 15 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-50
Tabel 2. 16 Capaian Indikator RSUD Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-53
Tabel 2. 17 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-55
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-57
Tabel 2. 19 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-59
Tabel 2. 20 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-61
Tabel 2. 21 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-63
Tabel 2. 22 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-64
Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-67
Tabel 2. 24 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-68

Tabel 2. 25	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-69
Tabel 2. 26	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-72
Tabel 2. 27	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-73
Tabel 2. 28	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-74
Tabel 2. 29	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-77
Tabel 2. 30	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-79
Tabel 2. 31	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-80
Tabel 2. 32	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-81
Tabel 2. 33	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-82
Tabel 2. 34	Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-84
Tabel 2. 35	Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-84
Tabel 2. 36	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2021.....	II-85
Tabel 2. 37	Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-87
Tabel 2. 38	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-89
Tabel 2. 39	Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-91
Tabel 2. 40	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-92
Tabel 2. 41	Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021	II-93
Tabel 2. 42	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-94
Tabel 2. 43	Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-96
Tabel 2. 44	Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-96
Tabel 2. 45	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-98
Tabel 2. 46	Capaian Indikator Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2021	II-99
Tabel 2. 47	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-101
Tabel 2. 47	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-101
Tabel 2. 48	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2021 .....	II-103

Tabel 2. 49	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2021	II-104
Tabel 2. 50	Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2021	II-105
Tabel 2. 51	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2021	II-107
Tabel 2. 52	Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2021	II-109
Tabel 2. 53	Capaian Indikator pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021	II-111
Tabel 2. 54	Statistik Tindak kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020	II-113
Tabel 2. 55	Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Usia 17 Tahun ke atas Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020	II-114
Tabel 2. 56	Banyaknya Sarana Perdagangan di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021	II-115
Tabel 2. 57	Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja	II-117
Tabel 2. 58	Kriteria Status Pencapaian Kinerja Menurut Target RPJMD	II-117
Tabel 2. 59	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD berdasar Urusan Pemerintah Daerah	II-118
Tabel 2. 60	Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan	II-154
Tabel 2. 61	Identifikasi Permasalahan Per Urusan	II-156
Tabel 3. 1	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023	III-4
Tabel 3. 2	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	III-7
Tabel 3. 3	Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2023	III-9
Tabel 3. 4	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	III-13
Tabel 3. 5	Rencana Alokasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	III-15
Tabel 4. 1	Kerangka Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021 – 2026	IV-5
Tabel 4. 2	Prioritas Nasional dan Program Prioritas	IV-26
Tabel 4. 3	Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	IV-28
Tabel 4. 4	Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kota Surakarta 2023 dengan RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	IV-34
Tabel 4. 5	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Kota Surakarta Tahun 2023	IV-34
Tabel 4. 6	Keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah., program prioritas RKPD 2023	IV-36
Tabel 4. 7	Prioritas dan Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	IV-44
Tabel 4. 8	Persandingan Sasaran Makro RKP, RKPD Prov. Jateng dan RKPD Kota Surakarta tahun 2023	IV-54
Tabel 4. 9	Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-55
Tabel 4. 10	Perbandingan Luas Kota Kota Surakarta dengan Kabupaten Disekitarnya (Kawasan SUBOSUKA WONOSTRATEN)	IV-68

Tabel 4. 11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Besar di Indonesia .	IV-70
Tabel 4. 12 Komposisi Penggunaan Tanah Kota Surakarta .....	IV-71
Tabel 4. 13 Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041, dan Perda 6/2021 tentang RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, serta Penentuan Arahan Program Prioritas .....	IV-78
Tabel 4. 14 Kegiatan Pengembangan Wilayah .....	IV-81
Tabel 5. 1 Program dan Kegiatan prioritas yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	V-2
Tabel 5. 2 Program, Kegiatan Prioritas, Pagu menurut Sasaran Daerah..	V-22
Tabel 5. 3 Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	V-32
Tabel 5. 4 Program/ Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	V-35
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	VI-1
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 .....	VI-3
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	VI-6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu perubahan RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026, dan memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam perubahan RPJPD tahun 2020-2025, tahap IV (2020-2025) diarahkan pada “Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan”. Adapun fokus kebijakan pembangunan meliputi:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan berbudaya.
2. Mengimplementasikan sistem *Smart City* terintegratif untuk pengembangan pelayanan publik dan daya saing SDM yang berbudaya.
3. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk menghasilkan masyarakat yang tentram, tertib, gotong royong, harmoni, dan terlindungi.
4. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk mendukung perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif, berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif.

5. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk kolaborasi pengembangan sistem perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat dari resiko kerentanan.
6. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, tangguh, dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan berkelanjutan.
7. Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem *Smart City* untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing - masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah; dan
4. secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi substansi, penyusunan RKPD Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku

kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

1. **Pendekatan Holistik-Tematik** yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistik" adalah penjabaran tematik program Walikota ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
2. **Pendekatan Integratif** yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.  
Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Walikota yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
3. **Pendekatan Spasial** yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Walikota dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



**Gambar 1. 1 Pendekatan Berorientasi Substansi yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratis** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- a. Pola teknokratis telah ditetapkan sejak tahapan Musrenbangkel dengan Renstra Masyarakat sebagai pedoman penyusunan usulan Musling RW dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan (MLK).
  - b. Renstra Masyarakat disusun berbasis Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) database penduduk Miskin Kota Surakarta.
  - c. Sebelum pelaksanaan Musrenbangkel 2023 telah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen Rencana Strategis Masyarakat (Renstramas) untuk tahapan perencanaan tahun 2023 pada 54 Kelurahan, dengan harapan memperbaiki rencana usulan Musrenbangkel tahun 2022.
  - d. Pengusulan kegiatan dalam proses Musrenbang mulai dari tingkat Musyawarah RW menggunakan Analisa Standar Biaya sehingga masyarakat mengusulkan kegiatan dengan perencanaan yang matang mulai dari volume, lokasi dan satuan.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. Secara substantif, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 mempunyai semangat inklusif, diantaranya:

- a. Keterlibatan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dalam proses Musrenbangkel, Musrenbangcam dan Musrenbang RKPD mendapat prioritas. Kelompok masyarakat rentan termarginalkan, antara lain orang lanjut usia, anak-anak, keluarga miskin, wanita hamil dan penyandang cacat, mendapat hak untuk mengisi 10% jumlah peserta Musrenbang;
- b. Dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, salah satu materi usulan dari musyawarah Lingkungan RW Prioritas adalah Program/ Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang target dan sasaran kegiatannya mengacu pada profil data kemiskinan sesuai Keputusan Walikota Surakarta tentang Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2018 Semester II. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan RW Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, yakni satu RW yang ditunjuk sebagai lokasi pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus bagi kegiatan di tingkat kelurahan dan kegiatan Perangkat

Daerah yang disepakati antara Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK). Hal ini bertujuan agar pengentasan kemiskinan dapat terarah, baik kegiatan dari Perangkat Daerah maupun sumber pembiayaan lain berbasis masyarakat.

Tahapan Musrenbang Kota Surakarta secara sederhana dapat dibuat dalam bentuk diagram pada Gambar 1.2 berikut ini.



**Gambar 1. 2 Diagram Proses Musrenbang RKPD Tahun 2023**

Secara garis besar, Musrenbang RKPD di Kota Surakarta dilaksanakan melalui tahapan: Persiapan, Musyawarah Lingkungan RW (Musling RW), Musrenbangkel, Musrenbangcam, Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Desk Sinkronisasi, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbangkot. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pusat; serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, DKT Tingkat Kota dan Hasil Reses DPRD. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta

- jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
  4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.

RKPD Kota Surakarta tahun 2023 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan tahapan penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Penyusunan RKPD**

Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2023, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

#### **2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional;

(i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

### **3. Penyusunan Rancangan RKPD**

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

### **4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Musrenbang RKPD di Kota Surakarta meliputi tahapan Persiapan, Musyawarah Lingkungan RW (Musling RW), Musrenbangkel, Musrenbangcam, Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Desk Sinkronisasi Hasil Musrenbangcam, Forum DKT Perangkat Daerah, dan Musrenbangkot. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.

### **5. Perumusan rancangan akhir RKPD**

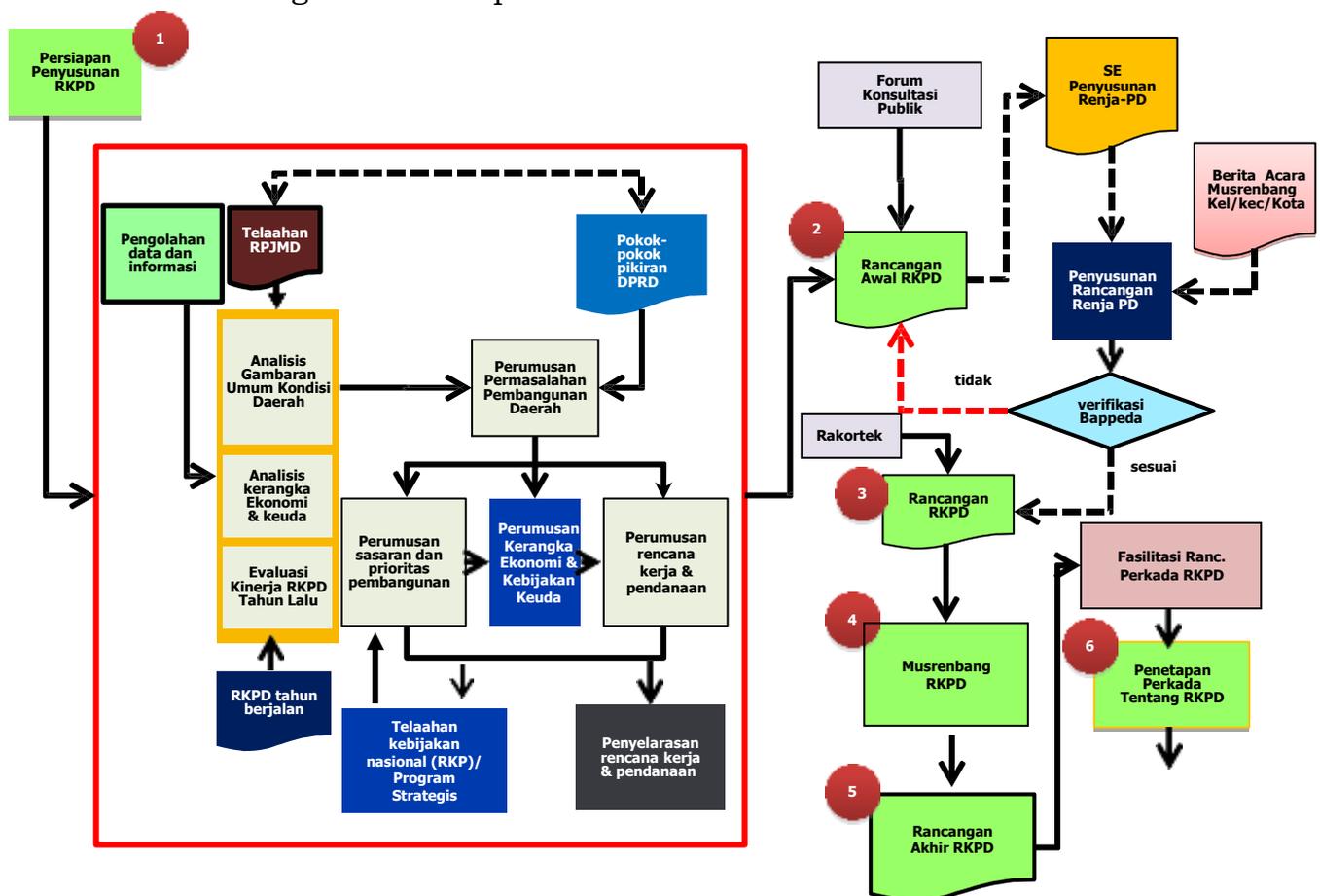
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir RKPD bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan

sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD dan dikirim kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

### 6. Penetapan RKPD tahun 2023

Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

Alur proses penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 secara ringkas terlihat pada Gambar 1.3 berikut ini.



**Gambar 1. 3 Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023**

RKPD Kota Surakarta tahun 2023 memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan

APBD (RAPBD). RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 Dasar Hukum**

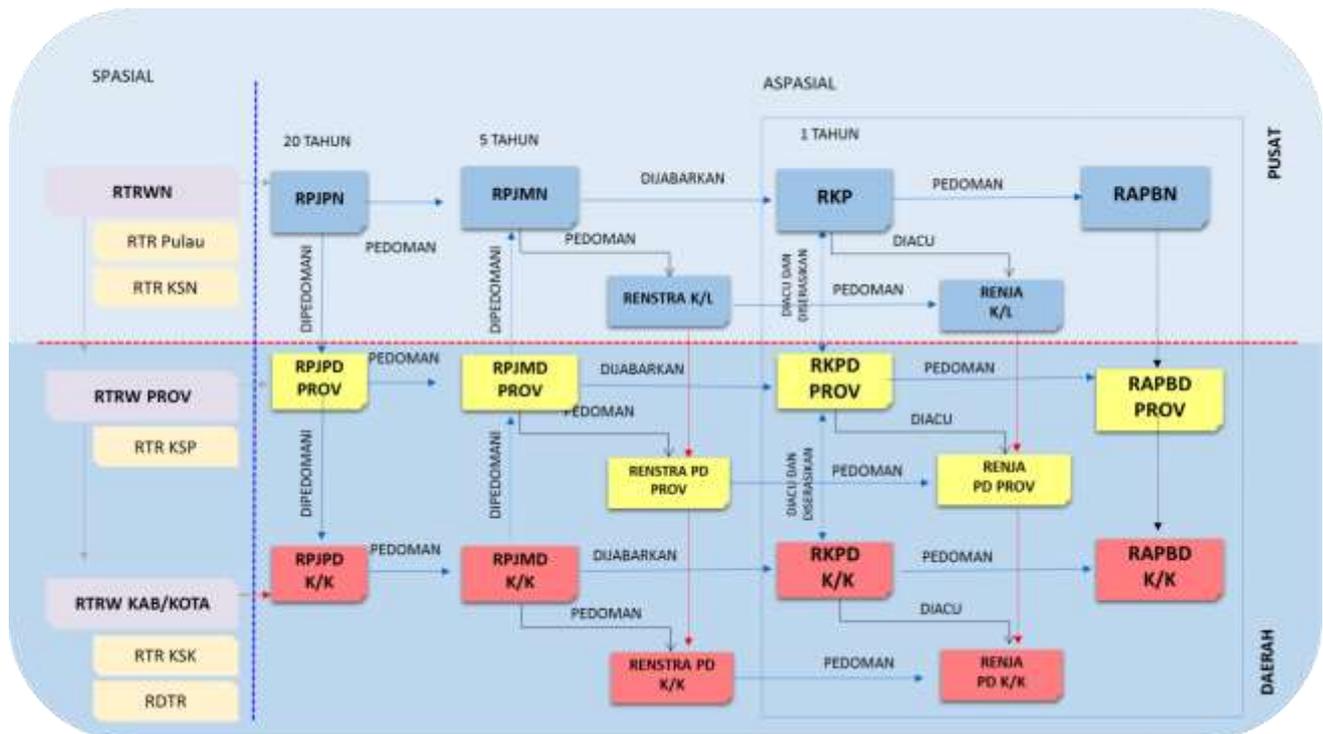
Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5)
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115)
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

### **1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Surakarta, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4 berikut ini.



**Gambar 1. 4 Diagram Hubungan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjelasan masing-masing dokumen perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kaitan RKPD tahun 2023 dengan RPJMD Kota Surakarta

Penyusunan RKPD Tahun 2023 mengimplementasikan Tahun kedua dari RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, terkait dengan tujuan, sasaran daerah, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan kurun tahun 2023. RKPD sebagai instrumen untuk menangani isu strategis daerah mewujudkan misi dan visi Kota yaitu “Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”.

### 2. Kaitan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023

Berpijak pada pendekatan Top Down dan menjaga sinergitas Pusat-Daerah, maka RKPD Kota Surakarta tahun 2023 mendukung harmonisasi prioritas nasional dan prioritas provinsi Jawa Tengah, supaya sasaran prioritas pembangunan dan program prioritas nasional dan provinsi tercapai. Dukungan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam keselarasan tema, prioritas pembangunan, dukungan

program prioritas, pagu indikatif pada sektor prioritas maupun pada wilayah sasaran. Pada tahun 2023 RKP fokus pada tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Tengah mengusung tema “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”

### **3. Kaitan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 dengan Renja OPD**

Prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 selain merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, juga berasal dari identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan sektoral rencana yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang disinkronkan dengan proses bottom up melalui musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan diselaraskan juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Penyelarasan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2023. Setelah disepakati melalui proses musrenbang RKPD, ditetapkan menjadi Peraturan Walikota. RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023.

### **4. Kaitan RKPD tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya**

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun RPJMD, Dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, diantaranya: Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Dokumen pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's); Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2023 adalah: (1) menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan (2) menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

## **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2023 adalah untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika RKPD**

Sistematika RKPD Kota Surakarta tahun 2023 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan daerah.

#### **Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta**

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

#### **Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023.

#### **Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023.

#### **Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2023, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2023.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografis dan Demografis

#### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



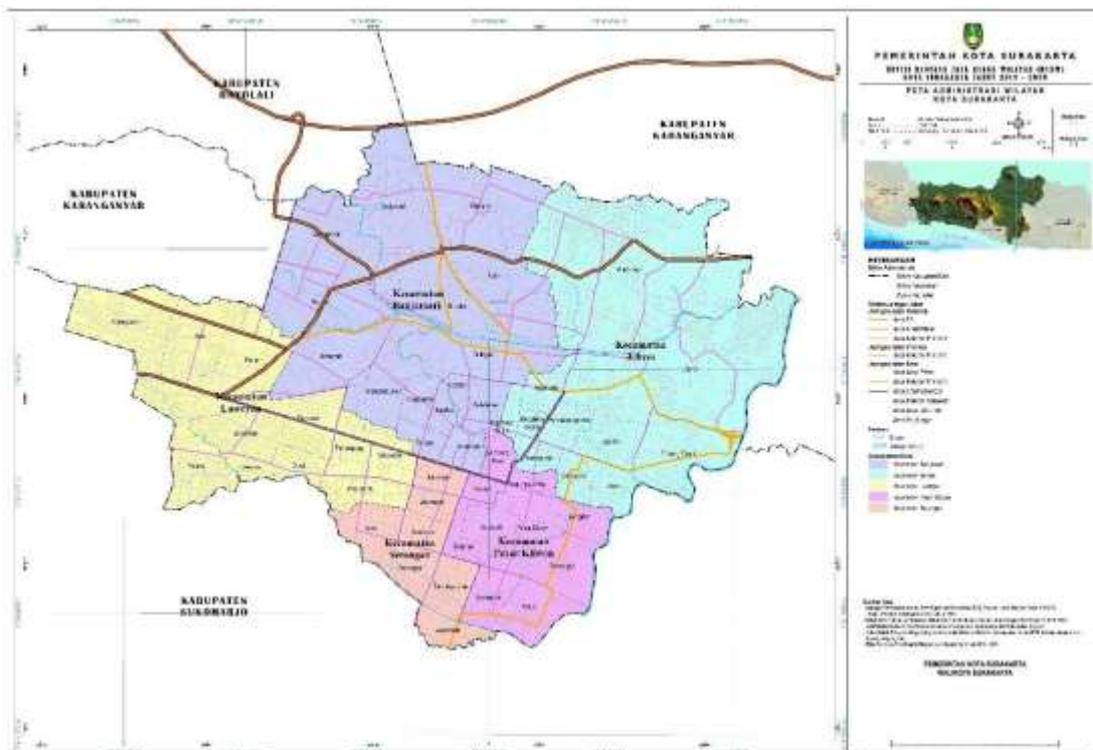
**Gambar 2. 1 Peta Kota Surakarta**

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
<b>Kota Surakarta</b>	<b>54</b>	<b>46,724</b>	<b>626</b>	<b>2.789</b>

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta



**Gambar 2. 2 Peta Administratif Kota Surakarta**

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.

### 2.1.1.3 Klimatologi

Curah hujan kota surakarta pada tahun 2021 sebanyak 581,8 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 200 hari. Curah Hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2017	85,10	167
2018	85,10	167
2019	1.815,7	113
2020	1704,40	159
2021	581,8	200

Sumber : BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2021

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berkisar antara 15,1oC sampai dengan 34oC. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 72% sampai dengan 91%.

**Tabel 2. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta**

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96
2021	22,2	34	72-91

Sumber : BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2016-2021 (diolah)

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun, walaupun demikian, masih terdapat resiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Resiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

#### **2.1.1.4 Penggunaan Lahan**

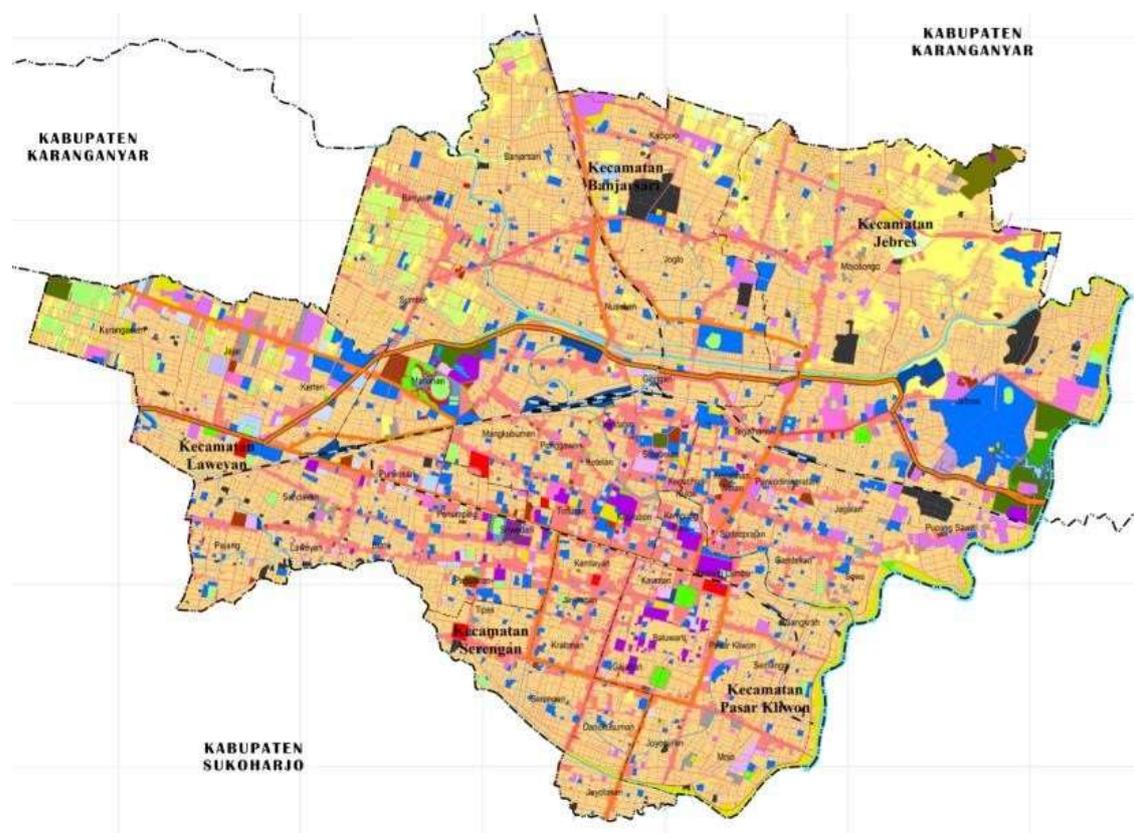
Berdasarkan peta draft revisi RTRW Kota Surakarta, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman, bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman dan lain - lain. Sebagian besar penggunaan lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 Ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Simbol
1	Badan Jalan	52,44	
2	Fasilitas Kesehatan	44,41	
3	Fasilitas Olahraga	5,39	
4	Fasilitas Pendidikan	269,67	
5	Fasilitas Peribadatan	20,62	
6	Fasilitas Sosial	0,74	
7	Fasilitas Transportasi	38,07	
8	Gardu Induk	3,36	
9	Hutan Kota	40,19	
10	Industri	99,44	
11	IPAL	1,46	
12	Kebun Binatang	8,08	
13	Lapangan Olahraga	32,96	
14	Makam	77,57	
15	Pariwisata dan Hiburan	16,80	
16	Perdagangan dan Jasa	724,60	
17	Perkantoran Pemerintah	47,27	
18	Permukiman	2874,88	
19	Pertahanan dan Keamanan	12,86	
20	Pulau Jalan	0,595	
21	Sawah Irigasi	15,47	
22	Sawah Setengah Teknis	37,30	
23	Sawah Tadah Hujan	10,60	
24	Sungai	66,14	
25	Taman	50,23	
26	Tanah Kosong	17,872	
27	Tegalan	85,08	
28	Tempat Pembuangan Akhir	18,23	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.672,33</b>	

Sumber: Revisi RTRW Kota Surakarta

Berikut ini adalah peta penggunaan lahan eksisting Kota Surakarta.



Sumber: Revisi RTRW Kota Surakarta

**Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020**

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlidungan setempat, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

## 1. Kawasan Lindung

### a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai kurang lebih seluas 105 ha. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hulu, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, Kali Tanggul dan sungai-sungai yang lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha. Kecamatan Laweyan seluas 7 ha, Kecamatan Pasar Kliwon seluas 4 ha dan Kecamatan Serengan seluas 6 ha.

### b. Kawasan Cagar Budaya

- 1) Kecamatan Banjarsari, meliputi RRI Surakarta, Ponten, Kantor Kelurahan Keprabon (Bekas Ndalem Rekso Hadiprojo), Puro Mangkunegaran, Polsek Banjarsari, Puro Mangkunegaran Timuran, Monumen Pers Nasional, SLTP. Negeri 10, SMPN 3 Surakarta, PTPN IX Surakarta, Masjid Al-Wustho, Monumen 45, SLTP. Negeri 4, Stasiun KA Balapan, Stasiun KA Balapan, GKJ Margoyudan, SMU. Negeri 1 dan SMU. Negeri 2, Stasiun KA Balapan, Taman Balekambang, SLTP. Negeri 1, Rumah Kuno (The Acacia), Ndalem Padmosusastran, TK Taman Putera, Pesarean Nayu/Astana Utara, Monumen Geriliya Mas TP, Eks CPM Belanda, Rumah Dr. Oen, Ndalem Kanjengan, Panti Pamardi Yoga, Monumen Pasar Nongko, SMPN 5 Surakarta, Gardu Listrik Ngarsopuro dan Monumen Guru PGRI.
- 2) Kecamatan Jebres, meliputi Pasar Gede Solo, SD Warga, Dinas Pertanian Kota Surakarta, Tugu Adipura, Solo Jebres, SMP Negeri 13, SMK Kristen Margoyudan, Taman Satwa Turu Jurug, Taman Tengah Tugu Cambengan, Makam Putri Cempo, Pagoda Jebres, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Gapura Batas Kota Jurug, SD Tripusaka, Gapuro Keraton (Dr.Oen), Hotel Trio, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Tugu Jam Pasar Gede, Eks Kantor DPU, Klentheng Tien Kok Sie dan Jembatan Jurug Lama.
- 3) Kecamatan Laweyan, meliputi Masjid Museum Keraton, MTSN 2 Surakarta, Kelurahan Laweyan, Makam Djangrono II, Masjid

Tegalsari, Roemahkoe Heritage, Taman Sriwedari, Museum Radyapustaka, SMP 15 Surakarta, Pengadilan Negeri, Eks RSJ Mangunjayan, Balai Soedjatmoko, Dalem Wuryoningratan, Gereja Paroki Santo Petrus Gendengan, SMK Murni 2 dan SMK Murni 1, Lodji Gandrung, Taman Seputaran Tugu Lilin (Rumah Priyomartanan), Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV- 33/ Karanganya, Satlantas Surakarta, RS Slamet Riyadi, Stasiun KA Purwosari, Lokananta, Gapura Batas Kota Kleco, Bekas Kantor Veteran, Makam R. Supomo, Ndalem Doyoatmojo, Monumen Stadion Sriwedari, Rumah Praktik Dr.Tunjung, Patung Ronggowarsito, Monumen Sondakan, Rumah KH. Samanhudi, Rumah Bp.Uswidarto, Rumah Ibu Supardi, Rumah Bp.Arif Rusdi, Rumah Bp.Sriyadi, Langgar Laweyan, Langgar Merdeka, Bekas Bandar Kabanaran, Rumah Bp.Ahmad Alkatiri, Rumah Bp.Soeseno, Rumah Bp/Soebandono, Puri Baron, Makam Ki Ageng Henis, Monumen Panularan, Bekas RS. Kadipolo, Monumen Pejuang TP.

- 4) Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi Ndalem Hadiwijayan, Kantor CPM Surakarta, Masjid Riyadh, Kraton surakarta, SD Carangan (Rumah Eks Lumbu), Ndalem Wiryodiningratan, Primkopad D-12 Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop), Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Mloyokusuman, Ndalem Joyokusuman, Stasiun Solo Kota, Masjid Agung Surakarta, GKJ Loji Wetan, Benteng Vastenburg, SMPN 11 Surakarta, Kawasan Loji Wetan, Tugu Pamandengan Dalem, GPIIP Penabur Solo, Sekertariat Daerah (Bunker Balakota Surakarta), SD Pangudiluhur, Sekolah Marsudirini, Tugu Pamandengan Dalem, Museum Bank Indonesia, Ndalem Mloyokusuman, Polsek Pasar Kliwon (Kantor Bondho Lumakso), Eks Kantor Brigif 6, Makam Kyai Batag (Raden Pabelan), Gapuro Keraton (Pamurakan), Gapuro Keraton (Mojo), Gapura Keraton – Gading, Bruderan Purbayan, Susteran Purbayan St. Fransiskus, Rumah Sentosayan (Susuno Projo Sasano), Rumah Koesoma Kesawan, Rumah Atmo Suparman, Langgar Trayeman, Kawasan Kauman, Mambaul Ulum, Gapura Keraton – Klewer, Ndalem Sindusen, Makam Kiai Solo, Ndalem Prajapangrasan, Pura Persembahyangan SA. Dhar. Ma. Pan Mandiri Seta, Masjid Ar Raudah, Masjid Jami Assegaf, Ndalem Suryakusuman, Ndalem Suryaningratan, Rumah Juru Martenan, Ndalem Natanegaran,

Rumah Laksmintan, Rumah Soetamandalan, Ndalem Suryapuran, Rumah Tirtadiningratan, Ndalem Bonokamsi, Rumah Sekullanggen, Rumah Kota Waringin, Rumah Cokrowinatan, Rumah Wirengan (Kusumodigalan), Wongso Sudirjan, Ndalem Prabuningratan, Ndalem Mangkubumen, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan, Ndalem Ngabean, Sekolah Pamardi Putri, Rumah Prabuwinoto, Kraton Surakarta, SMP Kasatryan Surakarta, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan dan Taman Patung Slamet Riyadi.

- 5) Kecamatan Serengan, meliputi Wisma Batari, Gereja Joyodiningratan, Ndalem Padmonegaran, Ndalem Cokrosuman dan TITD Poo An Kiong.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 446 ha atau sekitar 9,5% dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 486 ha atau sekitar 10,4% dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 261 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 6 ha di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 100 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 43 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

#### c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan dan Istana Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo– Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dikembangkan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya dan sungai. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bengawan Solo.

Mulai tahun 2022 direncanakan revitalisasi destinasi wisata, yaitu: (i) Pembangunan Masjid Raya Al Zayed dan Islamic Center sebagai wisata religi; (ii) Revitalisasi Ngarsapura dan Gatot Subroto; (iii) Revitalisasi Kebun Binatang; (iv) Revitalisasi Taman Balekambang

#### d. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan sektor informal, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.376 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 674 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan

Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.

- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.163 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 127 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
  - 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
  - 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 331 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 248 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan sebagaimana dengan luas kurang lebih 54 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- e. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 67 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 23 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 25 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 6 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 9 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 4.

- f. Kawasan Sektor Informal

Kawasan sektor informal meliputi ruang tempat penyelenggaraan acara pemerintah daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (*night market*) di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto dan lokasi lainnya berdasarkan kajian; ruang tempat penyelenggaraan acara kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh

pemerintah daerah.

g. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.

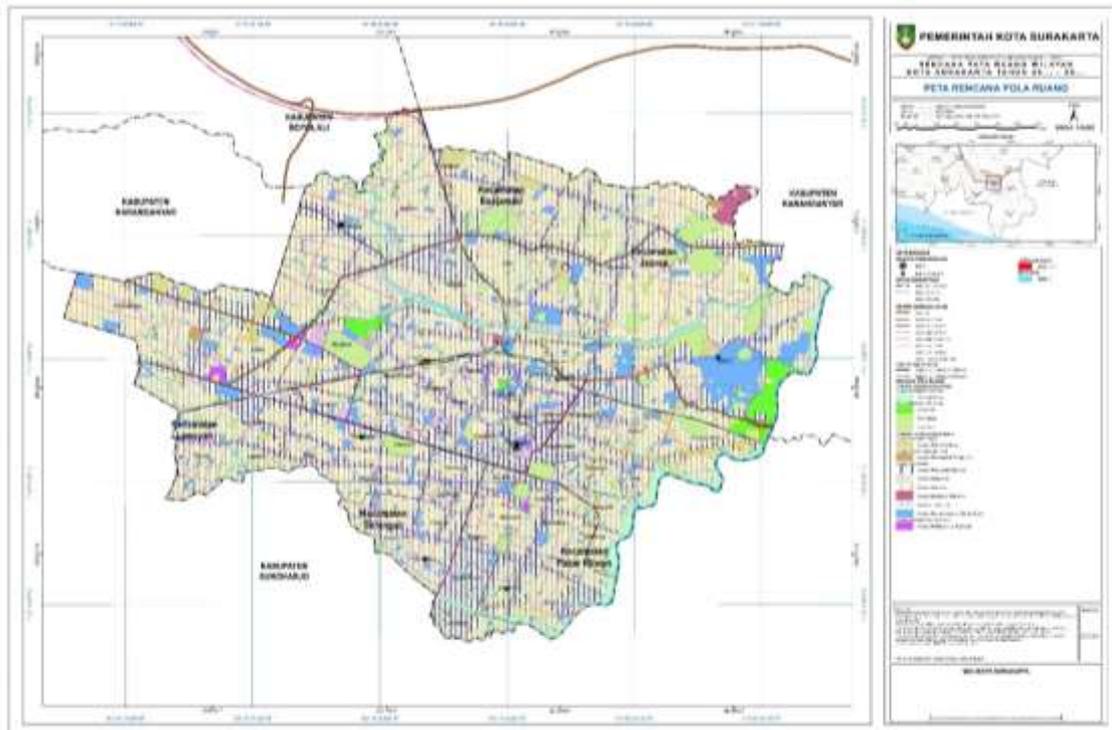
h. Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 16 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 12 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735 Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon.



**Gambar 2. 4 Pola Ruang Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031**

### 2.1.3 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 522.728 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.557 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,9684, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun pada angka 0,09%.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km<sup>2</sup>, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	516.102	517.887	575.230	522.364	522.728
	Laki-laki	250.896	251.772	283.295	257.043	257.171
	Perempuan	265.206	266.115	291.935	265.321	265.557
2.	Laju Pertumbuhan %	0,376	0,346	0,33	0,44	0,09
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,97	0,969	0,9684
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	11.718,78	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.873 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.853 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2021**

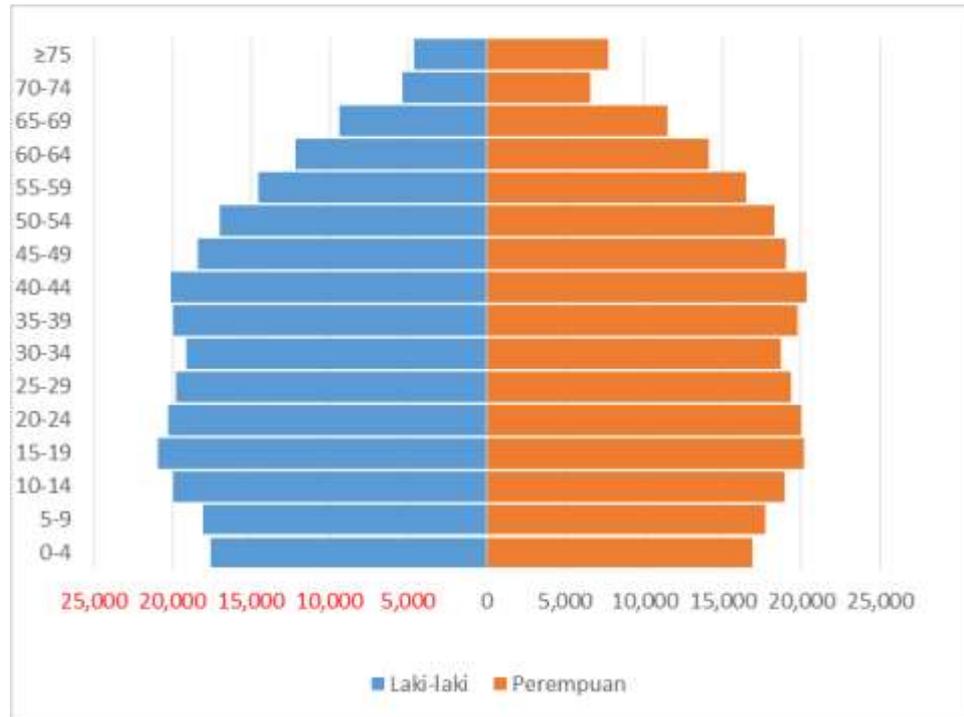
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.578	9.705,64
2	Serengan	47.853	15.522,17
3	Pasar Kliwon	78.565	16.094,02
4	Jebres	138.859	9.658,38
5	Banjarsari	168.873	11.069,13
<b>Surakarta</b>		<b>522.728</b>	<b>11.187,52</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022

**Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.585	16.924	34.509
2	5-9	18.067	17.697	35.764
3	10-14	19.912	18.925	38.837
4	15-19	20.921	20.172	41.093
5	20-24	20.237	20.014	40.251
6	25-29	19.794	19.364	39.158
7	30-34	19.134	18.659	37.793
8	35-39	19.909	19.753	39.662
9	40-44	20.077	20.315	40.392
10	45-49	18.430	19.041	37.471
11	50-54	16.988	18.264	35.252
12	55-59	14.542	16.517	31.059
13	60-64	12.184	14.148	26.332
14	65-69	9.423	11.457	20.880
15	70-74	5.341	6.566	11.907
16	≥75	4.627	7.741	12.368
<b>Jumlah</b>		<b>257.171</b>	<b>265.557</b>	<b>522.728</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022



**Gambar 2. 5 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021**

Dari kelompok umur, piramida penduduk Kota Surakarta termasuk jenis piramida konstruktif atau piramida penduduk tua yang berbentuk nisan. Piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda yang lebih sedikit dibandingkan penduduk usia dewasa. Dari piramida ini bermakna bahwa di Kota Surakarta rasio ketergantungan relatif rendah sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup yang lebih baik.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp. 50 371 564,19. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 41.066.139,47. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 13.423.876,09 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061.382,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.486.879,25. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.362.549,95. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.740.938,83. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253.396,56, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

**Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204.257,51	219.181,71	233.444,75	243.528,14	253.396,56
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	203.425,54	218.303,02	232.506,07	242.559,89	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,14	11,54	11,79	0,00	
	3. Perikanan	820,83	867,15	926,89	968,25	
B	Pertambangan dan Pengalihan	800,26	821,67	796,04	281,60	243,11
C	Industri Pengolahan	3.478.887,13	3.748.201,87	4.060.311,37	4.024.918,64	4.362.549,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82.618,04	89.447,76	94.467,61	95.484,59	105.672,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61.412,83	64.543,46	68.562,82	74.921,49	71.493,11
F	Konstruksi	10.967.643,65	12.059.892,39	13.011.418,38	12.883.929,92	13.423.876,09

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.211.200,08	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83	11.061.382,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.118.656,74	1.133.736,50	1.241.375,56	488.770,97	524.376,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.402.558,56	2.443.524,86	2.596.798,29	2.179.997,16	2.379.346,01
J	Informasi dan Komunikasi	4.553.522,76	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.052,78	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.884,85	1.968.240,07
L	Real Estate	1.673.192,64	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,35	1.974.896,20
M,N	Jasa Perusahaan	328.367,83	372.415,59	414.236,87	387.892,84	402.026,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.350.648,03	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99
P	Jasa Pendidikan	2.191.776,48	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	454.831,32	499.078,89	535.372,96	622.766,87	635.796,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.712,83	422.259,08	456.680,62	402.465,17	406.397,27
	Produk Domestik Regional Bruto	41.066.139,47	44.427.890,52	48.003.049,02	47.644.563,66	50.371.564,19

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 31.562.980,46 pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 36.211.248,26 pada tahun 2021. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 8.971.026,38. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.227.240,68, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.951.672,31.

Dari prosentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%, dan sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,22%. Kenaikan

PDRB ADHK 2020 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94	152.191,74
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,41	7,43	7,38	0,00	
	3. Perikanan	539,65	546,46	557,22	560,72	
B	Pertambangan dan Penggalian	530,74	522,35	510,76	174,08	148,36
C	Industri Pengolahan	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82	86.460,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F	Konstruksi	8.255.938,75	8.693.085,26	9.090.505,96	8.913.264,95	8.971.026,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H	Transportasi dan Pergudangan	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82	399.568,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24	1.599.051,16
J	Informasi dan Komunikasi	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L	Real Estate	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
M,N	Jasa Perusahaan	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O	Administrasi Pemerintahan,	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96
	Produk Domestik Regional Bruto	31.562.980,46	33.506.170,4	35.443.181,34	34.827.188,29	36.211.248,26

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

### 2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,01 pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

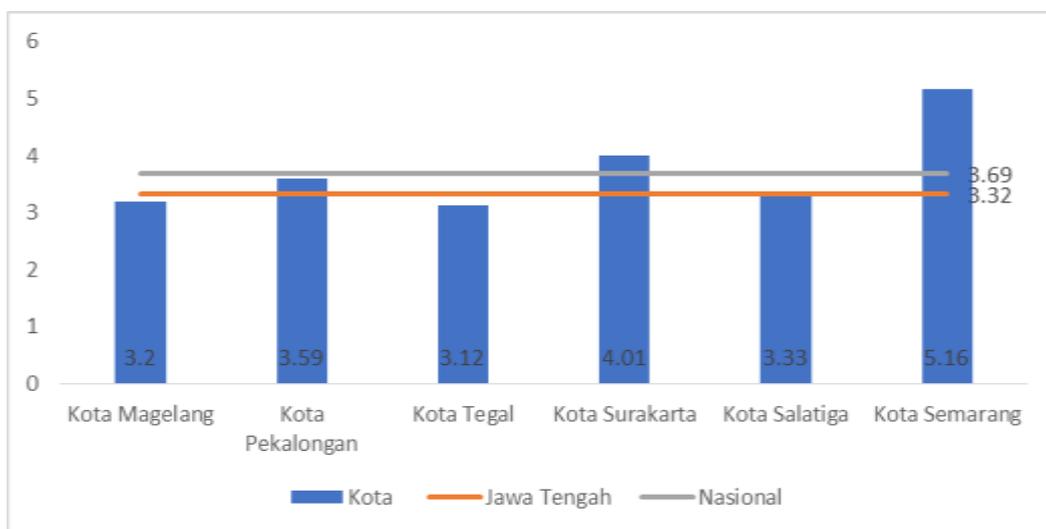


Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2. 6 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 – 2021 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021**

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018 - 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (5,16%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 7 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2021**

### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan

angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



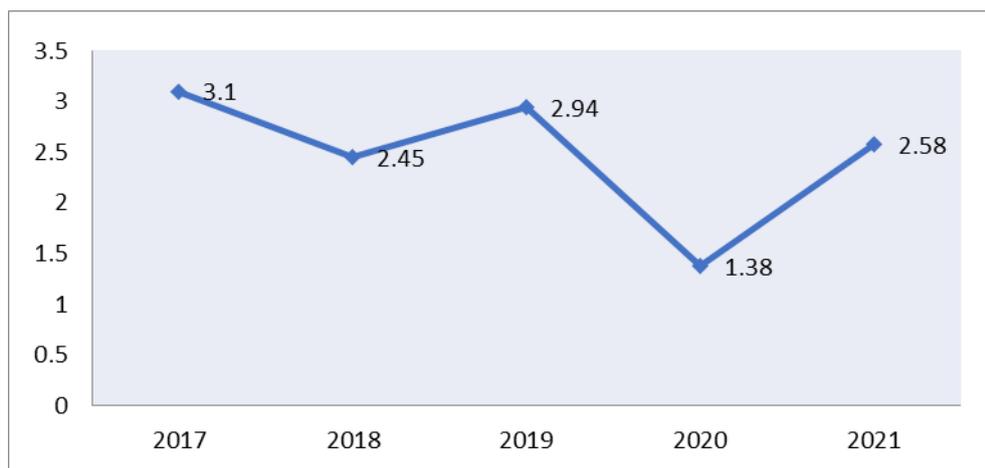
Sumber : BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah)

**Gambar 2. 8 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

#### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan fluktuatif, namun masih berada dalam rentang capaian yang positif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

**Gambar 2. 9 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Berdasarkan gambar di atas, angka inflasi Tahun 2020 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini sebagai konsekuensi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat akibat pembatasan aktivitas ekonomi dalam skala yang luas dan besar guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

### **2.2.1.5 Kemiskinan**

Kondisi umum kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

#### **1. Garis Kemiskinan**

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di

perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama (lihat Tabel 2.18). Beras memberi sumbangan sebesar 16,59 persen di perkotaan dan 18,61 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95 persen di perkotaan dan 10,66 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,04 persen di perkotaan dan 4,34 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,74 persen di perkotaan dan 3,65 persen di perdesaan), gula pasir (2,98 persen di perkotaan dan 3,15 persen di perdesaan) dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :

a. Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada September 2020 adalah beras dan rokok kretek filter, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada dibawah ini.

**Tabel 2. 10 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020**

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Beras	16,59	Beras	18,61
2	Rokok kretek filter	13,95	Rokok kretek filter	10,66
3	Telur Ayam Ras	4,04	Telur ayam ras	4,34
4	Daging ayam ras	3,74	Daging ayam ras	3,65
5	Gula pasir	3,00	Gula pasir	2,90
6	Mie instan	2,33	Tempe	2,81
7	Tempe	2,25	Mie instan	2,72
8	Kue basah	2,18	Tahu	2,39
9	Tahu	2,17	Kue basah	2,37

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
10	Roti	1,96	Bawang Merah	2,26
11	Lainnya	21,35	Lainnya	22,74

Sumber: BPS, Berita resmi statistik kemiskinan, 2021

#### b. Komoditi Bukan Makanan

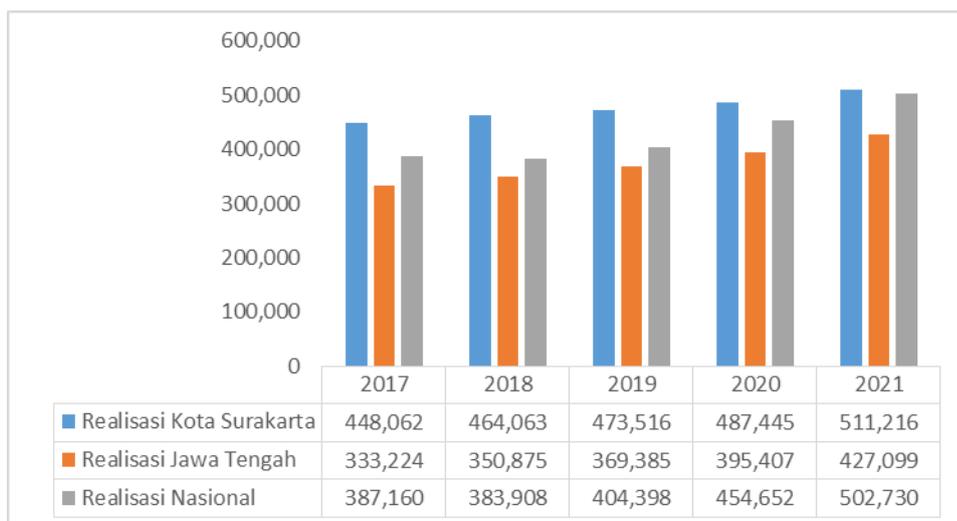
Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 11 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2020**

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	6,85	Perumahan	6,85
2	Bensin	4,03	Bensin	3,25
3	Listrik	2,61	Listrik	1,65
4	Pendidikan	1,80	Pendidikan	1,35
5	Perlengkapan mandi	1,46	Perlengkapan mandi	1,23
6	Lainnya	9,69	Lainnya	10,23

Sumber: Berita resmi statistik kemiskinan, BPS 2021

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran Garis Kemiskinan yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan di Kota Surakarta memiliki kecenderungan kenaikan yang besar dalam lima tahun terakhir (2017-2021), dengan kenaikan mencapai Rp.57.152. Tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya cukup berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin. Jika melihat besaran garis kemiskinan di Kota Surakarta ditahun 2021 sebesar Rp. 511.216 lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 427.099 dan Nasional Rp 502.730.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 10 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

Ukuran garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp.511.216 ditahun 2021. Jika dialihkan menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan akan lebih besar lagi. Dengan demikian akan terlihat bahwa masih banyak penduduk di Kota Surakarta hidup hampir di bawah garis kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota sekitar angkanya kategori tinggi. Garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp. 511.216 relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi keempat tertinggi setelah Kota Semarang sebesar Rp. 543.929, Kota Magelang sebesar Rp. 537.783 dan Kota Tegal sebesar Rp 523.413. Perbandingan garis kemiskinan Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 11 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun pada periode lima tahun terakhir (2017- 2021), pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 8,99%, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 8,62%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 12 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017–2021**

Persentase kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 9.4%, menjadikan persentase kemiskinan Kota Surakarta tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun masih rendah dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79% dan Nasional sebesar 10,14%. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan Kota Surakarta masih dirasa kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

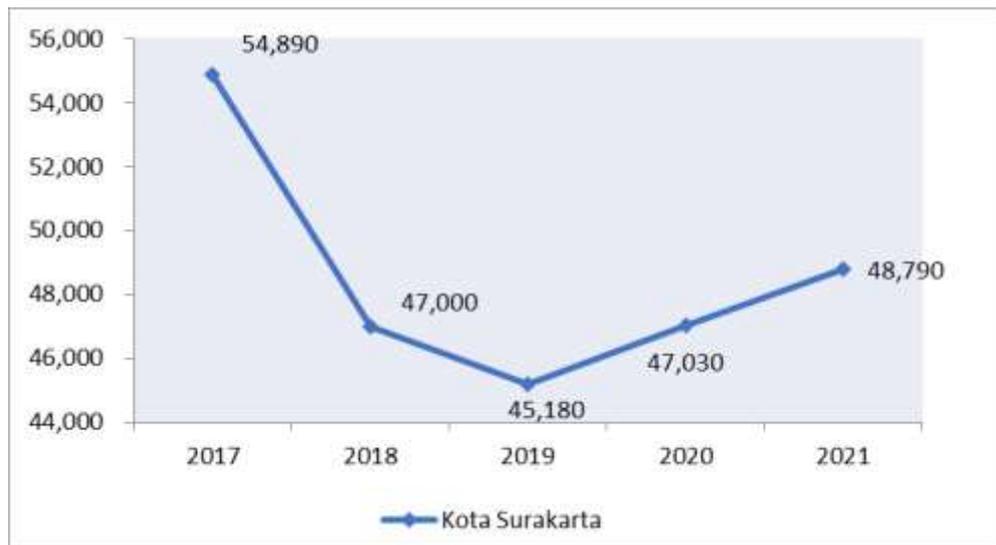


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 13 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2021**

### 3. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021, terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 54.890 jiwa menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 45.180 jiwa, tetapi pada tahun 2020 terkoreksi kembali menjadi 47.030 jiwa akibat Pandemi COVID 19. Kembali meningkat kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 48,790. Perkembangan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017-2021 (Jiwa)**

#### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 1,87, kemudian pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,47 lalu pada tahun 2019 meningkat kembali pada angka 1,60, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,51. Pada tahun 2021 naik pada angka 1,83, kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada di bawah ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 15 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 1,83 termasuk dalam kelompok indeks kedalaman kemiskinan tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,94 dan Nasional sebesar 1,67. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi.

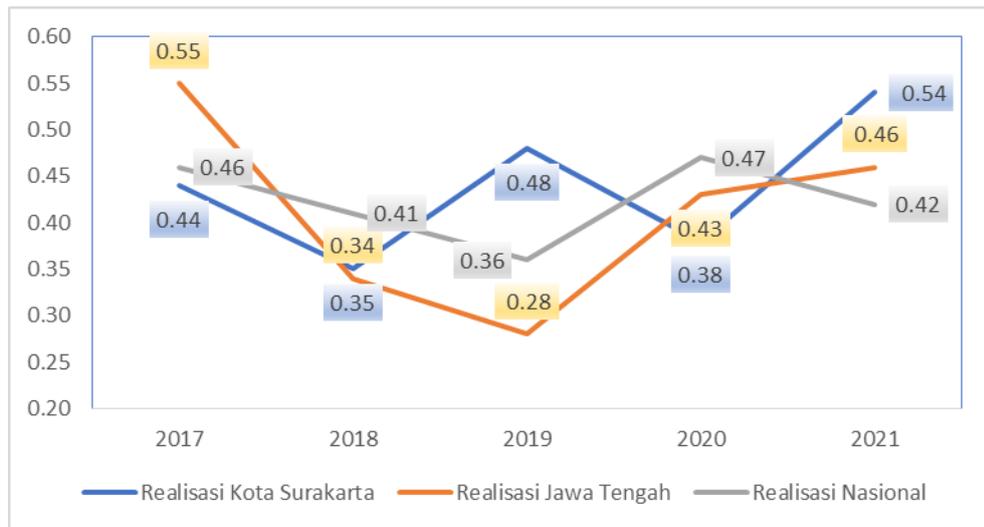


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 16 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021**

#### 5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017- 2021) di Kota Surakarta menunjukkan tren fluktuasi, yaitu sebesar 0,44 pada tahun 2017 dan turun kembali menjadi 0,35 di tahun 2018 kemudian naik kembali menjadi 0.48 lalu turun kembali menjadi 0,38 di tahun 2020 dan naik kembali menjadi 0,54 pada tahun 2021. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta pada tahun terakhir mengalami penurunan, berbeda dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber :BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 17 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 0,54 menempati posisi tertinggi bila dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,46 dan namun di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,42. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber :BPS Kota Surakarta, 2022

**Gambar 2. 18 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021**

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 80,85 menjadi sebesar 82,62. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 19 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 82,26. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 83,6; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 83,55; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 82,26. Secara rinci terlihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 20 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021**

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 -2021 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2017 sebesar 77,03 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22 tahun. Perkembangan angka harapan hidup kota Surakarta pada tahun 2016 - 2020 bisa dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa tengah, 2022

**Gambar 2. 21 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 77,32 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,47 tahun) dan Nasional (71,57 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,55 tahun) dan Kota Semarang (77,51 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

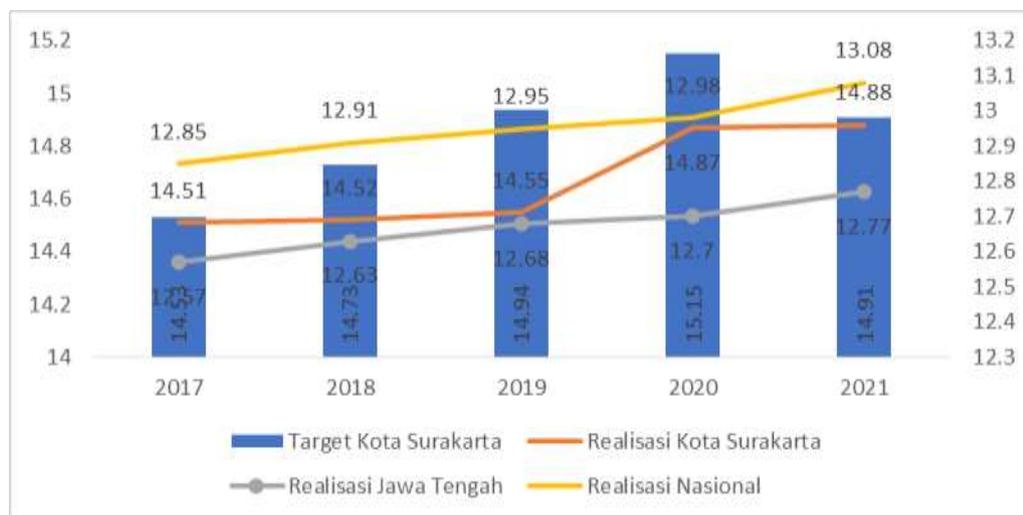


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 22 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

## 2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,5 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2022

**Gambar 2. 23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 14,88 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,77 tahun) dan Nasional (13,08 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,53 tahun) dan Kota Salatiga (15,42 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

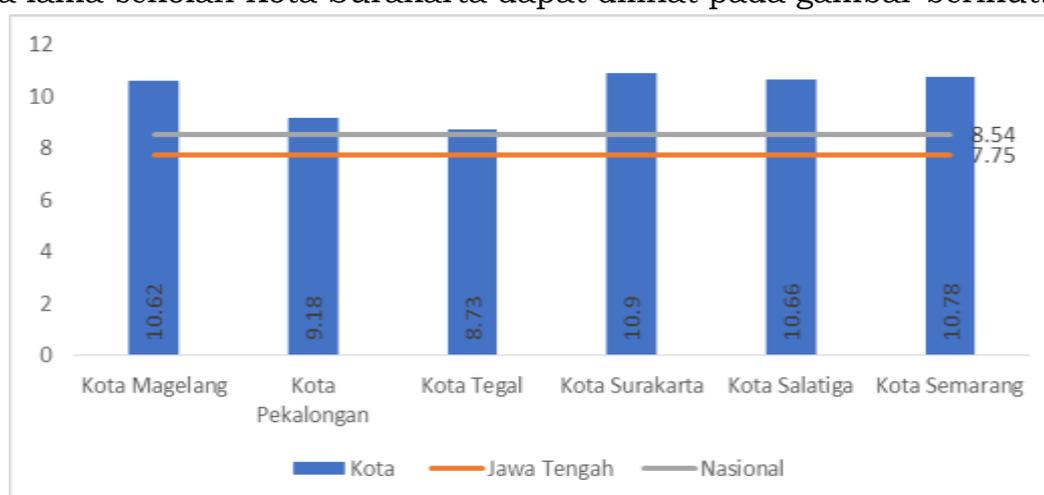


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 24 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah

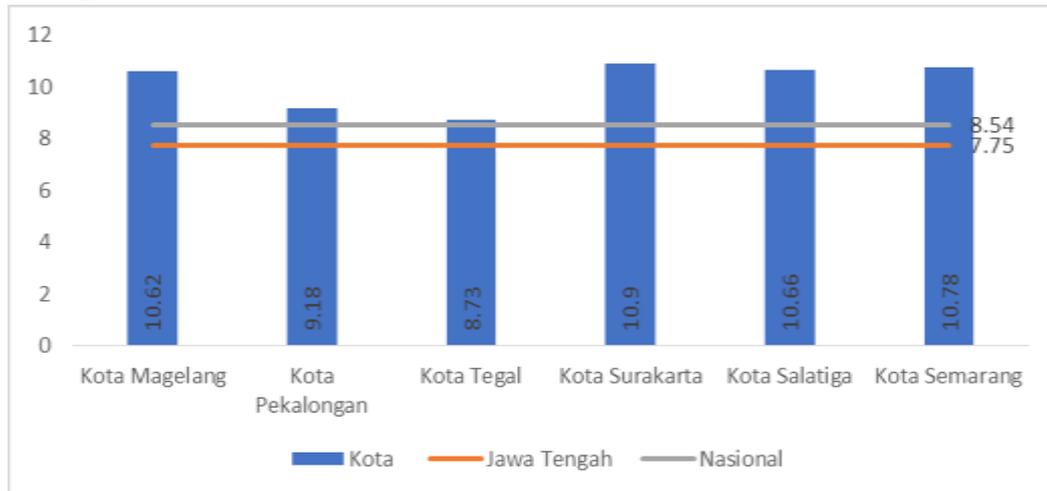
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2017 - 2021 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,38 tahun pada tahun 2017 menjadi 10,9 tahun pada tahun 2021. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 10,9 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,75 tahun) dan Nasional (8,54 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

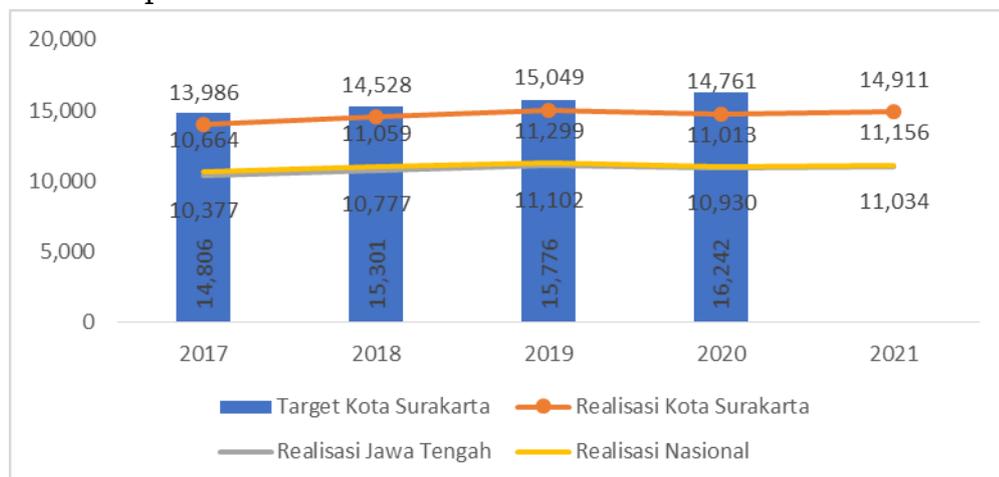


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 26 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

#### 4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp.13.986 ribu pada tahun 2017 menjadi Rp.14.911 ribu pada tahun 2021. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 27 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2021 sebesar Rp. 14.911 ribu berada di atas Provinsi (Rp.11.156 ribu) dan Nasional (Rp.11.034 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (Rp.15.843 ribu) dan Kota Semarang Rp.15.425 ribu. Rata-rata capaian pengeluaran per kapita tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pengeluaran. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2. 28 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Ribu Rupiah)**

### 2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2017 - 2021, dari sebesar 96,74 pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,89 pada tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2. 29 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021**

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 96,89 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,48) dan rata-rata Nasional (91,27) serta menempati urutan tertinggi dibanding Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2. 30 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021**

Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator

komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Jika dilihat dari indikator angka harapan hidup maka dapat terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2021 yang menunjukkan nilai 79,23 tahun sedangkan laki-laki hanya sebesar 75,57 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator harapan lama sekolah maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut cukup baik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya harapan lama sekolah untuk perempuan cenderung lebih rendah.

Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 11,42 tahun untuk laki-laki dan 10,54 tahun untuk perempuan pada tahun 2021. Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 12 Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,26	78,96	75,31	79,01	75,32	70,02	75,45	79,12	75,57	79,23
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42	14,57	14,43	14,58	14,47	14,59	14,77	14,93	14,78	14,94
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,96	9,84	11,09	10,01	11,10	10,09	11,25	10,30	11,42	10,54
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	14.093	12.963	14.673	13.493	15.229	13.783	14.932	13.504		

Sumber: BPS Nasional, 2022

Tantangan yang dihadapi Kota Surakarta adalah peran ekonomi perempuan yang menghasilkan pendapatan. Tantangan ke depan dengan resiko kelesuan ekonomi pasca pandemi memerlukan fokus pengembangan peluang usaha perempuan.

### 2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender

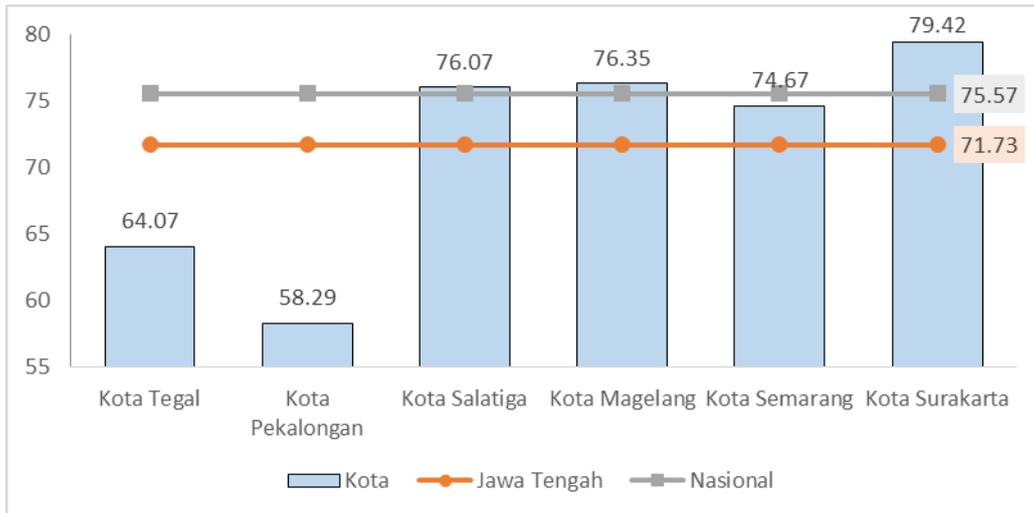
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76 naik menjadi sebesar 79,42 pada tahun 2020. Hal ini sama dengan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan IDG Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020. Selengkapny dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2020

**Gambar 2. 31 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020**

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 79,42, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi teratas. Selengkapny dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2. 32 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020**

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 20% menjadi sebesar 22,22%. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Tengah yang mengalami penurunan, yaitu dari 24% di tahun 2017 menjadi 18,80% di tahun 2020.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 48,66% menjadi sebesar 51,06% di tahun 2020.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan stagnan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 43,94% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 13 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	7102	7102	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	n/a	00,00	00,00	20,00	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	n/a	46,66	45,06	50,89	51,06
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	n/a	43,94	43,93	43,95	44,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

#### **2.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2017 sampai 2019 yaitu dari 4,57% menurun menjadi 4,49%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 7,92%. Pada tahun 2021 cukup sedikit mengalami penurunan pada angka 7,85%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Timbulnya gelombang PHK ini tentu saja menambah jumlah pengangguran yang ada. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang berusaha tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang ada. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta, TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020.



Sumber : , Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2021

**Gambar 2. 33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)**

Dengan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 sebesar 7,85%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,95%) dan berada di bawah Nasional (6,49%) serta terendah keempat diantara kota lainnya. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 - 8 orang merupakan pengangguran.



Sumber: Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022

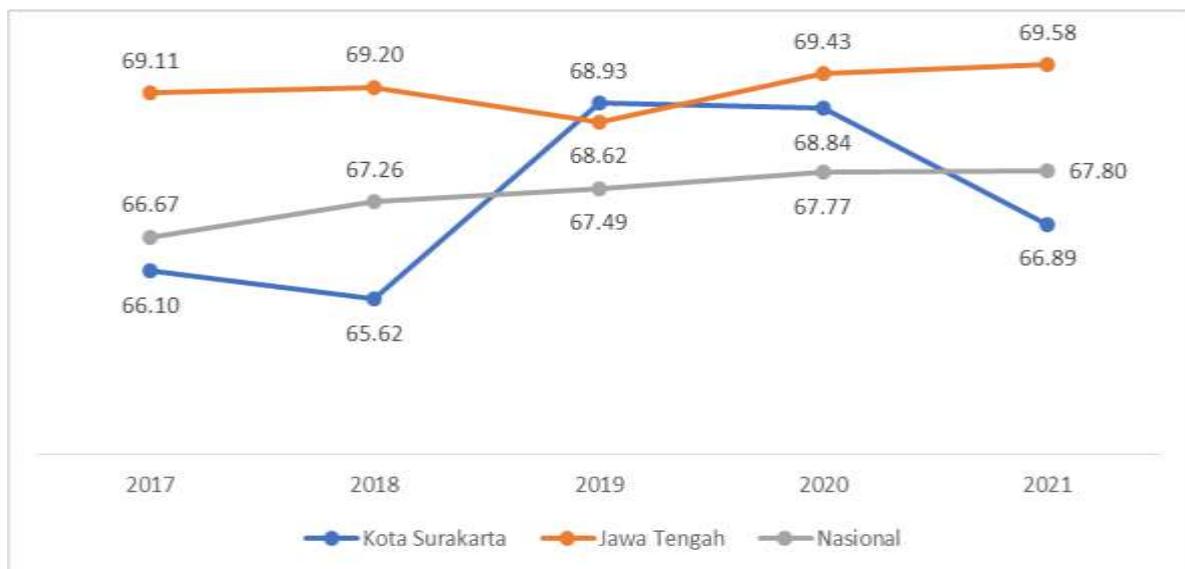
**Gambar 2. 34 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)**

Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonominya sebagian besar adalah pada sektor perdagangan, jasa dan

industri menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama pada para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

#### 2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 mengalami fluktuatif cenderung naik dan turun hingga tahun 2021 dari angka 66,10% pada tahun 2017 menjadi 65,62% pada tahun 2018, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu 68,84% lalu turun kembali ke angka 66,89% pada tahun 2021. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022

**Gambar 2. 35 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)**

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,41%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (69,58%). Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2021 berada di posisi terendah kedua setelah Kota Magelang sebesar 67,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022

**Gambar 2. 36 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)**

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum sebagai evaluasi kinerja 5 tahun terakhir menjadi dasar bagi perumusan permasalahan pembangunan yang akan dianalisis bersama dengan tantangan global dan nasional menjadi isu strategis pembangunan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Indikator Kinerja Kunci per Urusan
- b. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
- c. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

### **2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indikator kinerja program APK 3-6 tahun tercapai sebesar 63,70%, hal tersebut disebabkan pada masa pandemi orang tua anak didik PAUD belum/menunda mendaftarkan anak-anaknya untuk masuk ke satuan PAUD yang mengakibatkan satuan PAUD banyak yang mengalami kekurangan murid sehingga tidak ada biaya operasional (PAUD tutup). Upaya mengatasi permasalahan dilakukan dengan Mengoptimalkan PJJ dengan pendampingan orang tua dan home visit sampai diizinkan untuk melaksanakan PTM terbatas pada September 2021; dan Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan PAUD dengan penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD (dipermudah penggunaannya).

Indikator kinerja program Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal (PNF) tercapai sebesar 59,95% yang disebabkan dampak pandemi sehingga jumlah siswa di satuan pendidikan kesetaraan,

khususnya LKP mengalami penurunan. Untuk itu akan dilakukan upaya akan menyelenggarakan PNFestival untuk mempromosikan lembaga non formal dan pengoptimalan penyisiran anak tidak sekolah di tahun 2022.

Pada Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator kinerja Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal tercapai sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut didukung 1 (satu) kegiatan yakni Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar tercapai sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan telah sesuai dan mendukung terhadap pencapaian target program.

Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan tercapai sebesar 97,44%. Indikator kinerja program tersebut didukung 1 (satu) kegiatan yakni Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tercapai sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan telah sesuai dan mendukung terhadap pencapaian target program.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2021 yang diterima oleh SD Negeri Cemara Dua No. 13 dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri yang diterima SMP Negeri 1 Surakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dinas Pendidikan akan melakukan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke wilayah bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk selanjutnya ATS tersebut dapat difasilitasi untuk memperoleh pendidikan baik melalui sekolah formal maupun informal dengan kejar paket A/B/C melalui PKBM tanpa dipungut biaya.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 14 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,88
2.	APK 3-6 Tahun	Persen	63,70
3.	APS 7-12 Tahun	Persen	99,49
4.	APS 13-15 Tahun	Persen	100
5.	APS 19-24 Tahun	Persen	39,42

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
6.	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.	Persen	100
7.	Persentase Guru Layak Mengajar	Persen	87,17
8.	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	Persen	100
9.	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	Persen	100
10.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,9
11.	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Persen	0
12.	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	Persen	0
13.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100
14.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100
15.	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100
16.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Persen	1:254
17.	Rasio guru/murid SD/MI	rasio	1:16,71
18.	Rasio guru/murid SMP/MTs	rasio	1:14,19
19.	Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Persen	89,08
20.	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Persen	85,47
21.	Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	Persen	66,92
22.	Persentase Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	Persen	92,44
23.	Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	Persen	95,96
24.	Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi	Persen	43,75
25.	Cakupan Layanan Pendidikan non formal	Persen	2,32
26.	APM SD/MI/Paket A (Tujuan 1)	Persen	99,73
27.	APM SMP/MTs/Paket B (Tujuan 1)	Persen	83,53
28.	Persentase Satuan pendidikan terakreditas A SD/MI (Tujuan 4)	Persen	67,06
29.	APK SD/MI/Paket A (Tujuan 4)	Persen	106,77
30.	APK SMP/MTs/Paket B (Tujuan 4)	Persen	94,08
31.	APK PAUD 3-6 tahun (Tujuan 4)	Persen	50,96
32.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4)	Persen	100
33.	Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (Tujuan 4)	Persen	97,4
34.	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (Tujuan 4)	Persen	43,18

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
35.	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (Tujuan 4)	Persen	57,13
36.	Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A SMP/MTs (Tujuan 4)	Persen	74,39
37.	Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur ≥ 25 tahun (Tujuan 4)	tahun	10,9
38.	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik (Tujuan 4)	Persen	25,46
39.	Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/ nasional/ internasional	buah	457

## 2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota surakarta mengalami peningkatan yaitu dari 77,22 pada tahun 2020 menjadi 77,32 pada tahun 2021. Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa).

Capaian indikator AKI dari tahun pada tahun 2020 sebesar 41,52 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menjadi 51,6 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini di sebabkan karena Migrasi ibu hamil yang sangat dinamis, sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau; Kurangnya pengetahuan ibu untuk mempersiapkan diri menjelang persalinan; dan Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga tentang pentingnya segera memeriksakan kesehatan saat merasakan gejala sakit.

AKB juga fluktuatif, pada tahun 2020 AKB sebesar 1,14 per 1.000 kelahiran hidup stagnan di 1,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. AKBa selama kurun waktu 2016 – 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 AKBa sebesar 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 1,96 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan Angka kematian Ibu dari Tahun 2016 - 2020 menunjukkan adanya perbaikan kinerja kesehatan pada tujuan ke-3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.

Indikator kinerja program Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa capaian sebesar 20%. Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa, capaiannya masih tinggi. Hal ini di sebabkan karena Masih kurangnya pendampingan penjangkau HIV dalam melakukan penelusuran pasien positif HIV yang Lost To Follow up;

Pengembangan sasaran tes HIV/AIDS. Belum optimalnya peran aktif kader dan LSM untuk menemukan dan membawa orang beresiko HIV/AIDS untuk diperiksa HIV/AIDS. Dengan semakin tingginya peran serta masyarakat maka kemungkinan ditemukannya penderita HIV/AIDS juga semakin tinggi; dan Sosialisasi tentang HIV/AIDS masih belum optimal sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti faktor risiko, cara penularan, dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit menular yang belum dapat disembuhkan, sehingga harus dipahami dan diwaspadai oleh masyarakat terutama cara penularan dan pencegahannya.

Indikator lain yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada tahun 2020 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 70,76%, di tahun 2021 meningkat menjadi 99,05%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 15 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Angka Harapan Hidup	tahun	77,32
2.	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,53
3.	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	Persen	86,11
4.	Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Persen	30,24
5.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	Persen	16,67
6.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	100
7.	Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	100
8.	Persentase Kelurahan STBM	Persen	100
9.	Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100
10.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	95,08
11.	Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	Persen	100
12.	Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	Persen	100

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2021</b>
13.	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	Persen	100
14.	Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	Persen	100
15.	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	00
16.	Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar	Persen	100
17.	Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	Persen	100
18.	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	Persen	100
19.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	17227
20.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia diatas 18 tahun	Persen	2,14
21.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen	99,05
22.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	5,6
23.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	Persen	68,82
24.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	Persen	88,2
25.	Angka kesakitan TB	per 100.000 penduduk	199,33
26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100
27.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100
28.	Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa	Persen	0,02
29.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	Persen	100
30.	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate	Persen	2,41
31.	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	3,74
32.	Cakupan puskesmas	Persen	340
33.	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	49,02
34.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persen	0,23
35.	Proporsi Puskesmas PONEB sesuai standar	Persen	100
36.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2021</b>
37.	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persen	100
38.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100
39.	Jamkesmas	orang	174058
40.	PKMS	orang	0
41.	Jamkesda Provinsi	orang	0
42.	Angka harapan hidup	tahun	77,32
43.	Persentase Peserta BPJS yang premi dibayar pemerintah	Persen	19,31
44.	Persentase peserta BPJS dari masyarakat kota Surakarta	Persen	95,08
45.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Tujuan 1)	Persen	100
46.	Persentase anak usia 0-12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Tujuan 1)	Persen	96,27
47.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (Tujuan 2)	Persen	1,38
48.	Prevalensi ibu hamil KEK (Tujuan 2)	Persen	3,61
49.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Balita (Tujuan 2)	Persen	1,96
50.	Prevalensi balita gizi buruk (Tujuan 2)	Persen	0
51.	Prevalensi anemia pada ibu hamil (Tujuan 2)	Persen	9,78
52.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (Tujuan 2)	Persen	82,96
53.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup (Tujuan 3)	per 1000 kelahiran hidup	51,6
54.	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan (Tujuan 3)	Persen	100
55.	Cakupan pelayanan nifas (Tujuan 3)	Persen	99,98
56.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (Tujuan 3)	Persen	100
57.	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Tujuan 3)	Persen	100
58.	Angka Kesakitan Malaria (Tujuan 3)	Persen	0
59.	Angka penemuan kasus baru kusta (Tujuan 3)	Persen	1,04
60.	Angka kasus filariasis yang ditangani (Tujuan 3)	Persen	100
61.	Persentase merokok pada penduduk umur ? 18 tahun (Tujuan 3)	Persen	2,14
62.	AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup) (Tujuan 3)	per 1000 kelahiran hidup	1,14
63.	AKBa (per 1.000 Kelahiran Hidup) (Tujuan 3)	per 1000 kelahiran hidup	1,96

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
64.	Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Tujuan 3)	Persen	28,56
65.	Tingkat Deteksi Dini Kesehatan Masyarakat	Persen	100

Urusan kesehatan terkait dengan pelayanan dilaksanakan oleh Puskesmas dan RSUD. Kinerja pelayanan RSUD Kota Surakarta. Indikator kinerja RSUD meliputi BOR, AVLOS, TOI, BTO dan NDR.

- a. BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, kinerja RSUD Kota Surakarta mencapai 32,18%.
- b. AVLOS (Average Length Of Stay) = merupakan angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat, AVLOS ideal adalah berkisar antara 6 - 9 hari. Kinerja RSUD Kota Surakarta sebesar 2,71 hari.
- c. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal adalah 1 - 3 hari. Dan RSUD Kota Surakarta TOInya sebesar 5,57 hari.
- d. BTO (Bed Turn Over) adalah angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan. BTO ideal adalah 40 - 50 kali. Sedangkan RSUD Kota Surakarta angka BTONya mencapai 83 kali dalam setahun.
- e. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

**Tabel 2. 16 Capaian Indikator RSUD Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,33
2.	BOR (Bed Occupancy Ratio)	Persen	32,18
3.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (hari)	hari	2,71
4.	TOI (Turn Over Interval)	hari	5,57
5.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	hari	44,47
6.	NDR (Net Death Rate)	Persen	0,76
7.	Proporsi RS PONEK	Persen	40
8.	Proporsi RS terakreditasi	Persen	84,21

Kinerja urusan kesehatan berkontribusi pada penyiapan manusia yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang inklusif menuju smart society dalam integrasi sistem menuju Smart City untuk pembangunan berkelanjutan.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Infrastruktur dalam kondisi baik merupakan indikator yang disusun atas kondisi jalan, jembatan dan saluran drainase, dari tahun ke tahun presentase infrastruktur dalam kondisi baik terus mengalami perbaikan dari 85,47% pada tahun 2020 menjadi 86,3% pada tahun 2021. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase jalan baik dari tahun ke tahun.

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 - 2031. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Persentase kawasan memiliki RTBL tahun 2021 sebesar 50%, sementara itu untuk ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital tahun 2021 mencapai 100%.

Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Surakarta tahun 2021 selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 17 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	86,3
2.	Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik	Persen	87,95
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Persen	100
4.	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun	Dokumen	5
5.	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persen	9,09
6.	Persentase Panjang drainase kondisi baik	Persen	82,26
7.	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kondisi Mantap	Persen	88,64
8.	Persentase Panjang Jaringan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	92,96
9.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (permendagri 18 th 2020)	-	88,64
10.	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	94,57
11.	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	97,2
12.	Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	87,95
13.	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Tujuan 9)	km	190,04
14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	82,26
15.	Presentase pembangunan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik lingkup kewenangan kota	Persen	86,96
16.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Persen	88,64
17.	Panjang jembatan dalam kondisi baik	Persen	92,96

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
18.	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kebinamargaan	Persen	72,22
19.	Presentase wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani	Persen	96,4
20.	Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital	Persen	100
21.	Presentase kawasan memiliki RTBL	Persen	50
22.	Cakupan Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	65,1
23.	Presentase PJU yang telah dimeterisasi	Persen	30
24.	Jumlah titik lampu PJU yang dibayar	Persen	100
25.	Presentase luasan ruang publik yang dimanfaatkan	Persen	100
26.	Persentase tersedianya Prasarana Umum di Kluster Ekonomi Kreatif	Persen	20
27.	PJU	buah	16169
28.	Persentase Penerangan Jalan Umum termeterisasi	Persen	30

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi empat sub urusan yaitu perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja perumahan dan permukiman di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa capaian indikator tahun 2021. Persentase rumah layak huni di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2021 persentase rumah layak huni sebesar 94,17%. Ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 106.850 unit. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDG's tujuan ke-11 yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.

Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja program Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) tercapai sebesar 97,45% pada tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dan mendukung pencapaian target kinerja program.

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman di Kota Surakarta tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2. 18 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rasio kawasan kumuh	Persen	2,55
2.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	94,17
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	Persen	97,45
4.	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	Persen	7
5.	Persentasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Persen	85,71
6.	Presentase Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	94,57
7.	Presentase Rumah Tangga bersanitasi	Persen	97,2
8.	Rumah tidak layak huni	Persen	5,83
9.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	29,94
10.	Ketersediaan rumah layak huni	unit	106850
11.	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	Persen	97,45
12.	Cakupan rumah tangga bersanitasi (Tujuan 1)	Persen	97,2
13.	Persentase Kawasan Kumuh (Tujuan 1)	Persen	2,55
14.	Cakupan pelayanan air minum perkotaan (Tujuan 1)	Persen	94,57
15.	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tujuan 6)	Persen	100
16.	Jumlah Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (Tujuan 6)	Persen	100
17.	Jumlah instalasi pengelolaan kumpur tinja perkotaan (Tujuan 6)	unit	1
18.	Persentase rumah tangga pengguna rumah bersih (Tujuan 6)	Persen	94,57
19.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Tujuan 6)	Persen	97,2
20.	Rumah tidak layak huni (Tujuan 11)	unit	6612

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya

tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kota Surakarta selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya.

Salah satu upaya menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan adalah dengan memaksimalkan fungsi Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan. (PERDA KOTA SURAKARTA No 18 Tahun 2018). Selain itu terdapat juga Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Oleh karena itu kesiapsiagaan masyarakat Kota Surakarta dalam mengantisipasi bencana dilakukan dengan berbagai tindakan mulai dari pengaktifan pos siaga, simulasi pelatihan, koordinasi penanggulangan bencana, penyediaan sarana prasarana maupun penyusunan rencana kontinjensi.

Perencanaan penanggulangan bencana terpadu dengan penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan memiliki peran penting dalam fase pra bencana untuk meminimalkan ancaman yang ada. Setiap bencana dikaji berdasar parameter yang berbeda dengan mengacu pada

pedoman yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Keseluruhan parameter tersebut dapat menentukan potensi bahaya pada suatu kawasan terancam bencana. Ada 9 Kelurahan tangguh bencana dari total 54 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta yaitu :

1. Kelurahan Mojo;
2. Kelurahan Semanggi;
3. Kelurahan Kedung Lumbu;
4. Kelurahan Gandekan;
5. Kelurahan Pajang;
6. Kelurahan Sumber;
7. Kelurahan Jebres;
8. Kelurahan Joyotakan;
9. Kelurahan Banyuanyar.

Kinerja Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar tercapai sebesar 100%. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPBD telah sesuai dalam pencapaian target kinerja program.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tak hanya bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran, namun juga pencegahan. Hal tersebut selaras dengan misi Dinas Pemadam Kebakaran yakni meningkatkan profesionalisme aparatur yang berdedikasi tinggi, peduli, serta antisipasif; memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga melakukan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; serta meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 19 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	Persen	100
2.	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	Persen	91,52
3.	Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	1,42

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
4.	Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	2,7
5.	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persen	100
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Lokasi	3
7.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	rasio	3,28
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	buah	22,5
9.	Rasio Linmas per satuan penduduk	rasio	1,42
10.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	100
11.	Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persen	91,52
12.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	lokasi	3
13.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	rasio	3,28

## 6. Sosial

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PPKS yang tertangani sudah mencapai 50%. Kemudian untuk Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di tahun 2021 sebesar 100%. Perkembangan capaian indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun ke tahun fluktuatif namun cenderung meningkat.

Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial tercapai sebesar 50%. Indikator kinerja program tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial tidak secara langsung mendukung program dikarenakan sangat tergantung pada program pemerintah pusat namun tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan kategori PPKS fakir miskin.

Kinerja Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperoleh capaian kinerja program sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan capaian sebesar 122%. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial telah mendukung dan sesuai terhadap pencapaian target program tersebut.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 20 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	50
2.	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Persen	100
3.	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	100
4.	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	50
5.	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100
6.	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Persen	70
7.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	20
8.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	50
9.	Persentase PMKS Skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	29
10.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi (buah)	buah	42
11.	Jumlah organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	buah	20
12.	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	72,34
13.	Jumlah unit dapur umum mobile untuk penanganan bencana	unit	1
14.	Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah mendapat reintegrasi (pemulangan) dan rehabilitasi sosial	Persen	20
15.	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	64,75
16.	Persentase Panti Sosial skala kabupaten / kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	29

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
17.	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina	Persen	50
18.	Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	50
19.	Jumlah PMKS	orang	50
20.	Jumlah Orang Miskin	orang	14773
21.	Persentase penduduk miskin	Persen	9,4
22.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan/PKH (Tujuan 1)	KK	18239
23.	Jumlah penyandang disabilitas (Tujuan 1)	orang	56,64

### 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Pada indikator SDG's tujuan ke-8 untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh yaitu tingkat pengangguran terbuka. pada Tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan

Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan tercapai sebesar 97,20%. Indikator kinerja program tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan capaian indikator kegiatan sebesar 97,20%. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah mendukung dan sesuai dengan pencapaian target program.

Kinerja Program Hubungan Industrial dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/PKB tercapai sebesar 82,80%. Indikator kinerja program tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan

sebesar 92,40%. Belum optimalnya capaian indikator kinerja program tersebut disebabkan masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja kepada pekerja. Upaya mengatasi permasalahan dilakukan dengan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun Anggaran 2022. Indikator ini juga digunakan dalam indikator capaian SDG's Tujuan ke-10.

Capaian Indikator Urusan tenaga kerja Kota Surakarta Tahun 2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 21 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	47,4
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	Persen	11
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,85
4.	Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran	Persen	6,74
5.	Cakupan serapan tenaga kerja terampil	Persen	50,54
6.	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	orang	282178
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,89
8.	Jumlah Penduduk Bekerja (orang)	orang	260025
9.	Rasio Penduduk Bekerja	Persen	92,15
10.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,85
11.	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	90,88
12.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	100
13.	Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	11
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Tujuan 8)	Persen	7,85
15.	Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (Tujuan 10)	Persen	1,14

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan fluktuasi selama kurun waktu 2016 – 2020, IPG pada tahun 2016 sebesar 96,36 naik menjadi sebesar 96,84 pada tahun 2021. Pada tahun 2016 IDG Kota Surakarta sebesar 74,7 dan di tahun 2019 IDG Kota Surakarta meningkat menjadi 79,42 pada tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan sedikit

mengalami penurunan. Kekerasan terhadap perempuan selama kurun cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD's tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO sebesar 0,01% pada tahun 2021. Sementara itu untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Status capaian Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta menjadi utama pada tahun 2021. Masuknya indikator persentase partisipasi perempuan dalam parlemen ke dalam salah satu tujuan ke-5 SDG's, perlu mendapatkan perhatian khusus.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 22 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan aktif	Persen	100
2.	Cakupan kebutuhan koordinasi Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Persen	35
3.	Kemandirian Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	lembaga	7
4.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang memiliki kapasitas dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	100
5.	Persentase keluarga yang terfasilitasi dalam upaya mewujudkan KG dan hak anak	Persen	100
6.	Cakupan data gender dan anak teranalisis dan tersaji dalam dalam kelembagaan data	Persen	100
7.	Pemenuhan Data SIGA OPD	nilai	100
8.	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mengikuti pengembangan PHA	Persen	90
9.	Jumlah lembaga layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang sudah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	60
10.	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terkoordinasikan	Persen	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
11.	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	54
12.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	47
13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	79,42
14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	96,84
15.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	21
16.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	96,84
17.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	79,42
18.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2
19.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	53
20.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persen	0,01
21.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persen	0,01
22.	Jumlah kasus kekerasan	kasus	79
23.	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	Persen	100
24.	Status KLA	buah	utama
25.	Jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan)	KK	7398
26.	Proporsi PD yang menerapkan anggaran responsif gender di Renja PD100	Persen	100
27.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (Tujuan 5)	Persen	20
28.	Rasio KDRT (Tujuan 5)	rasio	1 : 4613
29.	Persentase PKK aktif	Persen	100
30.	Persentase Posyandu aktif	Persen	100
31.	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responisi gender dalam renstra dan RKPD (Tujuan 5)	Persen	96,84

### 3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan

dalam jumlah cukup dan aman, perlu diciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang ter cermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Berkaitan dengan ketersediaan pangan, Kota Surakarta menghadapi kendala produksi bahan pangan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah. Ketersediaan energi per kapita tahun 2021 sebesar 2.520 kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein perkapita sebesar 77,48 gram/kapita/hari pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Surakarta telah memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2013 yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 1.078,69 kkal dan protein 1.401,12 gram per hari.

Aksesibilitas/keterjangkauan bahan pangan dipengaruhi oleh inflasi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun inflasi di Kota Surakarta relatif stabil, kenaikan harga bahan pangan terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, baik dalam rangka pemantauan maupun pengendalian harga dan pasokan bahan pangan. Setiap tahun data mengenai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah selalu tersedia di Kota Surakarta.

Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang baik namun perlu terus dioptimalkan. Skor PPH menunjukkan angka 92,8 pada tahun 2021, kondisi tersebut juga mengindikasikan kinerja indikator persentase pola pangan harapan SDG's Tujuan ke-2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan telah berjalan dengan baik. Beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah konsumsinya adalah daging, sayur dan buah, dan umbi-umbian. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, dan potensi pangan lokal yang belum banyak

dimanfaatkan penduduk.

Berkaitan dengan keamanan pangan, Pemerintah Kota Surakarta secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun demikian capaiannya perlu ditingkatkan, karena dilihat dari persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan baru mencapai 100% pada tahun 2021, Pencapaian penanganan daerah rawan pangan mencapai 40%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	92,8
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	nilai	94,84
3.	Konsumsi energi perkapita	kkal/ka p/hari	1989
4.	Konsumsi protein perkapita	Gram/k ap/hari	63,4
5.	Angka Ketersediaan Energi	kkal/ka p/hari	2520
6.	Angka Ketersediaan Protein	Gram/k ap/hari	77,48
7.	Ketersediaan pangan utama	buah	198,4
8.	Persentase ketersediaan pangan utama terjangkau	Persen	198,4
9.	Persentase ketersediaan bahan pangan pokok strategis	Persen	845,42
10.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ka p/hari	2594
11.	Ketersediaan protein per kapita	Gram/k ap/hari	86,23
12.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	Persen	100
13.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100
14.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	40

#### 4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah tercapai sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut didukung 2 (dua) kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 100%. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung dan sesuai dengan pencapaian target program.

Sementara itu untuk Persentasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan tahun 2021 mencapai 85,71%. Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 24 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	Persen	100
2	Persentasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Persen	85,71

## 5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakarta menunjukkan angka 59,42% di tahun 2021. Untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) 90,09% pada tahun 2021.

Untuk indikator kinerja persampahan, ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah yang tertangani pada tahun 2021 sudah mencapai 95,54%. Sedangkan untuk Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan pada tahun 2021 tercatat sebesar 45,05%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan ke-11 pada SDGs yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Rasio ruang terbuka hijau di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 7,6%. Untuk Presentase RTH dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 73,86%. Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sebesar 100%.

Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2021 sebesar 82,85. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, juga sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan PROKLIM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kategori Utama bagi Proklam RW II Kelurahan Laweyan, Proklam RW V Kelurahan Joglo dan Proklam RW V Kelurahan Pajang serta kategori Madya bagi Proklam RW VIII Kelurahan Mojo, Proklam RW VIII Kelurahan Purwodiningrat dan Proklam RW III Kelurahan Jayengan.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 25 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	30,22
2.	Cakupan pemantauan kualitas air	Persen	55,56
3.	Cakupan pemantauan kualitas udara	Persen	75
4.	Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	Persen	0,59
5.	Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	Persen	35,19

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
6.	Presentase RTH dalam kondisi baik	Persen	73,86
7.	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	Persen	45,05
8.	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persen	70
9.	Persentase sekolah adiwiyata	Persen	35,69
10.	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang	6
11.	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100
12.	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	Persen	41,3
13.	Persentase sampah tertangani	Persen	95,54
14.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,98
15.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,06
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,42
17.	Persentase Pemantauan status mutu air	Persen	100
18.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	Persen	90,09
19.	Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Persen	80,85
20.	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	Persen	100
21.	Persentase penegakan hukum lingkungan	Persen	100
22.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (Tujuan 11)	Persen	95,54
23.	Pengembangan sebagai kota hijau yang menerapkan green waste di Kawasan Perkotaan (Tujuan 11)	buah	ya
24.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	Persen	7,6
25.	Persentase timbunan sampah yang didaur ulang (Tujuan 12)	Persen	6,5

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kota Surakarta giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Kepemilikan KTP di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat capaian pada tahun 2021 sebesar 99,74%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mencapai angka 86,25% pada tahun 2021.

Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2021 telah mencapai sebesar 99,29%, kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya 88%. Kepemilikan akta kelahiran terjadi fluktuasi dan pada tahun 2021 sebesar 99,79%.

Sedangkan Rasio Bayi ber-akte kelahiran, Rasio Pasangan berakte nikah, Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dan Cakupan Penerbitan Akte Cerai pada tahun 2021 telah mencapai 100%, termasuk Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak. Persentase kepemilikan Akte Kematian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2016 sebesar 72,2% dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 100%.

Tercapainya kepemilikan akta kelahiran secara 100% menunjukkan indikator perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk pemenuhan indikator kinerja pada tujuan SDG's ke-1 dan 16. Indikator lain untuk Cakupan Akte Kematian sampai tahun 2021 telah mencapai 100%.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta, adalah:

- a. Ketergantungan ketersediaan blanko e-KTP dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- b. Peralatan cetak e-KTP yang dimiliki sejak tahun 2011 sudah perlu dilakukan penggantian.
- c. Rendahnya SDM pelayanan pendaftaran penduduk terhadap pemahaman regulasi bidang kependudukan (persyaratan administrasi kependudukan).
- d. Tingginya jumlah permohonan dokumen pencatatan sipil

mengakibatkan waktu pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang telah disusun.

- e. Belum optimalnya pelayanan sistem SIAK yang diakibatkan ketergantungan jaringan pengoperasian SIAK secara terpadu dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh 34 perangkat daerah yang sudah melakukan PKS (Perjanjian Kerjasama).
- g. Belum optimalnya tingkat akurasi data kependudukan.
- h. Belum seluruh masyarakat terjangkau dalam pemberian pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,29
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100
3.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persen	99,79
4.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	99,94
5.	Rasio Pasangan Berakta Nikah	Persen	100
6.	Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Persen	100
7.	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	Persen	100
8.	persentase database yang valid dan update	Persen	100
9.	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	Persen	100
10.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	Ada
11.	Persentase kepemilikan dokumen administrasi penduduk	buah	99,29
12.	Kepemilikan KTP	Persen	99,74
13.	Rasio Bayi ber-akte kelahiran	Persen	100
14.	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100
15.	Cakupan penerbitan kutipan akte Kematian	buah	47569

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
16.	Pertumbuhan Penduduk dari aspek migrasi	orang	0
17.	Jumlah penerbitan akta perceraian	Dokumen	275
18.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 1 dan Tujuan 16)	Persen	86,25
19.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur (Tujuan 16)	Persen	99,94

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik. Dilihat dari 3 indikator yang di targetkan yaitu Persentase PKK aktif pada tahun 2021 sebesar 100%, Persentase Posyandu aktif pada tahun 2021 mencapai 100%, dan Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%) pada tahun 2021 mencapai 26%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 27 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1	Persentase PKK aktif	Persen	100
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100
3	Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	Persen	26

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pengendalian penduduk adalah jumlah anak dalam keluarga. Pada tahun 2021 rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 1,07 orang. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak kembali naik dan menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan.

Cakupan peserta KB aktif di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 71,07%. Sedangkan Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet need) pada tahun 2021 sebesar 16,64%. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dikarenakan persentase unmet need juga menjadi indikator dalam tujuan SDG's ke-3 dan 5. Selain itu, indikator SDG's tujuan ke-5 persentase usia perempuan PUS kurang dari 20 tahun sebesar 0,28% di Tahun 2021. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan meningkatnya pemahaman perempuan terkait pernikahan usia muda.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 28 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,1
2.	Persentase rumah dataku di kampung KB	Persen	100
3.	Cakupan keluarga yang mendapatkan materi edukasi pencegahan stunting	Persen	3,3
4.	Cakupan calon pengantin dan remaja yang mendapatkan materi edukasi pencegahan stunting	Persen	3,41
5.	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	orang	0,88
6.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	100
7.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	1
8.	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100
9.	Cakupan ketersediaan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	Persen	100
10.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di faskes	Persen	100
11.	Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	58,7
12.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	71,07
13.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	51,11
14.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	1,07

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
15.	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 tahun	Persen	0,28
16.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	Persen	9,88
17.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100
18.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Persen	76,94
19.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	Persen	81,54
20.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	Persen	78,47
21.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	Persen	71,2
22.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Tujuan 3)	Persen	71,07
23.	Angka penggunaan kontrasepsi jangka panjang (Tujuan 3)	Persen	33,6
24.	Total Fertility Rate (TFR) (Tujuan 3)	Persen	2,09
25.	Cakupan peserta KB aktif /CPR (Tujuan 1 dan Tujuan 3)	Persen	71,07
26.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) (Tujuan 3 dan Tujuan 5)	Persen	16,04
27.	Presentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (Tujuan 5)	Persen	0,28
28.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Muda (PUS) tentang metode kontrasepsi modern (Tujuan 5)	Persen	71,07
29.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,1

## 9. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Terminal bus merupakan prasarana jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kota Surakarta tahun 2021 memiliki fasilitas sarana perhubungan berupa 1 buah terminal bus tipe A dan 3 buah terminal tipe C. Jumlah terminal yang ada di Kota Surakarta ini sudah dapat memenuhi kebutuhan terminal sebesar 100%.

Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kondisi dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2021 sebesar 2068 unit. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 95,94% pada tahun 2021. Proses uji KIR angkutan umum ini sebenarnya tidak memerlukan waktu panjang, prosesnya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum tahun 2020 meliputi : JBB 2100 : Rp.90.000, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 90.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 110.000, JBB 8001 s/d 15000 : Rp.110.000, JBB 15000 ke atas : Rp.110.000, Gandengan : Rp 110.000, dan Tempelan : Rp. 110.000.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya tidak dipungkiri telah turut menyumbang pencemaran udara. Hal tersebut tentunya perlu upaya dan antisipasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai salah satu upaya pengendalian kualitas udara ambien di jalan raya adalah dengan mengendalikan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) di Kota Surakarta tahun 2021 sebanyak 96,23% kendaraan lulus uji emisi. Sementara itu untuk kendaraan pribadi yang lulus uji emisi sampai dengan 2021 mencapai 96,23%. Peningkatan lulus uji emisi pada kendaraan umum patut mendapatkan perhatian mengingat indikator tersebut juga menjadi indikator dalam tujuan 9 SDG;s yaitu infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Indikator lainnya pada Tujuan ke-11 yaitu persentase operasional koridor BST menjadi 91,67% pada tahun 2021.

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota pada tahun 2021 sebesar 201 unit. Jumlah angkutan kota menjadi 201 unit. Saat ini tersedia beberapa jenis sarana angkutan umum yang lebih menarik minat penumpang seperti taksi online dan ojek online, hal ini berdampak pada penurunan pengguna angkutan umum. Sehingga

pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi BST sebagai andalan transportasi publik pemerintah.

Sementara itu ketersediaan perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Surakarta meliputi rambu, marka, guardrail, dan penerangan jalan umum tahun 2021 mengalami peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 29 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rasio Konektivitas	Persen	92
2.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	2
3.	Jumlah angkutan kota	unit	201
4.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	unit	201
5.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	3791414
6.	Jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan kota	unit	201
7.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	Persen	100
8.	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) (Tujuan 9)	Persen	96,23
9.	Persentase operasional koridor BST yang terlayani (%) (Tujuan 11)	Persen	91,67
10.	Rambu (unit)	unit	3554
11.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	rasio	0,82
12.	Marka (unit)	unit	3200
13.	Jumlah Terminal Bis Tipe A (unit)	unit	1
14.	Jumlah Terminal Bis Tipe C (unit)	unit	3
15.	Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang	Persen	96,23
16.	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	2068
17.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	95,94
18.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	tahun	45
19.	JBB 2100	rupiah	90000
20.	JBB 2101 s.d. 3500	rupiah	90000
21.	JBB 3501 s.d. 8000	rupiah	110000
22.	JBB 8001 s.d. 15000	rupiah	110000
23.	JBB 15000 ke atas	rupiah	110000
24.	Gandengan	rupiah	110000

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2021</b>
25.	Tempelan	rupiah	110000

## 10. Komunikasi dan Informatika

Dalam UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan.

Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) saat ini telah menjadi penggerak ekonomi dunia abad ini. Tersedianya akses internet cepat melalui jaringan TIK nasional di seluruh wilayah negeri, akan mampu menggerakkan roda perekonomian jauh lebih cepat. Karena tersedianya akses komunikasi yang cepat, dimana saja dan kapan saja, akan melancarkan dan memudahkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, antara produsen dengan para konsumen, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antara Pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara guru dengan murid, antara sekolah dengan sekolah, antara rumah sakit dengan puskesmas, dan sebagainya.

Jumlah jaringan komunikasi yang tersebar di Kota Surakarta mencapai 89 unit pada tahun 2021. Sedangkan Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Website milik pemerintah daerah sebesar 117 website pada tahun 2021. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance sampai dengan tahun 2021 sudah 100%. Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website tahun 2021 sebanyak 100%, dan persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu sebesar 100%.

Indikator persentase penduduk yang terlayani mobile broadband pada tahun 2021 sebesar 100%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja SDG's ke-17 indikator terlayani mobile broadband telah berjalan dengan baik.

Capaian indikator urusan komunikasi dan informatika Kota Surakarta Tahun 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 30 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika  
Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	nilai	7,44
2.	Tersedianya buku profil daerah	buku	ada
3.	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	78
4.	Persentase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	Persen	100
5.	Indeks SPBE	nilai	2,75
6.	Jumlah jaringan komunikasi	unit	89
7.	Website milik pemerintah daerah	buah	117
8.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance	Persen	100
9.	Frekuensi Penyebarluasan informasi melalui Media elektronik/Cetak	kali	365
10.	Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website	Persen	100
11.	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan layanan online	Persen	97,14
12.	Persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu	Persen	100
13.	Jangkauan broadband kota (Tujuan 9)	Persen	100
14.	Persentase penduduk yang terlayani mobile broadband (Tujuan 17)	Persen	100

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Jumlah koperasi yang ada di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 610 unit. Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 48,68%. Jumlah koperasi sehat pada tahun 2021

sebesar 51,38%.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 3.635 unit di tahun 2021. Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat di tahun 2021 sebesar 100%. Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk sebesar 2,37% pada tahun 2021. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Surakarta dapat dilihat pada :

**Tabel 2. 31 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	4,45
2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	2,37
3.	Persentase Koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	Persen	0,49
4.	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	Persen	48,69
5.	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	Persen	14,75
6.	Persentase pemberdayaan UMKM	Persen	3,4
7.	Jumlah Koperasi	unit	610
8.	Koperasi aktif	Persen	48,68
9.	Persentase Koperasi Sehat	Persen	51,38
10.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	unit	3635
11.	Mikro	unit	3588
12.	Kecil	unit	44
13.	Menengah	unit	3
14.	Persentase Wirausaha Baru	Persen	0
15.	Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat	Persen	100
16.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Persen	2,37
17.	Jumlah Produk Unggulan Daerah	produk	3
18.	Jumlah Produk unggulan daerah per kecamatan (klaster)	buah	19
19.	Persentase pertumbuhan tenaga kerja KUKM yang dibina	Persen	-0,85

## 12. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kota Surakarta. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan

peluang penanaman modal di Kota Surakarta cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa, sementara untuk industri besar terkendala keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kota Surakarta antara lain faktor sumber daya manusia dan keterampilan, faktor stabilitas politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan dalam perizinan. Dari sisi sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja di Kota Surakarta tergolong baik. Stabilitas politik dan perekonomian juga relatif terjaga. Dari sisi perizinan usaha juga semakin mudah dan relatif cepat.

Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang baik. Persentase rata-rata pertumbuhan investasi di tahun 2021 sebesar 24,1%. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah investasi berskala nasional di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar Rp 4.560 milyar. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 juga menurun menjadi 20,96%. Total investasi yang masuk ke Kota Surakarta dari perilaku penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa investasi di Kota Surakarta termasuk kategori padat karya. Investasi cukup besar di sektor jasa perhotelan ke depan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di sisi lain investasi di Kota Surakarta juga ada yang termasuk padat modal. Investasi di bidang jasa telekomunikasi dan retail online termasuk investasi padat modal. Investasi atau usaha ini termasuk kategori smart industry atau smart corporation dengan kebutuhan tenaga kerja tidak terlalu banyak.

Pada masa yang akan datang smart industry atau smart corporation akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan.

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kota Surakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 32 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	31,75
2.	Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	-5,26

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
3.	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	Persen	100
4.	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	Persen	18,56
5.	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian	Persen	100
6.	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persen	100
7.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	unit	6346
8.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	unit	4.560.901.595.318
9.	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	20,96
10.	SDM	orang	22085
11.	PERSH	buah	6346
12.	Persentase rata-rata pertumbuhan investasi	Persen	24,1

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Surakarta juga semakin membaik. Jumlah organisasi pemuda yang dibina pada tahun 2021 sebesar 49 organisasi pemuda. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional pada tahun 2021 sebesar 65,65%. Kondisi menunjukkan bahwa prestasi di bidang olahraga mengalami penurunan. Hal tersebut tentu didukung oleh kinerja organisasi-organisasi olahraga yang ada. Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Surakarta mencapai 49 kelompok. Dan selain itu juga didukung dengan ketersediaan sarana-prasarana olahraga yang ada.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut: Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 33 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha	Persen	7,5
2.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	Persen	65,65

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
3.	Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga	Persen	55,5
4.	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	Persen	58,73
5.	Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	kegiatan	4
6.	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan	Persen	100
7.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	15
8.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Persen	637
9.	jumlah organisasi olahraga yang dibina	Organisasi	49
10.	Jumlah klub olahraga	buah	219
11.	Jumlah gedung olahraga	unit	259
12.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	buah	205
13.	Lapangan olahraga	buah	157
14.	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	Persen	62,7
15.	Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional	Persen	58,73
16.	Persentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi dikancah regional/nasional/internasional	Persen	66,67

#### 14. Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana

untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

Capaian indikator urusan statistik kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 34 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standart kebutuhan layanan data	Persen	100
2.	Buku Kota dalam angka	Dokumen	1
3.	Buku PDRB Kota	Dokumen	1
4.	Ketersediaan basis data sektoral sesuai kebutuhan data indikator kinerja utama daerah	Persen	100

#### 15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Surakarta adalah a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), dan b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Pada indikator jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen) di tahun 2021 sebesar 264 dokumen. Sementara itu untuk ketersediaan SOP persandian sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%.

Capaian indikator urusan persandian Kota Surakarta tahun 2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian	Persen	60
2.	Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen)	buah	264
3.	Persentase ketersediaan SOP persandian	Persen	100

## 16. Kebudayaan

Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi mejadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan adalah Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; dan cakupan kajian seni. Pada tahun 2021 cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami sebesar 58,5%. Sedangkan cakupan kajian seni telah mencapai 100% pada tahun 2021. Pada indikator SDG's tujuan ke-11 yaitu Kota Pusaka, Kota Surakarta telah menjadi bagian dari jaringan kota pusaka secara konsisten sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga nilai dan karya warisan budaya asli masih tetap dilakukan dengan baik. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	Persen	695,65
2.	Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional	Persen	59,5
3.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	40
4.	Cakupan gelar seni budaya	Persen	100
5.	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	Persen	5,5
6.	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	58,6
7.	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	Persen	6,7
8.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	Persen	39,5
9.	Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya	Persen	97,78
10.	Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	rasio	6,9
11.	persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	58,6
12.	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Persen	58,6
13.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	14
14.	Misi Kesenian	kali	2

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
15.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	44
16.	Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif (%)	Persen	81,4
17.	Cakupan Kajian Seni	Persen	100
18.	Cakupan Fasilitasi Seni	Persen	100
19.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	Persen	100
20.	Kota Pusaka (Tujuan 11)	unit/buah	1

## 17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut berbeda jauh dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sehingga dalam gambaran kinerja urusan perpustakaan dalam 5 tahun terakhir akan sedikit berbeda dengan indikator kinerja untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Kewenangan pemerintah kabupaten di urusan perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan adalah terkait penyediaan gedung/ruang perpustakaan yang representatif. Perpustakaan Kota

Surakarta memiliki luas lahan 1.600 meter persegi, dengan luas gedung pelayanan seluas 500 meter persegi dengan gedung berlantai dua sudah cukup representatif.

Kinerja lain terkait dengan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dapat dilihat dari angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh perpustakaan yang menyediakan daftar kunjungan, jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Kota Surakarta mencapai 678.845 pengunjung.

Salah satu hal yang menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan selain kondisi gedung yang baik, kelengkapan sarana dan prasarana, adalah kelengkapan koleksi. Kelengkapan bahan bacaan yang ada menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Khusus untuk perpustakaan daerah, saat ini memiliki koleksi bacaan sebanyak 441.400 buku. Di era digital ini, Perpustakaan Daerah juga menyediakan layanan perpustakaan digital. Salah satu bentuk layanan perpustakaan digital di Kota Surakarta adalah dikembangkannya aplikasi Isolo yang dapat diakses melalui android dan telah tersedia di playstore. Koleksi e-book yang telah tersedia kurang lebih sebanyak 1272 buku terdiri dari 890 buku non fiksi dan 402 buku fiksi.

Selain melalui perpustakaan, Kota Surakarta juga memiliki taman bacaan yang tersebar di seluruh Kelurahan di Kota Surakarta. Upaya mengoptimalkan program gemar membaca melalui taman bacaan masyarakat yaitu dengan (1.) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (2.) Penambahan koleksi bahan pustaka (3.) Peningkatan kompetensi SDM (4.) Inovasi tata kelola pelayanan perpustakaan dan (5) Peningkatan promosi masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 37 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	Persen	0
2.	Jumlah perpustakaan	unit	510
3.	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	195
4.	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	678845
5.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	441400
6.	Nilai Literasi Masyarakat	Persen	2,12

## 18. Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini OPD untuk mengelola arsip di intitusinya masing-masing.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan

dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip.

Di Kota Surakarta terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD diwajibkan menerapkan Sistem Pengelolaan Baku Kearsipan Melalui Aplikasi SIMARDI, sampai tahun 2021 sudah 100% OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan akan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, jumlah SDM pengelola kearsipan di Kota Surakarta saat ini sebanyak 100 orang. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

Terkait dengan jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika, pada tahun 2021 ada 78.175 dokumen yang diduplikasi. Seiring perkembangan e-government juga sedang dikembangkan jaringan Informasi Kearsipan Daerah. Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SIMARDI) yang saat ini dikembangkan secara offline direncanakan akan dikembangkan menjadi Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) berupa portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan secara online.

Capaian kinerja urusan kearsipan Kota Surakarta pada tahun 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 38 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	nilai	67,74
2.	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	Persen	0
3.	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	Persen	100
4.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	Persen	0,33

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
5.	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	Persen	50
6.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	125
7.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Dokumen	78175
8.	Persentase Pengelolaan arsip secara baku	Persen	100
9.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	Persen	100
10.	Persentase arsip yang didokumentasikan	Persen	78175
11.	Ketersediaan jaringan Sistem Kearsipan daerah	unit	4
12.	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	unit/12 jam	20151
13.	Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	Persen	10

### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu Perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum dan darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.

Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu pada tahun 2021 sebesar 43 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan telah mencapai 100% pada tahun 2021. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sebesar 28,51 kg/kap/th pada tahun

2021. Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Surakarta Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Produksi budidaya ikan	Ton	43
2.	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	207,55
3.	Produksi perikanan budidaya	Ton	43
4.	Cakupan bina kelompok perikanan	Persen	100
5.	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Ton	28,51

## 2. Pariwisata

Pariwisata merupakan satu unggulan daerah Kota Surakarta, terdapat beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh. Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yaitu: kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya dan kawasan pengembangan destinasi Sangiran dan sekitarnya. Demikian pula dalam rangka pengembangan pariwisata nasional Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dan sekitarnya yang menjadi kawasan wisata budaya yang menjadi tujuan utama wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke Jawa Tengah.

Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro, Grebeg Sudiro, Grebeg Maulud, dan Solo Batik Carnival. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011). Jumlah obyek wisata unggulan yang ada di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 22 unit.

Capaian kinerja urusan pariwisata dari tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,37
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	orang	1788858
3.	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	Persen	3,8
4.	Kunjungan wisatawan	orang	1788858
5.	Jumlah objek wisata unggulan	unit	22
6.	Jumlah Restoran	unit	691
7.	Jumlah Rumah Makan	unit	25
8.	Jumlah penginapan / hotel	unit	213
9.	Jumlah penginapan / hotel Bintang-5	unit	3
10.	Jumlah penginapan / hotel Bintang-4	unit	11
11.	Jumlah penginapan / hotel Bintang-3	unit	17
12.	Jumlah penginapan / hotel Bintang-2	unit	16
13.	Jumlah penginapan / hotel Bintang-1	unit	9
14.	Jumlah penginapan / hotel Non Bintang	unit	85
15.	jumlah Home Stay	unit	72
16.	Jumlah wisatawan Mancanegara (Tujuan 8)	orang	2526
17.	Jumlah wisatawan Nusantara / Domestik (Tujuan 8)	orang	1786332

\*) Istilah Hotel Melati diganti dengan Hotel Non Bintang Berdasarkan UU No. 10/ 2009 tentang Kepariwisata dan Permenparekraf No.6/2014 tentang Standar Usaha Hotel

### 3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan

Perizinan Usaha Pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,51% di tahun 2021. Perkembangan Kota Surakarta yang sangat pesat menjadikan tidak memungkinkan untuk mengolah dan mengembangkan lahan pertanian.

Produksi padi di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 766,47ton. Produktivitas padi juga fluktuatif antara 75,14 kw/ha pada tahun 2021. Peningkatan produksi disebabkan oleh daya dukung alat dan sarana pertanian yang semakin baik yang dilihat dari perbaikan sistem irigasi, penyaluran sarana prasarana pertanian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bibit padi yang tersertifikasi. Sementara itu penurunan produktivitas padi disebabkan oleh musim dan cuaca, hama dan penyakit tanaman.

Kinerja peternakan terutama terlihat dari jumlah populasi hewan (sapi) sebesar 365 ekor pada tahun 2021. Walaupun demikian produksi hasil peternakan 5765 ton di tahun 2021. Produksi daging meningkat dari sebanyak 5716 ton pada tahun 2021.

Terkait dengan kesehatan hewan, dalam rangka menjaga kualitas daging, dilakukan pengawasan dengan capaian Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH sebesar 98,8% pada tahun 2021. Secara rinci capaian indikator Urusan pertanian Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Beras yang aman	Persen	100
2.	Persentase Sayur yang aman	Persen	99,17
3.	Persentase Buah yang aman	Persen	100
4.	Persentase Biji-bijian yang aman	Persen	100
5.	Produktivitas padi	kw/hektar	75,14
6.	Produktivitas hortikultura	kw/hektar	5,68
7.	Luasan lahan pertanian	-	58,41
8.	Persentase daging ASUH	Persen	98,8
9.	Persentase daging babi layak konsumsi	Persen	100
10.	Persentase telur layak konsumsi	Persen	98
11.	Persentase susu layak konsumsi	Persen	90
12.	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	Persen	100
13.	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100
14.	Persentase pertumbuhan kelompok tani	Persen	38,88
15.	Produksi jagung	Ton	0
16.	Produktivitas padi per hektar	Ton	75,14

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
17.	Indeks pertanaman	Persen	263
18.	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	Persen	95
19.	Jumlah populasi hewan (sapi)	ekor	365
20.	Angka prevalensi penyakit hewan	Persen	6,46
21.	Angka prevalensi penyakit zoonosis	Persen	1,29
22.	Angka mortalitas hewan	Persen	0
23.	Produksi hasil peternakan	Ton	5765
24.	Daging	Ton	5716
25.	Telur	butir	49
26.	Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH	Persen	98,8
27.	Produksi padi (Tujuan 2)	Ton	766,47

#### 4. Perdagangan

Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, walaupun kinerjanya sedikit menurun. Jumlah jenis produk yang bisa diterima pasar internasional menunjukkan pada tahun 2021 sebesar 8 produk. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surakarta menunjukkan sebesar 54.108.026,96 pada tahun 2021.

Dalam peningkatan potensi perdagangan di Kota Surakarta dilakukan penataan pasar dan pengawasan terhadap usaha perdagangan. Persentase pasar yang diawasi sebesar 88,98 pada tahun 2021. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan sebesar 79,55% pada tahun 2021. Persentase lokasi PKL yang tertata sebesar 76,17% Tahun 2021.

Terkait tantangan perkembangan smart city untuk peningkatan pelayanan publik, di kota Surakarta sudah menerapkan e-retribusi pasar dan pelayanan perdagangan berperspektif pembangunan berkelanjutan, melalui program “Rerajut Ati”. Program ini merupakan program sinergi untuk pengembangan pasar tradisional memenuhi norma standar pelayanan pasar yang representatif.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 42 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	21,04
2.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SHP dan SIP dan SKA	Persen	100

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2021</b>
3.	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	Persen	79,55
4.	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	Persen	11,11
5.	Nilai ekspor	-	54108026,96
6.	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	Persen	33,3
7.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,02
8.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US Dollar	54108026,96
9.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional (Volume)	Ton	1686,55
10.	Jenis produk yang bisa diterima pasar internasional	produk	8
11.	Jumlah pedagang makanan dan minuman	unit	661
12.	Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran	Persen	100
13.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	100
14.	Persentase lokasi PKL yang tertata	Persen	76,17
15.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	Persen	79,55
16.	Persentase Pasar yang diawasi	Persen	88,98
17.	Tingkat terlindunginya konsumen	Persen	88,98

## 5. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Surakarta yang cenderung stabil dari sebesar 8,62% pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,45% pada tahun 2021.

Jumlah Industri besar sebesar 52 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2021 sebanyak 7409 unit. Capaian indikator urusan perindustrian bisa

dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 43 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	66,71
2.	Persentase IKM masuk dalam SIIKa	Persen	24
3.	Jumlah industri besar	unit	52
4.	Jumlah industri menengah dan kecil	unit	7409
5.	Persentase industri kecil dan menengah	Persen	99,3
6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	8,45
7.	Persentase klaster industri yang berkembang	Persen	10

## 6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator jumlah transmigran yang di berangkatkan. Pada tahun 2021 jumlah transmigran yang di berangkatkan sebesar 1 KK, hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pencapaian kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 44 Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1	Persentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	Persen	50
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	1
3	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	50

### 2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas

sebagai berikut:

- a. Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melalui penataankelembagaan pada sebanyak 35 Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- b. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat;
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): pada tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Surakarta menghasilkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,88%.

Untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya. Nilai SAKIP terus mengalami kenaikan sebesar 69 di tahun 2021. Dalam kinerja pencapaian SDG's seluruh indikator Tujuan ke-16 dalam menciptakan lembaga yang kokoh menunjukkan kinerja yang baik, indikator penggunaan e-procurement dalam belanja pemerintah telah dilakukan sejak tahun 2015.

Persentase instansi pemerintahan yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik (Tujuan 16) pada tahun 2021 sebesar 68,9%

dengan kategori "B". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik melalui perbaikan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Surakarta melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta, terutama melalui:

- a. Pelayanan perizinan terpadu dan semakin ditingkatkan;
- b. Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2011;
- c. Pelayanan KTP elektronik mulai tahun 2011;
- d. Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua Perangkat Daerah;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kota Surakarta sudah dimulai sejak 2010.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan sekretariat daerah di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 45 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indeks reformasi birokrasi	nilai	68,9
2.	Maturitas Kelembagaan	Level	41,8
3.	Persentase kerjasama yang diimplementasikan dari MoU yang ada	Persen	36,7
4.	Persentase Maturitas PD dengan level 3	Persen	100
5.	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan/operasional pimpinan dan kesekretariatan daerah	Persen	100
6.	Rata-rata capaian kinerja IKK LPPD urusan pemerintah daerah	Persen	81,25
7.	Persentase peningkatan partisipasi lembaga dalam bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100
8.	Persentase kinerja pemerintah daerah dalam bidang hukum	Persen	100
9.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	Persen	66,6
10.	Manajemen Risiko Indeks	Level	3
11.	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	Dokumen	7
12.	Rata-rata nilai SKM	nilai	85,55
13.	Hasil evaluasi AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) :	Persen	69
14.	Nilai LPPD dan EKPPD	nilai	3,4

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
15.	Hasil Evaluasi LKJIP	nilai	69
16.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima Pemda Kota Surakarta	buah	2
17.	Keberadaan E-procurement	unit	1
18.	Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005	unit	1
19.	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%)	Persen	100
20.	Penataan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	Organisasi Perangkat Daerah	35
21.	deks Kepuasan Layanan Masyarakat (Diukur dari rata-rata nilai UKM di Kecamatan Kota Surakarta)	nilai	B
22.	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	unit	6
23.	PERDA yang ditetapkan	Dokumen	9
24.	Peraturan Walikota yang ditetapkan	Dokumen	61
25.	Keputusan Walikota yang ditetapkan	Dokumen	156
26.	Persentase Kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi	Persen	87,11
27.	Persentasi produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda	Persen	45
28.	Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian	Persen	67
29.	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan (Tujuan 16)	Persen	30,44
30.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Tujuan 16)	Persen	83,88
31.	Persentase instansi pemerintahan yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik (Tujuan 16)	Persen	68,9
32.	Nilai SAKIP (Tujuan 16)	Persen	69

Kinerja penunjang kewilayahan yang dilakukan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta telah memenuhi standar ISO 9001:2008.

**Tabel 2. 46 Capaian Indikator Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Nama Unit
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	84,06	Kecamatan Banjarsari
2.	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	Target RPJMD 2022	Kecamatan Jebres

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Nama Unit
3.	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	Target RPJMD 2022	Kecamatan Jebres
4.	Persentase tingkat kelurahan berkembang	Persen	Target RPJMD 2022	Kecamatan Jebres
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	87,46	Kecamatan Jebres
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	85,91	Kecamatan Laweyan
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	84,96	Kecamatan Pasarkliwon
8.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	84,56	Kecamatan Serengan
9.	Persentase pelayanan kecamatan B yang memenuhi standar ISO 9001:2008	Persen	100	Kecamatan Banjarsari
10.	Persentase pelayanan kecamatan L yang memenuhi standar ISO 9001:2008	Persen	100	Kecamatan Laweyan
11.	Persentase pelayanan kecamatan S yang memenuhi standar ISO 9001:2008	Persen	100	Kecamatan Serengan
12.	Persentase pelayanan kecamatan J yang memenuhi standar ISO 9001:2008	Persen	100	Kecamatan Jebres
13.	Persentase pelayanan kecamatan P yang memenuhi standar ISO 9001:2008	Persen	100	Kecamatan Pasarkliwon

## 2. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD terutama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Pada Tahun 2021 dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut sudah berjalan dengan baik. Informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan melalui teknologi informasi terlaksana baik. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti sampai tahun 2021 sudah mencapai 100%, hal tersebut juga berdampak meningkatnya IKM pelayanan sekretariat DPRD pada tahun 2021 sebanyak 83%. Indikator pembangun dalam mewujudkan SDG's tujuan ke-16 guna menciptakan kelembagaan yang kokoh yaitu keterwakilan perempuan di dewan telah mencapai 30% sesuai dengan amanat undang-undang sehingga kesetaraan gender kelembagaan dewan telah terlaksana dengan baik.

**Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	Persen	15
2.	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	Persen	32
3.	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	Persen	87,13
4.	Persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku	Persen	100
5.	Raperda yang disetujui DPRD	Persen	100
6.	keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100
7.	keputusan Pimpinan DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100
8.	IKM Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	0
9.	Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota	nilai	puas
10.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Tujuan 16)	Persen	0

### 3. Perencanaan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program - program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan

pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik OPD, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Implementasi dan kinerja perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Selain itu sinergitas dokumen perencanaan di tingkat kota dengan dokumen perencanaan di setiap perangkat daerah juga sudah semakin baik. Tingkat sinkronisasi penjabaran program dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) semakin baik.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah Kota Surakarta menggunakan e-planning. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP. Capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kota Surakarta Tahun 2021 bisa dilihat di bawah ini:

**Tabel 2. 48 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indek Williamson	nilai	0,35
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	82,62
3.	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) (%)	Persen	0
4.	Angka Kemiskinan (%)	Persen	9,4
5.	Persentase Keselarasan Program dalam Renja dengan Renstra	Persen	0
6.	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	-	0
7.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100
8.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100
9.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100
10.	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	Persen	85
11.	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan	Persen	80
12.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	0
13.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	buah	1
14.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	buah	1
15.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	buah	1

#### 4. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Kenaikan PAD Kota Surakarta fluktuatif, pada tahun 2021 presentase kenaikan PAD sebesar 7%. Berkaitan dengan belanja daerah, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja tergolong tinggi, rata-rata sebesar 85,28% pada tahun 2021. Rasio SILPA terhadap total pendapatan pada tahun 2021 sebesar 13,34%.

Pengelolaan keuangan Kota Surakarta juga menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Kondisi tersebut juga mendukung pencapaian indikator tujuan ke-16 SDG's dalam mewujudkan kelembagaan yang kokoh melalui penciptaan transparansi pencatatan keuangan.

Dalam penyusunan APBD, pemerintah Kota Surakarta menggunakan e-budgetting sejak tahun 2015 menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, dan mulai tahun 2019 Kota Surakarta menggunakan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi e- planning, e-budgeting dan e-SAKIP. Proses perencanaan hingga penganggaran juga sudah menggunakan e-ASB (Analisis Standar Belanja) yang terintegrasi melalui Aplikasi Simda Integrated.

Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah Kota Surakarta menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan secara online. Informasi mengenai APBD Kota Surakarta dan laporan APBD secara online tersedia melalui aplikasi INAB Surakarta yang dapat diakses melalui handphone berbasis android dan website <https://bppkad.surakarta.go.id>.

Gambaran capaian indikator Fungsi Penunjang pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 49 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	nilai	B
2.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP
3.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	28,79
4.	Persentase Kenaikan PAD	Persen	7
5.	Persentase Aset Yang Teregistrasi	Persen	100
6.	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	Persen	100
7.	Persentase kenaikan PAD	Persen	7
8.	Terjaminnya aset barang milik daerah	Persen	5
9.	Belanja langsung terhadap total APBD	Persen	57,57
10.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	Persen	28,72
11.	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Persen	13,34
12.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Persen	85,28
13.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	Persen	108,32
14.	Peningkatan PAD	Persen	7

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
15.	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncana	Persen	96,39
16.	OPINI BPK terhadap lap keuangan daerah (Tujuan 16)	kategori	WTP

#### 5. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta maka aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan “merrit system” semakin penting. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya melaksanakan upaya peningkatan kompetensi ASN. Salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan ASN yang dilaksanakan di Kota Surakarta antara lain: 1) Diklat Prajabatan; 2) Diklatipim; 3) Diklat Fungsional; dan 4) Diklat Teknis. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya melakukan penataan aparatur dengan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan, namun belum dapat terlaksana sepenuhnya, masih terdapat pegawai yang kompetensinya belum sesuai dengan kompetensi jabatan. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 50 Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	Persen	85
2.	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	Persen	1,66

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
3.	Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persen	97
4.	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	Persen	85
5.	Persentase pemenuhan formasi CASN	Persen	74,66
6.	Jumlah persentase pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	kegiatan	85
7.	Rasio PNS terhadap penduduk	rasio	1
8.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya	Persen	85
9.	Persentase aparatur dengan capaian kinerja diatas 90	Persen	88,64
10.	Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin	Persen	0,27
11.	Persentase aparatur yang lulus diklat	Persen	97
12.	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,31
13.	Persentase Tingkat akurasi dan validitas data informasi kepegawaian	Persen	80
14.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (jabatan) (Tujuan 16)	Persen	3279

## 6. Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah daerah. Melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah Kota Surakarta sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (policy), perlu melakukan kegiatan penelitian dan kajian.

Pada tahun 2021, capaian persentase penerapan inovasi di Kota Surakarta sebesar 24%. Permasalahan terkait urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu belum optimalnya inovasi dan kelitbangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, belum optimalnya penyediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah; belum optimalnya pelaksanaan inovasi pada level masyarakat sehingga minat dan antusias krenova rendah, dan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi Dewan Riset Daerah.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 51 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indeks Inovasi Daerah	nilai	4998
2.	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	-	0
3.	Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	Persen	44,4
4.	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	Persen	100
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	Persen	43,75
6.	Persentase Penerapan inovasi	Persen	24
	a. RPJMD	Persen	80
	b. RKPD	Persen	0

## 7. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima,

demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua obyek pemeriksaan di seluruh perangkat daerah Kota Surakarta. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pemeriksaan perangkat daerah adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan.

Secara umum penyelenggaraan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dicapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap

tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain raihan opini BPK yang diperoleh pada kategori WTP, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal adalah tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengendalian internal, tahun 2019 SPIP Pemerintah Kota Surakarta telah mencapai nilai 3,125. Dengan nilai tersebut artinya pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta termasuk dalam level 3 (terdefinisi), artinya adalah Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut juga memberikan gambaran keberhasilan pemerintah didalam mewujudkan tujuan SDG's ke-16 yaitu menciptakan kelembagaan yang kokoh. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Dalam rangka mendukung smart city, Kota Surakarta sudah mengembangkan mekanisme pengawasan pemerintah berbasis masyarakat dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, supaya masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan. Sistem yang sedang dikembangkan kualitas pemanfaatannya yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang pengawasan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 52 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Indeks Persepsi Korupsi	nilai	84,52
2.	Nilai MCP Korsupgah KPK	nilai	83
3.	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	Persen	100

4.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	nilai	Tahun 2021 belum dilaksanakan, karena merupakan target RPJMD tahun 2022-2026
5.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	kategori	WTP
6.	Rasio temuan BPK RI yang di tindak lanjuti	Persen	96,44%
7.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Laporan	147
8.	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	Laporan	147
9.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Persen	100
10.	Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	kasus	12
11.	Tingkat maturitas SPIP (Tujuan 16)	skor	3,12

*Keterangan: \*) Tahun 2010-2014 proses membangun 5 unsur dalam SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan/ monev)*

#### 8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kesbangpol Kota Surakarta mempunyai peranan untuk terwujudnya kondusivitas kota yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, budaya, dan cinta tanah air. Peranan tersebut dijabarkan melalui misi mewujudkan iklim kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan damai. Selain itu meningkatkan toleransi umat beragama dan meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

Kantor Kesbangpol juga memiliki misi meningkatkan nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan rasa cinta tanah air, serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Pelaksanaannya ditunjang dengan berbagai program antara lain program peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta lainnya. Penyuluhan dan seminar juga menjadi program penting guna menyuarakan semangat pembangunan, demokrasi dan cinta tanah air. Berikut capaian kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik selengkapny.

**Tabel 2. 53 Capaian Indikator pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1.	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	90
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	kebijakan	2
3.	Tingkat partisipasi perempuan di parlemen	Persen	26
4.	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	kebijakan	3
5.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	90
6.	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	3
7.	Persentase Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan yang Terlaksana	Persen	100
8.	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan halaqoh dan keagamaan	Persen	100
9.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	Persen	85
10.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan halaqoh dan keagamaan	Persen	100
11.	Cakupan penyuluhan P4GN pada siswa sekolah SLTP dan SLTA di Kota Surakarta	Persen	90
12.	Persentase fasilitasi kerukunan umat beragama	Persen	100

## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

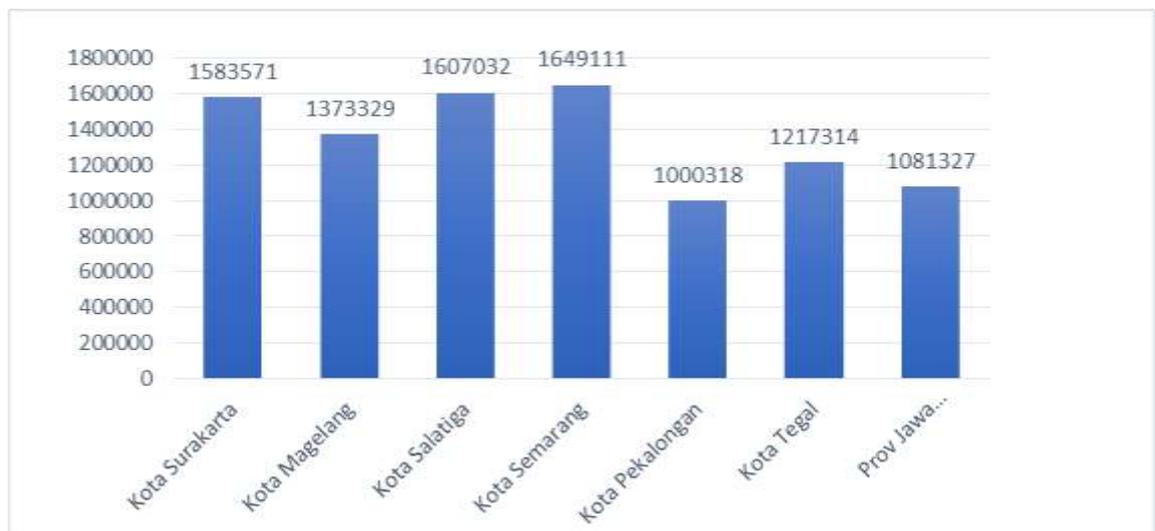
### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor - faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma - cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata - rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2019 mencapai Rp 1.583.571,-. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di antara kota-kota lain di Jawa Tengah. Posisi Kota Surakarta masih di bawah Kota Semarang dan Salatiga. Capaian kota Surakarta juga berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2019

**Gambar 2. 37 Rata - rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota - Kota Lain dan Rata - rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Rupiah/Bulan)**

## 2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

### 2.4.2.1 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal (Total Crime) yang terjadi di Kota Surakarta selama 5 tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2016 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 1.485, dan tahun 2020 turun menjadi sebanyak 743 kasus. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus kriminal mengalami tren fluktuatif dari 68% pada tahun 2016 menjadi 74,83% di tahun 2020.

**Tabel 2. 54 Statistik Tindak kejahatan di Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

No	Jenis Kejahatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang terjadi	Kasus	1.485	1.170	914	758	743
2	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	1.013	959	775	542	556
3	Persentase kasus terselesaikan	%	68	82	85	71,5	74,83

### 2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta saat ini sudah memberikan pelayanan perijinan secara on-line, dengan alamat situsnya adalah <http://perijinanonline.surakarta.go.id>. Saat ini DPMPTSP melayani pengurusan 54 macam perijinan secara online.

Selain melalui online, DPMPTSP juga menyediakan pelayanan offline melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi sejak tahun 2020. MPP merupakan salah satu fasilitas dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan terpadu dalam satu pintu. Terdapat 377 jenis pelayanan di MPP yaitu 184 pelayanan dari OPD Pemkot Surakarta, 177 layanan dari instansi vertikal, 11 layanan dari BUMN dan 4 layanan dari swasta. OPD yang membuka pelayanan di MPP yaitu, Bapenda, BPKAD, Dispendukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Sedangkan instansi diluar Pemkot Surakarta yang membuka layanan di MPP diantaranya Bank Jateng, PDAM, PLN, BRI, KPP Pratama, Samsat, Bursa Efek Indonesia, dan lain-lain.

## 2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

### 2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

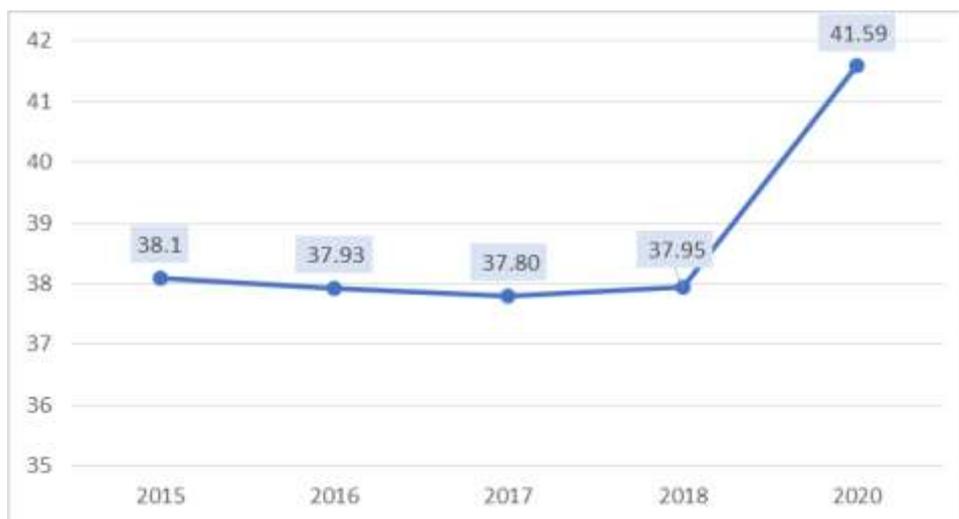
**Tabel 2. 55 Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Usia 17 Tahun ke atas Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>S1</b>	47.967	47.094	48.790	50.382	50.338
<b>S2</b>	4.592	4.476	4.671	4.907	4.829
<b>S3</b>	207	212	224	242	234
<b>Jumlah</b>	52.766	51.782	53.685	55.531	55.401
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>515.025</b>	<b>506.076</b>	<b>514.461</b>	<b>519.855</b>	<b>518.080</b>
<b>Rasio</b>	10,2%	10,2%	10,4%	10,7%	10,69

Dari tabel di atas, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas lulusan S1 di Kota Surakarta angkanya fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020, namun trennya meningkat. Demikian juga dengan jumlah lulusan S2 dan S3, yang trennya juga mengalami peningkatan.

### 2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fluktuatif cenderung menurun. Dari 38,1 pada tahun 2015 menjadi 37,8 di tahun 2017. Kemudian naik signifikan menjadi 41,59 di tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Surakarta menanggung 41 - 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41). Rasio ketergantungan tinggi akan berdampak pada beban tanggungan penduduk produktif tinggi, sehingga berisiko pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan risiko kerentanan kemiskinan.



Sumber: BPS, Kota Surakarta Tahun 2015 - 2020 (diolah)

**Gambar 2. 38 Angka Ketergantungan Kota Surakarta Tahun 2015 - 2020**

#### 2.4.4 Fokus Fasilitas

##### 2.4.4.1 Sarana Perdagangan

Sarana perekonomian yang ada di Kota Surakarta terdiri dari pasar tradisional, supermarket/ swalayan, toko/ kios/ warung dan lainnya (warung dan rumah makan). Toko/ kios/ warung adalah sarana perekonomian yang paling banyak ditemukan pada kota ini. Adapun jumlah pasar tradisional di Kota Surakarta sebanyak 44 unit yang menyebar di masing masing kecamatan.

Perbandingan jumlah sarana perekonomian per kecamatan sebagai gambaran adanya pusat kegiatan masyarakat. Kecamatan Serengan, Jebres, dan Banjarsari merupakan kecamatan yang memiliki sarana perekonomian lebih banyak dibanding kecamatan yang lainnya di Kota Surakarta. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian yang berkaitan dengan pariwisata, seperti Kraton Surakarta, Pasar Klewer, Beteng Trade center, Pusat grosir Solo, juga pusat kegiatan lainnya.

**Tabel 2. 56 Banyaknya Sarana Perdagangan di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

No	Jenis Sarana Perdagangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar	44	44	44	44	44
2	Toko	84	84	84	88	87
3	Kios	18.656	19.051	19.607	19.392	15.170
Jumlah		18.784	19.179	19.735	19.524	18.902

Sumber : BPS Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2022

#### **2.4.4.2 Sarana Olahraga dan Kesenian**

Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sejak tahun 2008 adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga sebanyak 50 buah, pembangunan 1 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan 120 Lapangan olahraga yang letaknya tersebar. Pembinaan olahraga dibagi menjadi dua yaitu olahraga prestasi dan olahraga massal atau masyarakat. Olahraga prestasi di Kota Surakarta cukup banyak mulai dari atletik, beladiri, bulu tangkis, bola volley, bola basket, catur dan Sepakbola. Keberadaan klub-klub olahraga dan ditunjang sarana dan prasarana olahraga yang memadai khususnya untuk olahraga prestasi.

Fasilitasi kesenian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan mempertahankan Kota Surakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Berbagai bentuk kesenian tradisi Jawa termasuk di dalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini, terlebih kesenian tradisi yang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Surakarta.

Beberapa seni pertunjukan tradisi Jawa di Kota Surakarta yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu wayang kulit, wayang orang, kethoprak, dhagelan, tari dan karawitan. Tradisi tersebut hingga kini masih hidup subur di Kota Surakarta, bahkan hampir setiap sekolah ataupun hotel memiliki seperangkat gamelan untuk menyambut kedatangan tamu atau hanya sekedar belajar sehari-hari. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Surakarta sejak tahun 2010 sudah memiliki 4 sarana berupa gelanggang seni dan budaya

### **2.5 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2021-2026**

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kota Surakarta dalam RPJMD, maka digunakan 2 jenis interpretasi. Pertama, menggunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan range capaian, sebagai berikut.

**Tabel 2. 57 Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 tahun 2017

Kedua, menggunakan kriteria perbandingan antara target dan realisasi, menggunakan 3 (tiga) kriteria status capaian kinerja, yaitu: (i) melampaui, (ii) sesuai target; (iii) di bawah target.

**Tabel 2. 58 Kriteria Status Pencapaian Kinerja Menurut Target RPJMD**

Status Evaluasi Kinerja	Simbol	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
Melampaui (M)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar > 100%
Tercapai (T)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar = 100%
Belum Tercapai (TT)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar < 100%

Sumber: Analisis Bappeda, 2021

Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kota Surakarta berdasar data 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2. 59 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD berdasar Urusan Pemerintah Daerah**

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
	Laju inflasi (%)	2,26	2,58	85,84%	Tinggi	
	PDRB per kapita berlaku (Juta Rp.)	93.736.221	96.360.000	102,80%	Sangat Tinggi	
	Angka Kemiskinan (indikator dari BPS)	8,62	9,40	90,95%	Sangat tinggi	
<b>2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Rakyat</b>					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,66	82,62	99,95%	Sangat Tinggi	
	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	16.697.250	14.911.000	89,3%	Tinggi	
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,37	14,88	96,81%	Sangat Tinggi	
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,83	10,90	100,65%	Sangat Tinggi	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	77,26	77,32	100,08%	Sangat Tinggi	
	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
	PAUD (3-6 tahun)	50,96	63,70	165,91	Sangat Tinggi	
	SD/MI	100	100	100%	Sangat Tinggi	
	SLTP/MTs	106,77	106,77	100%	Sangat Tinggi	
	<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
	SD/MI	99,50	99,50	100%	Sangat Tinggi	
	SLTP/MTs	99,73	99,73	100%	Sangat Tinggi	
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>1</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>					
	<b>Pendidikan</b>					
	APK 3-6 tahun	80	50,96	63,70	sedang	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	106,77	106,77	Sangat Tinggi	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	93,42	94,08	100,71	Sangat Tinggi	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,50	99,73	100,23	Sangat Tinggi	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83,40	83,53	100,16	Sangat Tinggi	
	Angka Lulusan (AL) SD/MI	100	100	100	Sangat tinggi	
	Angka Lulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah prestasi pendidikan (PAUD, DIKDAS, DIKMAS)	60	457	761,67	Sangat Tinggi	
	Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal (PNF)	3,87	2,32	59,95	rendah	
	APtS SD (Persentase murid putus sekolah)	0,01	0,00	160	Sangat Tinggi	
	AL SD (Persentase murid lulus sekolah)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	AU SD (Persentase murid mengulang sekolah)	0,29	0,00	199,41	Sangat Tinggi	
	APtS SMP (Persentase murid putus sekolah)	0,20	0,00	200	Sangat Tinggi	
	AL SMP (Persentase murid lulus sekolah)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	AU SMP (Persentase murid mengulang sekolah)	0,15	0,00	200	Sngat Tinggi	
	Tercapainya kualitas kelembagaan pada Pendidikan Anak Usia Dini	100	53,72	53,72	rendah	
	Tercapainya kualitas kelembagaan pada satuan pendidikan pendidikan nonformal/kesetaraan	100	64,70	64,70	rendah	
	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan penyusunan kurikulum muatan lokal	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase guru yang menyediakan di satuan pendidikan	85,59	83,4	97,44	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	4	100	Sangat Tinggi	
	<b>Kesehatan</b>					
	Angka kematian bayi	2,19	1,14	147,95	Sangat Tinggi	
	Angka Kematian Balita (AKBA)	3,03	1,96	135,31	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pelayanan kesehatan remaja, usia produktif dan lanjut usia	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1,38	1,38	100	Sangat Tinggi	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	3,40	1,55	154,41	Sangat Tinggi	
	Angka kesakitan DBD	43	7,12	183,44	Sangat Tinggi	
	Angka penemuan Case Notification Rate (CNR)	292,10	199,33	68,24	Sangat rendah	
	Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa	0,01	0,02	200	Sangat Tinggi	
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi kasus penyakit tidak menular (PTM)	20	23	85	Sangat Tinggi	
	Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	30	30,24	100,80	Sangat Tinggi	
	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	97,18	95,08	97,84	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Angka kematian ibu	41,83	51,60	76,64	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan puskesmas	340	340	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan puskesmas pembantu	47	49,02	104,30	Sangat Tinggi	
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,20	0,23	115	Sangat Tinggi	
	Rasio Rumah Sakit (RS) per satuan penduduk	0,26	0,33	126,92	Sangat Tinggi	
	Persentase Rumah Sakit (RS) yang terbangun	40	40	100	Sangat Tinggi	
	Persentase obat yang memenuhi syarat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan	20	28,56	57,20	Sangat Tinggi	
	Proporsi kasus DM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	14,73	126,35	Sangat Tinggi	
	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	13	2,41	181,46	Sangat Tinggi	
	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Angka kesakitan malaria	0	0 (Tidak ada kasus)	100	Sangat Tinggi	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Success Rate)	97,01	88,20	90,92	Sangat Tinggi	
	Angka penemuan kasus baru HIV	0,36	0,40	111,11	Sangat Tinggi	
	Angka penemuan kasus baru AIDS	0,45	0,25	144,44	Sangat Tinggi	
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV anjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral	93	100	107,53	Sangat Tinggi	
	Angka penemuan kasus baru kusta	1,07	1,04	102,80	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Angka penemuan kasus diare balita	100	17,31	17,31	Sangat Tinggi	
	Persentase diare KLB dapat ditangani < 24 Jam	100	100 (Tidak ada kasus)	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	60	100	166,67	Sangat Tinggi	
	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98	96,27	98,23	Sangat Tinggi	
	Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun	2	2,41	120,50	Sangat Tinggi	
	Cakupan warga peduli AIDS (WPA)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase diare KLB dapat ditangani < 24 Jam	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pelayanan kesehatan anak, remaja dan lanjut usia	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Prevalensi bumil KEK	2,52	3,61	56,75	Sangat Tinggi	
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1,38	1,38	100	Sangat Tinggi	
	Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	2,56	2,20	114,06	Sangat Tinggi	
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	80	82,96	103,70	Sangat Tinggi	
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100 (Tidak ada kasus)	100	Sangat Tinggi	
	Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita	0,01	0	200	Sangat Tinggi	
	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	40	93,02	232,55	Sangat Tinggi	
	Proporsi Tempat-Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat	98	98,63	100,64	Sangat Tinggi	
	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Inspeksi Pangan di Pendidikan Dasar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase rumah sehat	85	85,43	100,51	Sangat Tinggi	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani.	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan kunjungan bayi	98	100	102,04	Sangat Tinggi	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	50	99,98	199,96	Sangat Tinggi	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan pelayanan nifas	95	99,98	105,24	Sangat Tinggi	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan	23,20	21,35	92,03	Sangat Tinggi	
	Proporsi puskesmas terakreditasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi RS terakreditasi	93	84,21	90,55	Sangat Tinggi	
	Proporsi puskesmas yang menerapkan pola tata kelola BLUD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	25	9,78	160,88	Sangat Tinggi	
	Angka penemuan kasus pneumonia balita	73	61,34	84,03	Tinggi	
	Persentase sarana pelayanan kesehatan secara terintegrasi	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi RS PONEK	38	40	105,26	Sangat Tinggi	
	Proporsi puskesmas PONEK sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Fasyankes milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	19	19	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pendayagunaan SDMK Kota Surakarta,	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	380	507	133,42	Sangat Tinggi	
	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	17	17	100	Sangat Tinggi	
	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000)	2,42	3,76	155,37	Sangat Tinggi	
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000)	2,86	4,05	141,61	Sangat Tinggi	
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90	93,09	103,43	Sangat Tinggi	
	Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	96	97,57	101,64	Sangat Tinggi	
	Proporsi TPM memenuhi syarat	95	98,21	103,38	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Proporsi Sarana Produksi dan Distribusi di Bidang Farmasi dan Perbekes Sesuai Standar	95	100	105,26	Sangat Tinggi	
	Proporsi TPM memenuhi syarat	95	98,21	103,38	Sangat Tinggi	
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80	99,05	123,81	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan HIV dan TB yang difasilitasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80	99,05	123,81	Sangat Tinggi	
	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	54	54	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	80	95,96	119,95	Sangat Tinggi	
	Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	5	32	640	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan penanggulangan HIV dan TB yang difasilitasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>					
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota	96,30	96,40	100,10	Sangat Tinggi	
	Persentase luasan wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani	96,30	96,40	100,10	Sangat Tinggi	
	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	100	94,57	94,57	Sangat Tinggi	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang terbangun	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR untuk Air Bersih/Air Minum	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase rumah tangga bersanitasi	100	97,20	97,20	Sangat Tinggi	
	Jumlah Rumah yang tersambung SPALD-T	1.500	1.546	103,07	Sangat Tinggi	
	Pembangunan IPAL Komunal	6	6	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik	81,30	82,26	101,18	Sangat Tinggi	
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	100	77,38	77,38	Tinggi	
	Panjang drainase dalam kondisi baik	455.199,74	460.571,10	101,18	Sangat Tinggi	
	Pemeliharaan dan peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Rasio Kepatuhan IMB	36	36,04	100,11	Sangat Tinggi	
	Prosentase kajian kesejarahan di kawasan cagar budaya	100	75	75	sedang	
	Jumlah bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF	694	480	69,16	sedang	
	Persentase kajian bangunan cagar budaya	100	75	75	sedang	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	9	9	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penataan Kawasan yang sesuai dengan RTBL	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90,05	88,64	98,43	Sangat Tinggi	
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	91	92,96	102,15	Sangat Tinggi	
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	100	83,62	83,62	Tinggi	
	Persentase Panjang jalan terehabilitasi	2,24	2,60	116,07	Sangat Tinggi	
	Persentase Jembatan terehabilitasi	2,55	1,28	50,20	Rendah	
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	6	6	100	Sangat Tinggi	
	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	16,67	15	89,98	Tinggi	
	Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	20	18	90	Tinggi	
	Persentase Ketersediaan data jasa konstruksi dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate	100	0	0		
	Rasio proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Laporan kegiatan koordinasi dan Perencanaan Tata ruang daerah	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai peraturan berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1	1	100	Sangat Tinggi	
	<b>Perumahan Rakyat &amp; Kawasan Permukiman</b>					
	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan DAMKAR	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase korban bencana atau relokasi yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program yang	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	dibangun sesuai dengan rencana aksi					
	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	125	125	100	Sangat Tinggi	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kebakaran	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Tersedianya Alat Rescue	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah izin pembangunan perumahan yang diterbitkan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	8,68	9,01	103,80	Sangat Tinggi	
	Persentase Capaian Kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen RP3KP yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai peraturan berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh dibawah < 10 ha	88,35	88,42	99,92	Sangat Tinggi	
	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani keseluruhan	3	5	166,67	Sangat Tinggi	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,52	94,17	106,38	Sangat Tinggi	
	Jumlah rumah layak huni yang ditangani	687	1.744	253,86	Sangat Tinggi	
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	97,39	97,45	100,06	Sangat Tinggi	
	Luas permukiman yang terfasilitasi PSU	4.555,20	4.553,05	99,95	Sangat Tinggi	
	<b>Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>					
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	88,80	91,50	103,04	Sangat Tinggi	
	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96	100	104,17	Sangat Tinggi	
	Persentase petugas linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	20	2,60	13	Sangat rendah	
	Persentase pasar rakyat yang memiliki sarana dan prasarana keamanan yang memadai	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase terlaksananya upacara hari besar dan keagamaan tingkat daerah dan nasional	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Operasional pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase event yang dilakukan pengamanan oleh satpol PP dalam keadaan aman	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3	5	166,67	Sangat Tinggi	
	Persentase anggota masyarakat yang menjadi kader pembinaan ketentraman dan ketertiban tiap kelurahan	16,67	16	95,98	Sangat Tinggi	
	Cakupan pembinaan cukai ilegal di 54 kelurahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	21,50	14,50	67,44	sedang	
	Jumlah linmas per 1000 penduduk	1,45	1,42	97,93	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kemampuan/kapasitas petugas Linmas	9	9	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pasar yang terjaga keamanan dan ketertibannya	31	31	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta bintek keamanan pasar	50	50	100	Sangat Tinggi	
	Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan sesuai SOP	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan yang terlaksana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional / Daerah Tingkat Kota	7	7	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah linmas terpenuhi kebutuhan operasionalnya	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	150	145	96,67	Sangat Tinggi	
	Terpenuhinya Upah Linmas	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah linmas terpenuhi kebutuhan operasionalnya	8	8	100	Sangat Tinggi	
	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas	60	60	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	88,80	91,50	103,04	Sangat Tinggi	
	Terpenuhinya operasional linmas rutin	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	96	96	Sangat Tinggi	
	Persentase lembaga bencana yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pelayanan Pelatihan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat Keberhasilan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah gedung pemerintah dan swasta yang telah diinspeksi	60	60	100	Sangat Tinggi	
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (satlaker dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	75	75	100	Sangat Tinggi	
	<b>Sosial</b>					
	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah (Karang taruna, WKSBM, Forum CSR, dan LKS/orsos lain) yang diberdayakan	60	51	85	Tinggi	
	Jumlah LKKS, Karang Taruna, PSM, Tagana, WKRSBM yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	3	4	133,33	Sangat Tinggi	
	Persentase kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS di Luar Panti	50	50	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPKS di luar Panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPKS Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	100	32	32	Sangat rendah	
	Persentase fakir miskin mendapatkan program pemberdayaan	40	40	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan psikososial pasca kebencanaan di trauma centre	100	122	122	Sangat Tinggi	
	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman	70	70	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Makam Pahlawan					
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan	12	12	100	Sangat Tinggi	
	<b>Tenaga Kerja</b>					
	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	97,20	97,20	Sangat Tinggi	
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (PMDN 86/2017)	100	97,20	97,20	Sangat Tinggi	
	Persentase Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	100	97,50	97,50	Sangat Tinggi	
	Persentase Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri	100	97,50	97,50	Sangat Tinggi	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/ PKB	100	82,80	82,80	Sangat Tinggi	
	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100	85,90	85,90	Sangat Tinggi	
	Persentase kasus sengketa pengusaha yang terselesaikan (PMDN 18/2020)	100	98,90	98,90	Sangat Tinggi	
	<b>Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>					
	Rasio ARG Terhadap APBD	1,50	1,50	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan di kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase regulasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelembagaan PUG dan PUHA aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Score capaian KLA	900	900	100	Sangat Tinggi	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase regulasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Score capaian KLA	900	900	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelembagaan PUG dan PUHA aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah fasilitasi untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah fasilitasi Forum Anak Kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Rasio KDRT	0	0	100	Sangat Tinggi	
	Persentase terfasilitasinya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan di kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase perempuan yang meningkat keterampilannya dalam memperkuat ekonomi keluarga	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Capacity Building GSI	60	60	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelembagaan PUG dan PUHA aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Rasio KDRT	0,03	0,03	100	Sangat Tinggi	
	Rasio kekerasan terhadap anak	0,03	0,03	100	Sangat Tinggi	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	Sangat Tinggi	
	terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi terkait perlindungan perempuan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan sosialisasi kadarkum, KDRT, Pola asuh anak, Penyuluhan rumah sehat, dan kesehatan jiwa masyarakat	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan kebutuhan koordinasi Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase perempuan yang meningkat keterampilannya dalam memperkuat ekonomi keluarga	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelembagaan PUG dan PUHA aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase keluarga yang yang tergabung dalam kelompok kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	20	20	100	Sangat Tinggi	
	Persentase perempuan yang meningkat keterampilannya dalam memperkuat ekonomi keluarga	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Pemenuhan Data SIGA OPD	50	50	100	Sangat Tinggi	
	Persentase forum anak kecamatan / kelurahan aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Dokumen Profil Anak	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Score capaian KLA	100	100	100	Sangat Tinggi	
	koordinasi forum anak dan gender	3	3	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Tersedianya dokumen Profil anak	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Rasio kekerasan terhadap anak	0,03	0,03	100	Sangat Tinggi	
	Layanan prima terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	90	80	88,89	Sangat Tinggi	
	<b>Pangan</b>					
	Skor PPH	86	92,80	107,91	Sangat Tinggi	
	Persentase kebijakan bidang ketahanan pangan yang dievaluasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersedianya dokumen neraca dan harga pangan	13	13	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah KRPL yang dibina	27	27	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Monitoring stok ketersediaan pangan	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah informasi harga pokok pangan di pasar	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pemantauan posko lebaran dan natal	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah koordinasi TPID	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	16,50	16,50	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta pelatihan olahan pangan non beras non terigu	240	240	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pangan Aman	85,90	99,25	115,54	Sangat Tinggi	
	Jumlah pengawasan/pembinaan/pemeriksaan sayur/buah segar	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah alat Uji pangan segar yang tersedia	5	5	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pertanahan</b>					
	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	80	85,71	107,14	Sangat Tinggi	
	Jumlah kasus penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan	14	12	85,71	Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatannya	100	100	100	Sangat Tinggi	
	<b>Lingkungan Hidup</b>					
	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen kajian lingkungan yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan pemantauan kualitas air sungai	66,70	55,56	83,30	Tinggi	
	Cakupan pemantauan kualitas udara	75	75	100	Sangat Tinggi	
	Persentase percontohan kampung iklim	35,19	35,19	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam	0,06	0,06	100	Sangat Tinggi	
	Persentase sungai terpantau kualitas air	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kualitas udara ambien	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase percontohan kampung iklim	35,19	35,19	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen pendukung tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam	0,06	0,06	100	Sangat Tinggi	
	Ratio pemakaman umum per satuan penduduk	299,36	299,36	100	Sangat Tinggi	
	Persentase taman kota dalam kondisi baik	82	73,38	89,49	Tinggi	
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	440,38	373,05	84,71	Tinggi	
	Persentase pengadaan sarana prasarana taman baru dan jumlah taman kantor yang dipelihara	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecamatan/kelurahan kondisi baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah unit TPU yang terkelola	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Persentase taman kota dalam kondisi baik	82,00	73,38	89,49	Tinggi	
	Jumlah taman yang dibangun dan pengadaan sarana prasarana taman baru dan jumlah taman kantor yang dipelihara	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase RTH kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah/luas taman Kantor dan Lingkungan dilakukan pemeliharaan	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	45	45,05	100,11	Sangat Tinggi	
	Persentase limbah B3 terkelola sesuai ketentuan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72,22	90,09	124,74	Sangat Tinggi	
	Persentase pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup	6,74	10,36	153,71	Sangat Tinggi	
	Persentase sekolah adiwiyata	29,79	35,69	119,81	Sangat Tinggi	
	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK	12	0	0	Sangat rendah	
	Jumlah siswa menjadi anggota Saka Kalpataru	75	13	17,33	Sangat rendah	
	Persentase sekolah Adiwiyata	29,79	35,69	119,81	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah Tokoh/lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	5	6	120	Sangat Tinggi	
	Persentase Kelurahan yang mengikuti dalam kerja bakti event kebersihan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Tokoh/lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	5	6	120	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan dalam Pelaksanaan Kerja Bhakti dalam Event kebersihan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penanganan sampah	85,50	95,54	111,74	Sangat Tinggi	
	Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana dan tenaga kebersihan yang memadai	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase terselenggaranya sosialisasi pengelolaan persampahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Bank Sampah Aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penanganan sampah	85,50	95,54	111,74	Sangat Tinggi	
	Jumlah Pasar Memenuhi sarana prasarana Kebersihan	44	44	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah sarana prasarana kebersihan	42	42	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan persampahan	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya sosialisasi bank sampah aktif	1	1	100	Sangat Tinggi	
	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
	Jumlah KTP elektronik yang di cetak	97	133,90	138,04	Sangat Tinggi	
	Jumlah Kartu Keluarga yang di cetak	99,75	125,16	125,47	Sangat Tinggi	
	Jumlah KIA yang di cetak	100	124,68	124,68	Sangat Tinggi	
	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	94	151,90	161,60	Sangat Tinggi	
	Penerbitan Akta Kelahiran	96,50	201,20	208,50	Sangat Tinggi	
	Penerbitan Akta Kematian	81	346,13	427,32	Sangat Tinggi	
	Penerbitan Akta Nikah/Kawin	80	134,35	167,94	Sangat Tinggi	
	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	100	195,40	195,40	Sangat Tinggi	
	Akta pengakuan anak, pengesahan anak	100	150	150	Sangat Tinggi	
	Persentase Ketersediaan Data Bidang Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Standar Kebutuhan	100	180	180	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Layanan Data					
	Persentase pelayananan kependudukan tingkat kelurahan dalam kondisi baik (sesuai SOP)	100	95,83	95,83	Sangat tinggi	
	Jumlah Jaringan Terkoneksi SIAK yang Terbangun Tingkat Kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Jaringan Koneksi SIAK yang Terbangun Tingkat Kelurahan	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Terkoneksi SIAK yang Terbangun Tingkat Kecamatan	79	79	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Terkoneksi SIAK yang Terbangun Tingkat Kelurahan	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat kehadiran masyarakat dalam sosialisasi	54	54	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta yang menerima diseminasi informasi kependudukan (Ketua RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kelompok Organisasi)	95	95	100	Sangat Tinggi	
	Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan PATEN	650	650	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	Peningkatan Kerjasama Desa	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase lembaga masyarakat yang mandiri sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintah Desa	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintah Desa	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase proposal RT/RW yang terverifikasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah proposal RT/RW yang terverifikasi	1.125	1.125	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	Sangat Tinggi	
	PKK Aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Posyandu aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	11	11	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbina	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah LPM di tingkat kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	9	9	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	69,80	71,07	101,82	Sangat Tinggi	
	Unmet Need	10,03	16,04	40,08	Sangat rendah	
	Persentase PUS yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja termasuk organisasi kemasyarakatan yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	7	116,67	Sangat Tinggi	
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) setiap kelurahan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota yang berperan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71	71,40	100,56	Sangat Tinggi	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,40	78,48	101,40	Sangat Tinggi	
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	76,23	77,16	101,22	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase terselenggaranya kegiatan Pokjanal Posyandu dan	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	lansia					
	Persentase KB Aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase keluarga BKB yang dilakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	71	75,62	106,51	Sangat Tinggi	
	Persentase keluarga BKR yang dilakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	63	65,89	104,59	Sangat Tinggi	
	Persentase keluarga BKL yang dilakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	58	61,32	105,72	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan pembinaan keluarga berencana yang difasilitasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya kegiatan Pokjantal Posyandu dan lansia	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya PKK aktif	12	12	100	Sangat Tinggi	
	<b>Perhubungan</b>					
	Jumlah titik lampu PJU	850	850	100	Sangat Tinggi	
	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	0,65	0,68	103,85	Sangat Tinggi	
	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah titik lampu PJU	850	850	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas	6	4,1	68,33	sedang	
	Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum	73,58	95,94	130,39	Sangat Tinggi	
	Persentase kecukupan sarana aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang	98,5	96,23	97,7	Sangat Tinggi	
	Persentase Kajian MRL	100	80	80	tinggi	
	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi	100	72,73	72,73	sedang	
	Persentase ketersediaan marka jalan	100	106,67	106,67	Sangat Tinggi	
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	100	100	Sangat Tinggi	
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	Persentase ketersediaan dokumen informasi lingkungan hidup	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi E-Governance	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen informasi lingkungan hidup	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tabloid Solo Berseri yang di cetak	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Petugas distribusi Tabloid Solo Berseri	1	1	100	Sangat Tinggi	
	jumlah majalah lokal yang memuat Iklan layanan masyarakat kota surakarta	1	1	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah media cetak luar ruang yang memuat Iklan layanan masyarakat kota surakarta	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Siaran Srawung Praja oleh RRI di relay radio swasta	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Siaran Langsung Radio Konata	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase OPD yang sudah memiliki aplikasi integrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat Pembaharuan (updating) Sistem Informasi Pemerintah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Integrasi Data Analitik 3 WMP	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah bandwidth yang tersedia	250	250	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah titik jaringan FO terintegrasi dan E-Pajak	200	200	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan penguatan, monitoring, publikasi, pemeliharaan konten smart city	6	6	100	Sangat Tinggi	
	jumlah kegiatan publikasi pembangunan kota melalui media elektronik	720	720	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pengembangan aplikasi e-governance	2	2	100	Sangat Tinggi	
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
	Fasilitasi izin KSP/USP	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Bimtek Perubahan Badan Hukum Koperasi	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	8	8	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Koperasi	30	30	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Bimtek Kepatuhan Koperasi	30	30	100	Sangat Tinggi	
	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	100	97	97	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	150	158	105,33	Sangat Tinggi	
	Terfasilitasinya pemeringkatan koperasi	20	20	100	Sangat Tinggi	
	Pemutakhiran aplikasi perkoperasian	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	50	46	92	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pelatihan SDM Koperasi	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Persentase koperasi yang diberdayakan	8	7	87,5	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Gathering Koperasi	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembuatan aplikasi Penyuluhan Berbasis Online	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Sosialisasi Pemahaman Koperasi bagi Pra Koperasi	90	90	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Sosialisasi Permenkop 12,13,14 Tahun 2015	40	40	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pemberdayaan UMKM	2	2	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Pendataan dan Monitoring	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Sosialisasi Permodalan	2	3	150	Sangat Tinggi	
	Diklat Pengembangan Kelembagaan UMKM	6	5	83,33	Sangat Tinggi	
	Persentase Peningkatan Kualitas UMKM yang dibina	5	7,5	150	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya akses Pasar	9	6	66,67	sedang	
	<b>Penanaman Modal</b>					
	Persentase peningkatan jumlah investor	1,75	0	0		
	Rata-rata capaian laba BUMD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen dan telaah kajian perusda	25	25	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kajian investasi daerah untuk perusda	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen NA	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tindak lanjut hasil pengendalian	55	55	100	Sangat Tinggi	
	Dokumen LKPM yang dihasilkan	65	65	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	100	95	95	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terlayani secara elektronik	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase updating data	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah aplikasi p engadaan barang/jasa yang terpelihara	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Dokumen 17 Standar layanan LPSE	1	-	-		
	<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>					
	Persentase Pemuda / Organisasi Pemuda Yang Berprestasi di kancah Regional/ Nasional/Internasional	42	66,67	158,74	Sangat Tinggi	
	Persentase Organisasi Kepemudaan Kecamatan Aktif	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	50	50	100	Sangat Tinggi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3	1	33,33	Sangat rendah	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan	200	260	130	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis					
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	58	58	100	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	46	46	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya organisasi dan kegiatan kepemudaan yang dibina	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	60,66	60,66	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan olahraga terlaksana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Festival dan olahraga rekreasi	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13	13	100	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	155	155	100	Sangat Tinggi	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	177	176	99,44	Sangat tinggi	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	150	150	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan olahraga terlaksana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terlaksana	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	13	13	100	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1	100	Sangat Tinggi	
	<b>Statistik</b>					
	Persentase penyajian/release data statistik yang dipublikasikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	persentase ketersediaan dokumen data sektoral yang tersusun	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Profil Data Statistik Sektoral yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Presentase data Profil yang valid	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah profil data sektoral	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah laporan monitoring,	1	0	0		

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	evaluasi dan statistik sektoral yang tersusun					
	terselenggaranya data SIGA yang terupdate	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	100	100	100	Sangat Tinggi	
	jumlah sistem data informasi yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyajian/release data statistik yang dipublikasikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyajian/release data statistik yang dipublikasikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase data kebudayaan yang dipublikasikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi data statistik Sektoral	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Tersedianya buku profil kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	100	99	99	Sangat Tinggi	
	Terpeliharanya sistem manajemen pendidikan	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pemenuhan dokumen sektoral bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Buku Profil Dinas yang Tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersedianya profil kebencanaan kota surakarta dan data kebencanaan di kota surakarta	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah profil data sektoral yang disusun	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah profil data sektoral	1	0	0		
	Sistem data informasi yang terupdate	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jenis relasi online pelayanan akta kelahiran dan tersajinya Informasi dalam web dinas untuk pelayanan secara online	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah SDM TI dan petugas registrasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas pelayanan kependudukan	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Pelayanan online administrasi kependudukan	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah publikasi informasi kependudukan pada website dinas kependudukan dan pencatatan sipil	48	48	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Sistem data informasi yang terupdate	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kajian MRL	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah dokumen buku profil DISKOMINFOSP	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah laporan Kinerja PPID	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta Rakor PPID dan PPID Pembantu	110	110	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah buku kecamatan dalam angka	5	5	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen buku surakarta dalam angka	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen buku indikator ekonomi Kota Surakarta	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen buku indeks harga konsumen dan inflasi Kota Surakarta	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Presentase ketersediaan sistem informasi data kebudayaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersedianya dokumen profil kecamatan dan pemeliharaan sistem informasi publik	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah buku profil kecamatan yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Buku Profil Kecamatan yang tersusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	100	99	99	Sangat Tinggi	
	<b>Persandian</b>					
	Persentase opd yang telah dievaluasi indeks KAMI	50	50	100	Sangat Tinggi	
	Sosialisasi/literasi keamanan informasi	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah OPD yang telah dilakukan evaluasi Indeks KAMI	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah aplikasi yang sudah dilakukan penetration test	5	5	100	Sangat Tinggi	
	<b>Kebudayaan</b>					
	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	20	290	1.450	Sangat Tinggi	
	Terwujudnya pengembangan kebudayaan di ruang lingkup kabupaten/kota	1	0	0	Sangat rendah	
	Presentase terlaksananya penyelenggaraan festival seni dan budaya	100	0	0	Sangat rendah	
	Persentase pelaku budaya yg dibina	60	73	121,67	Sangat Tinggi	
	Terwujudnya penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	0	0	Sangat rendah	
	Persentase OPK yg dikembangkan	90	90	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase lembaga kebudayaan yang dibina	70	60	85,71	Sangat Tinggi	
	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	100	5,5	5,5	Sangat rendah	
	persentase pelestarian sejarah lokal	100	5,5	5,5	Sangat rendah	
	Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	59,3	58,6	98,82	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase terfasilitasinya Pelaksanaan Event-event Budaya (Fasilitasi Forum Dialog Kebudayaan, Pawai Pembangunan, Fasilitasi Kelompok Karawitan dan Pengajian, Fasilitasi Kegiatan Budaya Kecamatan, Festival Hadrah Tingkat Kecamatan, Srawung Budaya)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Prosentase Kegiatan budaya yang terlaksana	100	80	80	sedang	
	Persentase Pengelolaan cagar kebudayaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam satu tahun	8	8	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pertumbuhan penetapan cagar budaya kota	30	33,33	111,1	Sangat Tinggi	
	Persentase Pertumbuhan Pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi Upaya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	15	13,33	88,87	tinggi	
	Pengembangan Cagar Budaya	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	4	80	tinggi	
	Jumlah Kegiatan pengelolaan cagar budaya	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	8	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	10	6,7	67	Sedang	
	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum kabupaten/kota	10102	7161	70,89	sedang	
	<b>Perpustakaan</b>					
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya profil kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Perpustakaan Yang dibina	10	3	30	Sangat rendah	
	Persentase ketersediaan bahan pustaka	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya profil kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pengunjung Perpustakaan/ taman cerdas	4	1,59	39,75	Sangat rendah	
	<b>Kearsipan</b>					
	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (PMDN 18 2020)	10	0	0	Sangat rendah	
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	Persentase peningkatan produksi ikan	0,5	7,5	1500	Sangat Tinggi	
	Jumlah pembenih ikan konsumsi yang dilatih	50	50	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Jumlah peserta Pelatihan budidaya ikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Angka Konsumsi Ikan	26,66	28,51	106,94	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta Sosialisasi gemar ikan	170	170	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pariwisata</b>					
	Persentase destinasi dalam keadaan baik	80	77,3	96,63	Sangat tinggi	
	Persentase peningkatan jumlah destinasi wisata	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan jumlah industri pariwisata	7	6,3	90	Sangat tinggi	
	Jumlah obyek (destinasi) wisata lama dan baru	22	22	100	Sangat Tinggi	
	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik.	80	77,3	96,63	Sangat tinggi	
	Jumlah obyek (destinasi) wisata lama dan baru	22	22	100	Sangat Tinggi	
	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	80	77,3	96,63	Sangat tinggi	
	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta	5750000	1788858	31,11	Sangat rendah	
	Rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kota Surakarta	1,8	1,37	76,11	tinggi	
	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta	5750000	1788858	31,11	Sangat rendah	
	Rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kota Surakarta	1,8	1,37	76,11	tinggi	
	Persentase Usaha ekonomi kreatif dari level start up ke level overseas	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	17	17	100	Sangat Tinggi	
	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	41	41	100	Sangat Tinggi	
	Persentase zona ekonomi kreatif dalam kondisi baik	47	47	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pertanian</b>					
	Persentase lahan sawah untuk pertanian	1,93	0,91	47,15	Sangat rendah	
	Jumlah Peralatan pertanian yang didistribusikan	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah bibit yang didistribusikan	9200	9200	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah penerima bantuan bibit ternak	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Indeks Pertanaman	274	263,5	96,17	Sangat Tinggi	
	Produktivitas padi per hektar	65,24	75,1	115,11	Sangat Tinggi	
	Panjang jaringan irigasi yang terbangun	500	500	100	Sangat Tinggi	
	Pembangunan/pengadaan sarana prasarana RPH	1	1	100	Sangat Tinggi	
	<b>Perdagangan</b>					
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SHP dan SIP dan SKA	95	95	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan Disperdag	16500	18000	109,09	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Kota Surakarta.					
	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	79,55	79,55	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PKL yang tertata	92,86	92,86	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pasar yang direvitalisasi	63,63	63,63	100	Sangat Tinggi	
	Persentase lokasi PKL yang tertata	4,17	4,17	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pasar tradisional dan Toko modern yang Aman dari bahan berbahaya	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen	37,5	37,5	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Nilai ekspor	51082000	54108027	105,92	Sangat Tinggi	
	Persentase komoditi yang mampu ekspor	25	25	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk dalam negeri	50	45	90	Sangat Tinggi	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SHP dan SIP dan SKA	95	95	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan Disperdag Kota Surakarta.	16500	18000	109,09	Sangat Tinggi	
	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	79,55	79,55	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PKL yang tertata	92,86	92,86	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pasar yang direvitalisasi	63,63	63,63	100	Sangat Tinggi	
	Persentase lokasi PKL yang tertata	4,17	4,17	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Pasar tradisional dan Toko modern yang Aman dari bahan berbahaya	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen	37,5	37,5	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Nilai ekspor	51082000	54108027	105,92	Sangat Tinggi	
	Persentase komoditi yang mampu ekspor	25	25	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk dalam negeri	50	45	90	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	<b>Perindustrian</b>					
	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	3,35	3,35	100	Sangat tinggi	
	persentase IKM yang berkembang ( permodalan, TK, Varian produk dan perluasan pemasaran, anggota dalam sentra)	2,86	2,86	100	Sangat tinggi	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	85,43	85,43	100	Sangat tinggi	
	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3,35	3,35	100	Sangat tinggi	
	Persentase IKM masuk dalam SIIKa	2,86	2,86	100	Sangat tinggi	
	Persentase IKM masuk dalam SIIKa	85,43	85,43	100	Sangat tinggi	
	<b>Transmigrasi</b>					
	Prosentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	100	69,48	69,48	sedang	
	Prosentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	100	69,48	69,48	sedang	
<b>3.</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
	<b>Sekretariat Daerah</b>					
	Persentase Maturitas PD dengan level 3	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pemenuhan sarpras pimpinan daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Nilai SKM Pemerintah Kota Surakarta	82	85,5	104,27	Sangat Tinggi	
	Persentase pemenuhan fasilitasi pimpinan di bidang keprotokolan komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan sesuai dengan propem dan progsun	100	88,67	88,67	Tinggi	
	Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi	95	87,11	91,69	Sangat Tinggi	
	Persentase tersedianya operasional tim penanggulangan kemiskinan kecamatan banjarsari	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kelurahan yang Melakukan Update Data Kemiskinan dan Menyampaikan Data Kemiskinan Tepat Waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase kelurahan yang melakukan update data kemiskinan dan menyampaikan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan kemiskinan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelurahan yang melakukan update data kemiskinan dan menyampaikan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Rata-rata capaian kinerja SPM	78	98,72	126,57	Sangat Tinggi	
	Persentase peserta penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	operasional tim penanggulangan kemiskinan kecamatan banjarsari	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kelurahan yang Melakukan Update Data Kemiskinan dan Menyampaikan Data Kemiskinan Tepat Waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kelurahan yang melakukan update data kemiskinan dan menyampaikan tepat waktu	11	11	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Prosentase Kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah terpublikasikan	100	88,67	88,67	Tinggi	
	Terselenggaranya Sosialisasi Terkait Perda dan Hukum	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah naskah kerjasama daerah yang tersusun	42	64	152,38	Sangat Tinggi	
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Koordinasi Impelementasi 4K (Keterjangkauan, Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Kelancaran Informasi)	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Perekonomian	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin	0,1	0,27	-70	sangat rendah	
	Persentase aparatur dengan nilai hasil capaian kinerja di atas 90	1,85	1,64	88,65	Tinggi	
	Nilai korsupgah KPK	81	83	102,47	Sangat Tinggi	
	Jumlah terlaksananya pembinaan BUMD / perumda	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah terlaksananya koordinasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah koordinasi dan pemantauan ketersediaan stok LPG 3 kg	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi (monev) pengembangan UMKM	8	8	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah realisasi CSR yang terfasilitasi	15	120	800	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan APBD	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah dokumen monev pengadaan barang dan jasa	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah perangkat daerah dan untuk kerja yang mendapat sosialisasi pengadaan barang/jasa	158	158	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi pengadaan barang/jasa	158	158	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah personil yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya pengadaan barang/jasa	35	35	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah personil yang menguasai aplikasi SIRUP,SPSE	150	150	100	Sangat Tinggi	
	Persentase rata-rata kepatuhan ASN atas laporan LHKPN	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pendampingan perangkat daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah paket lelang/tender yang terselesaikan	270	193	71,48	sedang	
	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa non tender yang terselesaikan	1000	1319	131,9	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya BLT kepada buruh pabrik rokok	560	560	100	Sangat Tinggi	
	<b>Sekretariat DPRD</b>					
	Persentase dokumen peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tersusun	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100	47,56	47,56	Sangat rendah	
	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya	93	93	100	Sangat Tinggi	
	Persentase aparatur data SIMPEG yang terupdate valid dan akurat	80	80	100	Sangat Tinggi	
	jumlah naskah akademik yang tersusun	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	15	15	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penetapan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya kursus,diklat,pelatihan/bintek,olah raga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	6	6	100	Sangat Tinggi	
	Terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat	23	23	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD	94	491	522,34	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	<b>Perencanaan</b>					
	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	75	75	75	sedang	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersedianya informasi Pembangunan Daerah berbasis elektronik sesuai amanat peraturan yang berlaku	133,33	133,33	133,33	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahunan sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	persentase tersusunnya laporan dan rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan peraturan berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian sesuai peraturan berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai peraturan berlaku	93,88	93,88	100	Sangat Tinggi	
	<b>Keuangan</b>					
	Tersalurnya dana hibah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Presentase terserapnya anggaran daerah bidang kebudayaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	79	79,14	100,18	Sangat Tinggi	
	Skor SKM-IKM	81,1	85,2	105,06	Sangat Tinggi	
	Terselenggaranya fasilitasi belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-15	-13	86,67	Tinggi	
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-15	-16,25	108,33	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	30,95	23,14	74,77	sedang	
	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	15	22,99	153,27	Sangat Tinggi	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	15	13,34	88,93	Tinggi	
	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Presentase bantuan keuangan yang disalurkan	100	88,93	88,93	Tinggi	
	Ketepatan Waktu Perda dan Perwali tentang APBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya KUA dan PPAS Yang tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan PPAS yang tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai standar	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Ketaatan dan ketertiban pembayaran pajak atas belanja daerah bagi seluruh SKPD Kota Surakarta	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Ketepatan Waktu Perda dan Perwali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Semesteran					
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya pengelolaan dana hibah & bantuan sosial	12	12	100	Sangat Tinggi	
	terselenggaranya hibah	12	12	100	Sangat Tinggi	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyaluran anggaran hibah di bidang kebudayaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyaluran bantuan keuangan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase fasilitasi belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase bantuan keuangan yang disalurkan	100	88,93	88,93	Tinggi	
	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan yang tepat guna	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aset Barang Milik	100	100	100	Sangat	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Daerah yang diasuransikan				Tinggi	
	Persentase Aset Gedung yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kendaraan Roda Dua yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kendaraan Roda Empat yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aset Daerah Lainnya yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aset Barang Milik Daerah yang diasuransikan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aset Gedung yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kendaraan Roda Dua yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Kendaraan Roda Empat yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase Aset Daerah Lainnya yang teregistrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Manajemen Aset :	100	100	100	Sangat Tinggi	
	1. Apakah ada daftar aset tetap? (ya/tidak)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (ya/tidak)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Standar Harga	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Penilaian Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	-1	-50	Sangat rendah	
	Persentase kenaikan PAD retribusi pengelolaan sampah	90	86,06	95,62	Sangat Tinggi	
	Persentase realisasi retribusi Pasar, PKL dan Metrologi	2	-1	-50	Sangat rendah	
	Persentase kenaikan PAD retribusi pengelolaan sampah	90	86,06	95,62	Sangat Tinggi	
	Persentase realisasi retribusi Pasar, PKL dan Metrologi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Tersusunnya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	<b>Kepegawaian</b>					
	Terselenggaranya pengembangan kompetensi ASN	71	71	100	Sangat Tinggi	
	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya Persentase pemenuhan formasi CASN	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan pelatihan dan workshop	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase dokumen DUPAK APIP	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PNS yang telah ditempatkan sesuai kompetensi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PNS yang telah ditempatkan sesuai kompetensi	100	85	85	Tinggi	
	Jumlah ASN yang melakukan pengembangan kompetensi	71	71	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PNS yang telah ditempatkan sesuai kompetensi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelatihan dan workshop yang diselenggarakan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase dokumen DUPAK disahkan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase PNS yang telah ditempatkan sesuai kompetensi	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	<b>Pendidikan dan pelatihan</b>					
	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya	93	93	100	Sangat Tinggi	
	Persentase aparatur data SIMPEG yang terupdate valid dan akurat	80	80	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan kompetensi teknis dan fungsi aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan kapasitas disiplin dan kinerja aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan kapasitas disiplin dan kinerja aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase peningkatan kapasitas manajerial aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya	93	93	100	Sangat Tinggi	
	<b>Penelitian Dan pengembangan</b>					
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan inovasi daerah sesuai dengan urusan (inovasi tata kelola pemerintahan/ inovasi pelayanan publik/ inovasi lainnya)	52,78	57,14	108,26	Sangat Tinggi	
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	22,5	20	88,89	Tinggi	
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
	<b>Pengawasan</b>					
	Persentase dokumen pemeriksaan yang berkualitas	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase temuan atas dasa pengaduan dan perintah atasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terwujudnya perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	100	90,61	90,61	Sangat Tinggi	
	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti kursus, diklat, dan pelatihan	32	32	100	Sangat Tinggi	
	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	85,33	84,79	99,37	Sangat Tinggi	
	Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	91,73	96,44	105,13	Sangat Tinggi	
	<b>Kecamatan</b>					
	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 (2015)	67	67	100	Sangat Tinggi	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85	85	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelayanan kependudukan tingkat kelurahan dalam kondisi baik (sesuai SOP)	100	100	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90	86,5	96,11	Sangat Tinggi	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jenis layanan mendapatkan pendampingan sesuai ISO 9001-2008/2015	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase unit layanan berstandar ISO	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase pelayanan kelurahan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2015	45,45	45,45	100	Sangat Tinggi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	90	90	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jenis layanan mendapatkan pendampingan sesuai ISO 9001-2008/2015	30	30	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya pembinaan administrasi PKK kel, pembinaan PHBS & LBS dan lomba administrasi PKK tingkat kec, Sosialisasi TBC	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah pelimpahan urusan pemerintahan kepada Kecamatan terselenggara dengan baik	4	4	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan	10	10	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan	1	1	100	Sangat Tinggi	
	Persentase proposal RT/RW mendapatkan persetujuan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah proposal RT/RW yang terverifikasi	2	2	100	Sangat Tinggi	
	<b>Kesatuan Bangsa dan politik</b>					
	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100	90	90	Tinggi	
	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat partisipasi perempuan di parlemen	30	26	86,67	Tinggi	
	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100	90	90	Tinggi	
	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi	3	3	100	Sangat Tinggi	

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT CAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
	1	2	3	4	5	6 
	kemasyarakatan					
	Persentase Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan yang Terlaksana	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan halagoh dan keagamaan	100	100	100	Sangat Tinggi	 
	Presentase kelompok masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	85	85	100	Sangat Tinggi	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan halagoh dan keagamaan	100	100	100	Sangat Tinggi	 
	Cakupan penyuluhan P4GN pada siswa sekolah SLTP dan SLTA di Kota Surakarta	100	90	90	Tinggi	
	Persentase fasilitasi kerukunan umat beragama	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
	terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama	3	3	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah kelembagaan/ kelompok yang megikuti peningkatan wawasan kebangasaan	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Persentase terlaksananya kegiatan lintas sektoral dalam penanganan konflik	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Persentase penurunan konflik SARA	100	100	100	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya kegiatan lintas sektoral	2	2	100	Sangat Tinggi	
	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1	1	100	Sangat Tinggi	
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rata-rata Per Kapita Tiap Bulan	16.697.250	14.911.000	89,3	tinggi	

**Tabel 2. 60 Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan**

NO	Status Pencapaian Indikator	2021	
		Jumlah Indikator	%
1	Tercapai (hijau)	<b>590</b>	<b>68,77</b>
2	Melampaui (kuning)	<b>135</b>	<b>15,73</b>
3	Perlu upaya keras (merah)	<b>133</b>	<b>15,50</b>
		<b>858</b>	<b>100%</b>

## **2.6 Permasalahan Pembangunan**

### **2.6.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2023 bersumber dari isu strategis yang tercantum di RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dengan fokus kepada tema pembangunan tahun 2023, yaitu Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif. Permasalahan pokok yang diprioritaskan yaitu :

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan berkenaan dengan masalah pokok faktor pembentuk pendapatan masyarakat, kemampuan pengeluaran masyarakat, dan produktivitas daerah.
3. Tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Hal ini mencakup permasalahan pengaturan tata ruang dan infrastruktur sehingga mendukung pemajuan nilai-nilai budaya lokal adiluhung dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan serta memajukan industri pariwisata.
4. Kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Hal ini terkait dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan penekanan pada peran pemuda, tanpa mengabaikan segmen kelompok usia lain. Permasalahan terkait dengan: rerata lama pendidikan dan penguasaan keterampilan dan adaptabilitas sumber daya manusia yang sesuai tuntutan pasar global. Dari aspek ekonomi permasalahan kreativitas warga menjual potensi daerah. Dari aspek budaya merujuk pada permasalahan bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal dari aspek nilai dasar maupun instrumental produk budaya. Dari aspek olahraga merujuk pada permasalahan bagaimana mendorong olahraga sebagai prestasi dan sebagai event untuk menarik kunjungan nasional dan internasional ke Kota Surakarta.
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan. Permasalahan ini mencakup bagaimana meningkatkan penyelenggaraan layanan publik yang memuaskan dan kolaboratif dengan pemerintah pusat, kerja sama antara daerah, KPBU, dan kerja sama dengan komunitas masyarakat sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

6. Kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Permasalahan ini meliputi bagaimana meningkatkan kemakmuran, dan mengurangi ketimpangan serta meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Permasalahan yang harus dipecahkan terkait dengan bagaimana meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan daerah dan ketangguhan menghadapi risiko bencana

### **2.6.2 Permasalahan per urusan pemerintahan**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Input utama dalam perumusan permasalahan tiap urusan ini adalah hasil analisis kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD, Capaian Indikator SPM dan SDG's tahun 0001, hasil konsultasi publik dan Musrenbang RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, dan rekomendasi LKPJ Tahun 2020. Hasil identifikasi permasalahan per urusan dan fungsi penunjang diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 61 Identifikasi Permasalahan Per Urusan**

<b>No</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya capaian APK 3-6 tahun disebabkan pada masa pandemi orang tua anak didik PAUD belum/menunda mendaftarkan anak-anaknya untuk masuk ke satuan PAUD yang mengakibatkan satuan PAUD banyak yang mengalami kekurangan murid sehingga tidak ada biaya operasional (PAUD tutup).</li> <li>2) Kurangnya cakupan Layanan Pendidikan Non Formal (PNF) disebabkan dampak pandemi sehingga jumlah siswa di satuan pendidikan kesetaraan, khususnya LKP mengalami penurunan.</li> <li>3) Kurangnya kualitas kelembagaan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan dikarenakan pembatasan kuota akreditasi dari BAN PAUD dan PNF serta pelaksanaan akreditasi secara online berdampak pada pada satuan pendidikan kurang berminat untuk mengajukan akreditasi.</li> <li>4) Belum optimalnya kualitas pendidik dan sarana prasarana Pendidikan.</li> </ol>

No	Urusan	Permasalahan
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="576 309 1487 622">1) Angka penemuan Case Notification Rate (CNR) masih kurang disebabkan Kurangnya investigasi kontak dan Ketuk Pintu dan saat investigasi kontak tidak bisa mengeluarkan Sputum; Saat pandemi kunjungan ke Fasyankes berkurang sehingga mengurangi screening pemeriksaan TB; Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengecek dahak jika ada keluhan batuk; dan Belum optimalnya jejaring TB.</li> <li data-bbox="576 622 1487 936">2) Tingginya Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa karena: Masih kurangnya pendampingan penjangkau HIV dalam melakukan penelusuran pasien positif HIV yang Lost To Follow up; Pengembangan sasaran tes HIV/AIDS. Sosialisasi tentang HIV/AIDS masih belum optimal sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti faktor risiko, cara penularan, dan pencegahan penyakit HIV/AIDS.</li> <li data-bbox="576 936 1487 1205">3) Masih adanya kematian ibu dengan capaian sebesar 76,64%, disebabkan oleh Migrasi ibu hamil yang sangat dinamis, sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau; Kurangnya pengetahuan ibu untuk mempersiapkan diri menjelang persalinan; dan Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga tentang pentingnya segera memeriksakan kesehatan saat merasakan gejala sakit.</li> <li data-bbox="576 1205 1487 1563">4) Tingginya proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan oleh dari Segi Kebiasaan Hidup Masyarakat: gaya hidup sedentari dan pola makan tidak tepat; dan dari Segi Pelayanan Kesehatan yaitu: Laporan pelayanan penyakit tidak menular (hipertensi) di Fasyankes belum terintegrasi; Kurangnya kepatuhan fasyankes dalam mengumpulkan data kasus PTM (hipertensi); dan Kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan pelaporan.</li> <li data-bbox="576 1563 1487 1720">5) Angka penemuan kasus diare balita yang kurang disebabkan Kunjungan pasien MTBS selama Pandemi turun dan masih takutnya orang tua dalam memeriksakan anaknya ke faskes.</li> <li data-bbox="576 1720 1487 2040">6) Masih tingginya prevalensi bumil KEK disebabkan oleh penyebab langsung seperti asupan makan dan penyakit infeksi, dan penyebab tak langsung baik dari sisi masyarakat seperti perilaku (keaktifan ANC, PHBS) dan kemiskinan (ketersediaan pangan tingkat RT). Maupun dari sisi pelayanan masyarakat yang terkait dengan kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun OPD lain seperti KIE tentang gizi pada bumil (media informasi),</li> </ol>

No	Urusan	Permasalahan
		<p>sanitasi lingkungan (IPAL) maupun ketersediaan air bersih.</p> <p>7) Angka penemuan kasus pneumonia balita yang belum optimal dikarenakan kunjungan pasien MTBS selama Pandemi turun dan masih takutnya orang tua dalam memeriksakan anaknya ke faskes.</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1) Belum optimalnya drainase lingkungan dalam kondisi baik karena permasalahan perencanaan sistem drainase yang masih belum baik dimana drainase skala lingkungan masih belum terhubung dengan baik dengan drainase skala kota serta belum terdatanya drainase di seluruh wilayah Kota Surakarta.</p> <p>2) Belum tercapainya penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi</p> <p>3) Jumlah bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF tidak sesuai target karena regulasi dan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai IMB yang sekarang digantikan dengan PBG memerlukan penyesuaian dan kebijakan baru terkait pelaksanaannya.</p> <p>4) Persentase kajian bangunan cagar budaya tidak sesuai target karena berdasarkan kajian terhadap objek cagar budaya ada 4 (empat) kajian, tetapi hanya 3 (tiga) kajian yang direkomendasikan oleh tim TACB, karena 1 (satu) objek di SD Pangudi Luhur sudah mengalami perubahan lebih dari 50% dari bentuk aslinya.</p> <p>5) Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik belum optimal karena terbatasnya anggaran dan SDM untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, untuk itu akan diajukan pengadaan alat berat untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.</p> <p>6) Persentase Jembatan terehabilitasi yang rendah disebabkan kurangnya anggaran dalam pekerjaan pemeliharaan jembatan.</p>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>1) Masih adanya kawasan kumuh yang memerlukan penanganan terintegrasi.</p> <p>2) Masih adanya rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan rehabilitasi.</p>
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<p>1) Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwali</p> <p>2) Masih kurangnya kualitas SDM linmas</p> <p>3) Masih sedikitnya kelurahan tangguh bencana, termasuk kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanganan bencana.</p> <p>4) Belum optimalnya pencegahan kebakaran dan Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran</p>

<b>No</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
6.	Sosial	1) Kurangnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2) Kurangnya PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial 3) Kurangnya PMKS Skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4) Kurangnya Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 5) Kurangnya anak terlantar yang dibina 6) Rendahnya korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah mendapat reintegrasi (pemulangan) dan rehabilitasi sosial
7.	Tenaga Kerja	1) Adanya pengangguran disebabkan oleh adanya kesenjangan kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja 2) Kurangnya pemahaman perusahaan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3) Masih kurangnya pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1) Belum optimalnya pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan 2) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja 3) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak 4) Belum optimalnya pemenuhan hak anak
9.	Pangan	1) Produksi bahan pangan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah untuk menunjang ketersediaan pangan. 2) Belum optimalnya penanganan wilayah prioritas rawan pangan 3) Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan
10.	Pertanahan	1) Belum optimalnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
11.	Lingkungan Hidup	1) Kurangnya cakupan pemantauan kualitas air dan udara. 2) Berkurangnya luas RTH karena hilangnya jalur hijau Jl. Slamet Riyadi, berkurangnya fungsi sempadan sungai karena adanya pembangunan talud dan pembangunan fly over. 3) Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK tidak tercapai, karena pada masa pandemi tidak diselenggarakan ujian kompetensi SKK.

No	Urusan	Permasalahan
		4) cakupan area pelayanan kebersihan yang masih kecil dan belum optimalnya penanganan sampah 5) Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) 6) Belum optimalnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup 7) Masih kurangnya sekolah adiwiyata
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan disebabkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang 2) Belum optimalnya kepemilikan akte kelahiran dan KIA
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Kurangnya tingkat Keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Unmet Need KB belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan banyaknya keluarga yang baru memiliki satu anak dan tidak KB namun sampai menjelang menopause tidak mendapat tambahan anak. 2) Belum optimalnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Muda (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 3) Belum optimalnya keaktifan anggota tri bina keluarga dan UPPKS
15.	Perhubungan	1) Belum optimalnya persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) 2) Belum optimalnya persentase operasional koridor BST yang terlayani 3) Belum optimalnya Rasio Konektivitas 4) Kurangnya ketersediaan rambu lalu lintas pada kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. 5) Kurangnya Kajian MRLI pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6) Kurangnya pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi pada kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota karena adanya dampak tidak langsung dari COVID-19 yang mengakibatkan pelaku usaha mengurangi kegiatannya serta adanya perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan andalalin yang merubah secara signifikan kriteria wajib andalalin.

No	Urusan	Permasalahan
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Belum optimalnya pengembangan smart city 2) Belum semua Perangkat Daerah menyediakan layanan online 3) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pemerintah daerah
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat, dipengaruhi kualitas SDM dan kelembagaan koperasi. 2) Kurangnya kualitas SDM dan daya saing serta kemampuan pemasaran produk UMKM 3) Kurangnya aksesibilitas permodalan KUMKM terhadap lembaga keuangan/pembiayaan mikro
18.	Penanaman Modal	1) Belum optimalnya nilai investasi 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan
19.	Pemuda dan Olahraga	1) Kurangnya pertumbuhan pemuda wirausaha 2) Prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional belum optimal dipengaruhi oleh Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi 3) Kurang memadainya prasarana dan sarana keolahragaan sesuai standar 4) Belum optimalnya kualitas Kelas Khusus Olahraga 5) Belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda
20.	Persandian	1) Belum optimalnya keamanan informasi 2) Kurangnya kompetensi pengelola persandian
21.	Statistik	3) Kurangnya ketersediaan data statistic yang lengkap, akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan
22.	Kebudayaan	1) Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal. 2) Kurangnya cakupan pelestarian sejarah lokal 3) Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional yang masih rendah 4) Jumlah Pengunjung Museum tidak tercapai karena Pandemi COVID-19 mengakibatkan destinasi wisata (museum keris) ditutup untuk sementara waktu. 5) Kurangnya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif
23.	Perpustakaan	1) Kurangnya pengunjung perpustakaan, disebabkan masih adanya pembatasan jumlah pengunjung untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 2) Belum terpenuhi standar perpustakaan kampung, baik dari sisi koleksi, SDM maupun sarana dan prasarana.

No	Urusan	Permasalahan
		3) Belum optimalnya pengembangan perpustakaan digital
24.	Kearsipan	1) Masih banyaknya Perangkat Daerah dan BUMD yang belum menerapkan Sistem Pengelolaan arsip secara baku. 2) Kemampuan SDM pengelola kearsipan masih kurang dalam hal sistem kearsipan. 3) Kurangnya jumlah arsip yang di selamatkan 4) Kurangnya arsip inaktif dan statis yang terpelihara
25.	Kelautan dan Perikanan	1) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya 2) Masih kurangnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
26.	Pariwisata	1) Masih kurangnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan, karena masih adanya pandemic Covid-19. 2) Belum optimalnya pengembangan destinasi dan Kawasan wisata 3) Kurangnya Pemasaran Wisata 4) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif 5) Kurangnya produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya
27.	Pertanian	1) Kurangnya Pendapatan Petani terkendala seperti adanya alih fungsi lahan, lahan tidak digarap, hasil panen yang diharapkan tidak sesuai karena adanya serangan hama dan harga jual yang menurun. 2) Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian disebabkan adanya alih fungsi lahan.
28.	Perdagangan	1) Terdapat pasar yang kurang representatif (belum memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan) 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap barang pokok penting dan perlindungan konsumen 3) Belum optimalnya penataan pasar 4) Belum optimalnya tera dan tera ulang alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapan
29.	Perindustrian	1) Belum optimalnya akses permodalan, peningkatan SDM dan pemasaran produk IKM 2) Masih terbatasna IKM yang masuk dalam SIIKa 3) Kurangnya kemampuan Pemasaran Produk Industri dan Manajemen Industri
30.	Transmigrasi	1) Belum terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran
31.	Sekretariat Daerah	2) Belum optimalnya pencapaian SAKIP pemerintah daerah 3) Belum optimalnya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan pelayanan publik 4) Belum optimalnya kajian perda yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan / kebutuhan / tuntutan masyarakat; 5) Kurangnya implementasi pelaksanaan kerjasama daerah

No	Urusan	Permasalahan
		<p>hingga program aksi oleh Perangkat Daerah teknis;</p> <p>6) Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian daerah dan kinerja BUMD;</p> <p>7) Belum optimalnya penyampaian laporan realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan;</p>
32.	Sekretariat DPRD	1) Pelayanan sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD belum optimal.
33.	Perencanaan Pembangunan	<p>1) Keterpaduan perencanaan pembangunan yang belum optimal.</p> <p>2) Ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah yang masih kurang</p>
34.	Keuangan	<p>1) Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</p> <p>2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya serta kurangnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif</p> <p>3) Belum optimalnya pengelolaan keuangan mencakup penyusunan anggaran kas, penyusunan anggaran, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan</p> <p>4) Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah</p>
35.	Kepegawaian dan Diklat	<p>1) Kurangnya kualitas, kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>2) Belum optimalnya penempatan aparatur sipil negara secara profesional dengan memperhatikan kompetensi berbasis “merrit system”.</p> <p>3) Belum optimalnya pencapaian sasaran kinerja pegawai.</p> <p>4) Belum optimalnya tingkat akurasi dan validitas data informasi kepegawaian</p>
36.	Penelitian dan Pengembangan	<p>1) Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan</p> <p>2) Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dan pengembangan IPTEK.</p>
37.	Pengawasan	<p>1) Capaian SPIP Pemerintah Kota Surakarta belum optimal</p> <p>2) Masih adanya aduan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</p> <p>3) Belum meratanya Kompetensi APIP dan kurangnya Infrastruktur Pengawasan.</p> <p>4) Belum tuntasnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan</p>

## **2.7 Isu strategis Pembangunan**

Perumusan isu strategis di tahun 2023 didapatkan dari pemetaan permasalahan perurusan, Capaian Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama Daerah; Arah kebijakan RPJMD untuk tahun 2023, RKPD Propinsi Jawa Tengah 2023; serta RKP 2023. Isu strategis RKPD Kota Surakarta tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah
2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif
3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kondusifitas wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Surakarta.

##### **3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional**

Berdasarkan Laporan *World Economic Outlook* (WEO) *International Monetary Fund* (IMF) edisi Januari tahun 2022, setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di tahun 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di tahun 2022 atau turun -0,5 *percentage points* dibandingkan WEO Oktober tahun 2021 dan 3,8% di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di tahun 2021, menuju 4,0% di tahun 2022, dan 2,6% di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0% di tahun 2021 dan 9,0% di tahun 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di tahun 2023. Sementara di Kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan IV tahun 2021 secara umum menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 walaupun di beberapa negara mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Vietnam terjadi akselerasi seiring tingkat vaksinasi yang tinggi dan terkendalinya Covid-19 di negara tersebut. Sementara itu, Singapura masih dihadapkan pada isu peningkatan Covid-19 yang berasal dari imigran pada triwulan IV, sehingga menyebabkan ekonomi Singapura sedikit tertahan.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yang didorong oleh normalisasi pertumbuhan dari tahun 2021 yang tumbuh cukup tinggi sehingga secara perlahan tingkat pertumbuhan akan kembali ke level alamiahnya. Selain itu, gelombang baru pandemi Covid-19 varian omicron di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat sejak awal tahun 2022

telah membuat prakiraan pertumbuhan dikoreksi lebih rendah.

Perkembangan terkini mengindikasikan perbaikan ekonomi terus berlangsung sejalan dengan progres vaksinasi yang semakin merata serta terkendalinya Covid-19. Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) dalam outlook terbaru yang dirilis pada Januari tahun 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 4,4% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,9% (yoy), sementara pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi meningkat menjadi 4,8% (yoy). Penurunan proyeksi ekonomi selama tahun 2022 tersebut sejalan adanya peningkatan kasus aktif Covid-19 varian omicron yang terjadi di sejumlah negara.

Perkembangan inflasi di berbagai negara masih menjadi faktor risiko yang diperbincangkan pada tahun 2021. Tekanan inflasi di sebagian besar negara tersebut lebih disebabkan oleh faktor suplai terutama pada komoditas energi dan semikonduktor. Permasalahan dari global supply chain diperkirakan berangsur membaik utamanya pada pertengahan tahun 2022, meskipun harga komoditas energi diperkirakan masih akan meningkat. Dengan tekanan inflasi tersebut, sejumlah negara seperti Amerika Serikat telah mengalami inflasi yang cukup tinggi, yang mendorong bank sentral “The Fed” maupun pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil langkah pengetatan moneter dan fiskal yang akan dilakukan pada tahun 2022.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Menurut IMF, dalam periode tahun 2022-2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 5,6%, dan 6,0%. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2022 dan berlanjut ke tahun 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di tahun 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022 tentunya menjadi faktor penting. Dalam laporan WEO Januari tahun 2022 tersebut, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja

sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi structural.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu: Kebijakan moneter, Kebijakan makroprudensial, Kebijakan sistem pembayaran, Kebijakan pengembangan pasar uang, dan Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan Syariah.

Perbaikan ekonomi domestik pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus berlangsung sejalan dengan membaiknya mobilitas. IMF meramalkan perekonomian Indonesia akan bertumbuh kuat sebesar 5,6% pada tahun 2022 dan sebesar 6,0% pada tahun 2023. Pada tahun 2022 dan 2023 diharapkan inflasi nasional rendah dan terkendali pada sasaran  $3\pm 1\%$ , didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan

meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur travel bubble bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

**Tabel 3. 1 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,69	5,3-5,9
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,71	7,0-8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	5,3-6,9
4	Rasio Gini	Indeks	0,381	0,375-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,29	73,29-73,35
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	24,13	27,02
7	Nilai Tukar Petani/NTP		104,64	103-105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN		104,69	105-107

Informasi kebijakan ekonomi nasional pada musrenbang nasional RKP tahun 2023 diindikasikan sebagai berikut; kebijakan ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dari dinamika krisis global yang melanda dunia. Situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak, yang penuh dengan ketidakpastian, karena pandemi Covid belum sepenuhnya berakhir. Karena masih ada negara yang melakukan lockdown, maka menimbulkan gangguan pada rantai pasok komoditas vital. Ditambah dengan situasi perang Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan, dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan. Dampak perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global.

Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi negara berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Kondisi ini berdampak pada skenario perdagangan

Indonesia. Harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan negara, meskipun terdapat risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi di beberapa negara mitra dagang Indonesia.

Arah kebijakan fiskal tahun 2023 adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 diwujudkan dengan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Inklusif dan Berkelanjutan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 diarahkan pada Pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Strategi yang harus dilakukan adalah: (i) perbaikan sumber daya manusia (SDM), (ii) infrastruktur, dan (iii) kualitas birokrasi serta regulasi. Pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang diidentifikasi oleh pemerintah pusat yaitu:

1. Sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan.
2. Reformasi di bidang investasi dan perdagangan, terutama: Transformasi di sektor manufaktur baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi
3. Ekonomi hijau di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan

### **3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 (c-to-c) sebesar 3,32 persen. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif di tahun 2021 didukung oleh tiga lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah yang juga tumbuh positif di tahun 2021. Lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh positif sebesar 2,32 persen; perdagangan tumbuh sebesar 5,80 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 0,01 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 15,97 persen, dan diikuti dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86 persen.

Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen dibandingkan periode Agustus tahun 2020. Kondisi

ketenagakerjaan yang semakin kondusif ini dipengaruhi oleh kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Dari empat komponen kelompok tenaga kerja yang terdampak Covid-19 seluruhnya mengalami penurunan, baik penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, bukan angkatan kerja, serta penduduk yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19, namun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tetap menjadi penyumbang paling tinggi pengangguran di Jawa Tengah, yaitu sebesar 10 persen pada tahun 2021.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga mulai meningkat, hal ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan Jawa Tengah dari yang Rancangan RKPD Tahun 2023 sebelumnya sebesar 11,84 persen pada September tahun 2020 menjadi 11,25 persen pada September tahun 2021 atau menurun sebanyak 185,92 ribu orang.

Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar perekonomian daerah saat ini. Namun kita harus tetap mengupayakan perekonomian daerah yang semakin baik dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian PDRB, potensi ekspor dan memperluas negara tujuan ekspor. Selain itu sektor pertanian dan UMKM perlu didorong untuk mulai mengimplementasikan teknologi digital menuju revolusi industri 4.0, memberikan kemudahan pada akses pembiayaan UMKM (kredit murah, subsidi bunga kredit/bagi hasil dan imbal jasa penjaminan), mendorong kepeminatan investasi PMA/PMDN ke Jawa Tengah melalui kemudahan perijinan/One Stop Service (OSS), ketersediaan energi, ketersediaan kawasan industri, kemudahan pembiayaan, dan kompetensi tenaga kerja. Serta meningkatkan keterlibatan pentahelix dalam bentuk kemitraan/kolaborasi bersama pihak swasta (kerjasama/kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan start up/e-commerce), masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan tetap mengedepankan kebijakan green economy.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan

pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 – 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,63 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

**Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,00 -5,60
2	PDRB ADHK (Milyar Rp)	1.118,21
3	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,32
4	Nilai PMA dan PMDN (Milyar Rp)	58.267,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,63 – 4,80
6	Kemiskinan (Persen)	9,51 – 9,29
7	Indeks Pembangunan Manusia	72,75
8	Rasio gini	0,34

### 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Surakarta

Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih terpengaruh oleh Dampak Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap sektor industri, perdagangan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, serta pendidikan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder mengalami perlambatan cukup dalam sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi COVID-19. Seluruh Lapangan Usaha utama di Kota Surakarta melambat, kecuali sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan *work from home* atau *learn from home* (WFH atau LFH). Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar -1,74%. Inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 1,38% mengalami penurunan dibanding inflasi tahun 2019 sebesar 2,94% karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan konsumsi primernya.

Pada tahun 2021 diharapkan perekonomian Kota Surakarta mulai pulih dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID – 19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi dengan memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, langkah berikutnya adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif. Kedua, mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kebijakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kembali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran akibat dampak Covid- 19.

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global dan nasional, prospek perekonomian Kota Surakarta tahun 2023 diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. kondisi perekonomian diperkirakan sudah mulai mapan dengan tata kehidupan baru, dan pelaksanaan program vaksin yang sudah menyeluruh menjadikan pertumbuhan ekonomi mulai moderat. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta akan didorong dengan peningkatan produktivitas dan

konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang terus membaik, dan kinerja sektor komunikasi dan informatika dan sektor jasa yang semakin meningkat. Jasa keuangan akan semakin meningkat seiring perubahan perilaku konsumen dimana transaksi non tunai meningkat menggunakan kartu kredit dan kartu debit.

Inflasi di Kota Surakarta diperkirakan pada kondisi stabil didorong oleh daya beli masyarakat yang cukup terkendali. Laju inflasi diupayakan untuk bergerak rendah dan stabil mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan yang realistis dan efisien. Hal ini akan terlihat terjaga bila unsur-unsur pengendali inflasi, dalam hal ini adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menjaga stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting pada kondisi yang stabil.

Penyusunan proyeksi kemiskinan mendasarkan pada perkembangan penduduk miskin dan memperhatikan kondisi perekonomian daerah, dan kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh. Sesuai dengan kebijakan nasional tahun 2023 diarahkan pada upaya Percepatan Pencapaian Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Pemerintah Kota Surakarta akan mengarahkan pelaksanaan program-program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik yang mengarah pada peningkatan pendapatan, pengurangan beban penduduk miskin maupun bantuan sosial. Pemerintah Kota Surakarta juga akan mengarahkan pelaksanaan program-program yang mengarah pada pengurangan pengangguran dengan mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, peningkatan kewirausahaan, peningkatan kualitas tenaga kerja.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Surakarta tahun 2023 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 3. 3 Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Proyeksi Tahun 2023</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,48
2	Inflasi (Persen)	1,94
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	6,2
4	Kemiskinan (Persen)	7,89
5	Indeks Pembangunan Manusia	83,56
6	PDRB per kapita (juta rupiah)	102.879.440

Kebijakan ekonomi Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ekonomi Kota Surakarta tahun 2023 diarahkan pada pengembangan ekonomi cerdas, melalui:

1. Pengembangan Usaha mikro dan IKM
2. Pengembangan wisata berbasis budaya, *Sport Tourism* dan
3. *Wellness Tourism*, wisata kuliner dan belanja
4. *Pengembangan sarana dan kawasan perdagangan*
5. Peningkatan investasi dan kemitraan perusahaan dengan UMKM.
6. Pengendalian pasokan dan harga bahan pokok didukung kerjasama antar daerah, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga.
7. Peningkatan pengalokasian APBD untuk belanja modal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

##### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa isu terkait pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Sektor perdagangan dan jasa mengalami pemulihan mengingat beberapa aktivitas berupa capaian target vaksinasi yang tinggi sampai dengan tahun 2022, penyelenggaraan event-event baik tingkat lokal maupun nasional dapat terselenggara di Kota Surakarta.
2. Asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta yang semakin membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan *year on year* (yoy) tahun 2021.
3. Trend digitalisasi dalam transaksi perdagangan diharapkan menjadi trigger dalam sektor penerimaan PAD.
4. Penerapan regulasi yang bersinggungan dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022).

Kebijakan utama PAD diarahkan untuk menuju pada kemandirian keuangan daerah sebesar 30-40%. Strategi yang ditempuh, meliputi:

- 1) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah antara lain melalui penghitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama

atau minimal mendekati potensi PAD, Pemutakhiran data secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi, Peran IT dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan pendapatan, Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dengan metode "jemput bola" bagi wajib pajak potensial, Memberlakukan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak, serta Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang urgensi pajak bagi pembangunan daerah.

- 2) Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak pada kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD.
- 4) Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK BLUD.

Retribusi daerah dan pendapatan transfer tahun 2023 ditargetkan menurun dibandingkan tahun 2022. Asumsi dasar terkait dengan penurunan target Retribusi Daerah pada tahun 2023 dikarenakan adanya penurunan pendapatan retribusi dari beberapa perangkat daerah yang menerima pendapatan. Perangkat daerah yang diperkirakan mengalami penurunan pendapatan antara lain :

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Retribusi  
Sewa Rusunawa mengalami penurunan dikarenakan ada 2 Rusunawa yang dirobohkan.
- 2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Surakarta mengalami penurunan dikarenakan pada bulan Januari s.d Juni 2023 menjadi Venue Piala Dunia U-20, penggunaan ditarik oleh Pemerintah Pusat dan sarana prasarana Olahraga steril dari kegiatan umum. Pada bulan Juli 2023 akan dilakukan proses *recovery venue*. Potensi pendapatan yang diharapkan hanya 6 bulan.
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dasar dialihkan pembayarannya melalui BPN, sehingga proyeksi retribusi tersebut pada tahun 2023 adalah 0.
  - b. Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan dikarenakan berdasarkan Perda Retribusi yang baru tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi turun drastis.
- 3) Dinas Lingkungan Hidup  
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dikarenakan pemakaian bersifat sosial.

Sedangkan untuk pendapatan transfer pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2023 pendapatan transfer masih diasumsikan sama dengan tahun 2022, dan untuk beberapa pendapatan transfer seperti Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan 0 sampai terbit keputusan tentang Dana Insentif Daerah (DID).

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
- 2) Belanja prioritas RKPD Tahun 2023, diarahkan antara lain untuk:
  - a. Pemenuhan *mandatory spending*, bidang pendidikan (20%), kesehatan (10%), infastruktur (25%), dan penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana transfer umum dan DID yang dilakukan untuk penuntasan vaksinasi dan turunannya, insentif Tenaga Kesehatan dan program pengendalian kegiatan masyarakat; sarpras dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Penguatan fasilitas kesehatan mengantisipasi dinamika angka penularan COVID-19 tahun 2023. termasuk antisipasi adanya peningkatan layanan kesehatan penanganan COVID-19 di Tahun 2023;
  - c. Program jaring pengaman sosial (*social safety net*) masyarakat terdampak COVID-19, untuk menekan potensi angka pengangguran dan kemiskinan baru;
  - d. Sinkronisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya kepada UMKM di Kota Surakarta;
  - e. Menuju era kenormalan baru pasca COVID-19, melalui digitalisasi pelayanan publik pada layanan bidang-bidang yang terdampak signifikan atas Pandemi COVID-19. inisiasi baru program SKPD dengan outcome baru, menyesuaikan dengan dampak pandemi COVID-19 pada target dan sasaran Renstra SKPD Tahun 2023;
  - f. Penyesuaian asumsi dan *redesign* model pertumbuhan PDB Kota Surakarta yang berbasis sektor tersier (jasa) inline dengan kenormalan baru.
- 3) Pemenuhan belanja operasional yang makin terukur, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan Pandemi COVID-19.

Belanja modal tahun 2023 diasumsikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta belum mengakomodir belanja modal yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler maupun DAK Fisik Penugasan, Dana Insentif Daerah (DID) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi yaitu Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan tersebut menunggu penetapan alokasi TKDD dari Kementerian Keuangan RI dan rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi yang diperkirakan akan diterima pada bulan Oktober 2022. Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta akan mengakomodir pada tahapan RAPBD setelah mendapat alokasi resmi pendapatan transfer pusat maupun provinsi dalam upaya untuk meningkatkan proporsi belanja modal sesuai amanat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA murni tahun 2023 diasumsikan sebesar 50 Milyar Rupiah, dengan memperhatikan realisasi SiLPA tahun sebelumnya, yang menunjukkan trend yang makin menurun. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah dan Bank Solo sebesar 7 Milyar Rupiah;

#### 3.2.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Secara rinci Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2022 MURNI	PROYEKSI 2023	TAMBAH/(KURANG)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.135.619.961.790,00</b>	<b>1.970.096.160.142,00</b>	<b>(165.523.801.648,00)</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>736.097.873.544,00</b>	<b>737.510.349.142,00</b>	<b>1.412.475.598,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	484.000.000.000,00	513.000.000.000,00	<b>29.000.000.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	91.346.620.760,00	60.973.443.800,00	<b>(30.373.176.960,00)</b>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.324.137.883,00	14.324.137.883,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.427.114.901,00	149.212.767.459,00	<b>2.785.652.558,00</b>
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.399.522.088.246,00</b>	<b>1.232.585.811.000,00</b>	<b>(166.936.277.246,00)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.213.880.528.000,00	1.062.020.492.000,00	<b>(151.860.036.000,00)</b>

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2022 MURNI</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>	<b>TAMBAH/(KURANG)</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.641.560.246,00	170.565.319.000,00	<b>(15.076.241.246,00)</b>
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.239.295.961.790,00</b>	<b>2.013.096.160.142,00</b>	<b>(226.199.801.648,00)</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.845.845.287.691,00</b>	<b>1.784.145.486.043,00</b>	<b>(61.699.801.648,00)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	802.388.422.699,00	802.388.422.699,00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.322.114.992,00	843.622.313.344,00	<b>(81.699.801.648,00)</b>
5.1.05	Belanja Hibah	80.296.675.000,00	100.296.675.000,00	<b>20.000.000.000,00</b>
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.838.075.000,00	37.838.075.000,00	-
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>353.450.674.099,00</b>	<b>188.950.674.099,00</b>	<b>(164.500.000.000,00)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.740.662.000,00	3.740.662.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.033.401.118,00	78.033.401.118,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.107.288.850,00	45.107.288.850,00	<b>(104.000.000.000,00)</b>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.827.738.040,00	53.327.738.040,00	<b>(60.500.000.000,00)</b>
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.741.584.091,00	8.741.584.091,00	-
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-
	<b>SURPLUS/DIFISIT</b>	<b>(103.676.000.000,00)</b>	<b>(43.000.000.000,00)</b>	<b>60.676.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			-
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>110.676.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>(60.676.000.000,00)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	110.676.000.000,00	50.000.000.000,00	<b>(60.676.000.000,00)</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>103.676.000.000,00</b>	<b>43.000.000.000,00</b>	<b>(60.676.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>,00</b>

Secara rinci rencana alokasi belanja daerah per urusan Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 5 Rencana Alokasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

NO	URUSAN	PROYEKSI 2023	%
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.215.957.482.510</b>	60,40
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>310.479.268.284</b>	15,42
	Pendidikan	108.517.893.404	5,39
	Kesehatan	72.122.106.830	3,58
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.789.561.440	3,91
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.821.940.746	1,88
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.412.760.314	0,22
	Sosial	8.815.005.550	0,44
<b>C</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>743.192.355.439</b>	36,92
	Tenaga Kerja	3.024.607.008	0,15
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.268.061.674	0,36
	Pangan	1.920.629.306	0,10
	Pertanahan	30.966.200.000	1,54
	Lingkungan Hidup	49.950.070.812	2,48
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.072.325.200	0,15
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.960.578.418	0,49
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.734.085.989	0,38
	Perhubungan	59.090.855.122	2,94
	Komunikasi dan Informatika	9.651.371.020	0,48
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.120.967.302	0,16
	Penanaman Modal	1.440.528.150	0,07
	Kepemudaan dan Olah Raga	19.992.523.330	0,99
	Statistik	528.481.550	0,03
	Persandian	332.657.415	0,02
	Kebudayaan	14.106.049.416	0,70
	Perpustakaan	1.532.611.363	0,08
	Kearsipan	350.621.500	0,02
<b>D</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>36.326.801.431</b>	1,80
	Kelautan dan Perikanan	908.966.838	0,05
	Pariwisata	10.439.299.495	0,52
	Pertanian	2.003.577.608	0,10
	Perdagangan	16.555.544.490	0,82
	Perindustrian	5.957.200.000	0,30
	Ketransmigrasian	462.213.000	0,02
<b>E</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>41.116.502.876</b>	2,04
	Sekretariat Daerah	21.301.517.827	1,06
	Sekretariat DPRD	19.814.985.049	0,98
<b>F</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>106.579.635.299</b>	5,29
	Perencanaan	9.952.791.852	0,49
	Keuangan	81.903.373.245	4,07
	Kepegawaian	4.260.886.826	0,21
	Pendidikan dan Pelatihan	6.420.290.337	0,32
	Penelitian dan Pengembangan	4.042.293.040	0,20
<b>G</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	<b>3.004.300.871</b>	<b>0,15</b>
	Inspektorat Daerah	3.004.300.871	0,15
<b>H</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>70.740.607.954</b>	<b>3,51</b>
	Kecamatan	70.740.607.954	3,51
<b>I</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>1.806.717.000</b>	<b>0,09</b>
	Kesbangpol	1.806.717.000	0,09
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.013.096.160.142</b>	100%

## **BAB IV**

# **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2023 akan didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Selanjutnya akan digambarkan perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi RKPD tahun 2021; (2) Isu strategis Daerah; (3) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (4) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; (5) Arah Kebijakan tahun 2023 dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026; dan (6) Pokok pokok pikiran DPRD.

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Visi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 yaitu: Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 7 misi pembangunan meliputi:

#### **1. Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 1 adalah Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh, diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat.

#### **2. Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 2 adalah Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan Laju Inflasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil, diukur dengan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Persentase Pertumbuhan UMKM, Persentase Pertumbuhan IKM, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Skor

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah.

**3. Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh, diukur menggunakan indikator Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Indeks Williamson dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya, diukur menggunakan indikator Persentase Infrastruktur kota kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dan Rasio Konektivitas.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

**4. Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga**

**Tujuan** dari misi 4 yaitu Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju, diukur menggunakan indikator IPM (Indek Pembangunan Manusia), IPG (Indek Pembangunan Gender), Laju pertumbuhan penduduk, dan Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Nilai Literasi Masyarakat.
- b. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha, Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/ internasional, Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga, Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang, Indeks Pemberdayaan gender (IDG), iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).
- c. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan

kebudayaan, diukur menggunakan Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional

**5. Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan**

**Tujuan** dari misi 5 yaitu Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, diukur menggunakan indikator Indeks reformasi birokrasi, Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif, diukur menggunakan indikator: Indeks Merit, Maturitas Kelembagaan, Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi, Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD, Nilai Pengawasan Arsip Eksternal, Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi.
- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART) diukur menggunakan indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Inovasi Daerah, Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata, Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.

**6. Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif**

**Tujuan** dari misi 6 yaitu Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, diukur menggunakan indikator Angka Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia), dan Rasio Kawasan Kumuh.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif, diukur menggunakan indikator: Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang tertangani, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

**7. Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati**

**Tujuan** dari misi 7 yaitu Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh, diukur menggunakan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran) dan Persentase Penurunan Gangguan Trantibum.
- b. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana, diukur menggunakan indikator Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar.

**Tabel 4. 1 Kerangka Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD  
Tahun 2021 – 2026**

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan</b>								
Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif Kesehatan masyarakat	Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan Kesehatan primer dan rujukan	3.6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 3.8. Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan yang tercukupi dan terjangkau secara kualitas.	Urusan Kesehatan (102)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Kecukupan standarisasi sumberdaya kesehatan	3.9. Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi.		1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Peningkatan upaya penerapan Paradigma sehat sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat dan lingkungan	3.7. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani.		1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					Pembangunan Centers for Disease Control (CDC)	3.11. Pembangunan <i>Centers for Disease Control</i>		1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Pembangunan <i>wellness tourism (medical)</i>	4.6. Pengembangan <i>wellness tourism (medical)</i>		
<b>Misi 2 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</b>								
Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. PDRB per kapita (Rp) 3. Laju Inflasi (%)	Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat ( <i>eco socio tourism</i> )	Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	4.1. Menciptakan rasa percaya pada pengunjung dan wisatawan bahwa tempat wisata dan industri wisata telah menerapkan prinsip <i>Clean, Healthy and Safe</i> sesuai protokol kesehatan dan pariwisata. 4.6 Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	Urusan pemerintahan bidang pariwisata (3.26)	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
					Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata	4.4. Perbaikan manajemen kegiatan seni budaya dan industri kreatif untuk mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata		
					Perbaikan manajemen pengelolaan obyek industri pariwisata dan daerah wisata			

<b>MISI / TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM UNGGULAN</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM NOMENKLATUR</b>
					Peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan pelaku wisata	4.2. Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol new normal agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah. 4.5. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak.		
					Peningkatan promosi wisata berbasis media sosial komunitas	4.3. Melakukan inovasi dan promosi pariwisata secara daring dan menyesuaikan tren pariwisata di era kenormalan baru.		3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			3. Persentase Pertumbuhan UMKM 4. Persentase Pertumbuhan dan IKM	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro	Fasilitasi bantuan usaha bagi Usaha mikro, IKM dan Koperasi yang terdampak COVID-19	1.2. Memfasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak Covid-19.	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (2.17) urusan pemerintahan bidang perindustrian (3.31)	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)  3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
					Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mencakup: penguasaan teknologi, aspek modal, jaringan pemasaran, dan standarisasi produk.	4.7 Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata		2.17.08 Program Pengembangan Umkm
			5. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	4.8 Program <i>Creative Hub</i>  5.7. Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima.	urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)  Urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					Akuntabilitas pengendalian ketersediaan dan akses distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat	1.3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			6.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Peningkatan ketahanan Pangan	Pemasyarakatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA),	1.3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	urusan pemerintahan bidang pangan (2.09)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			7.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		Pengendalian cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan Pangan serta mutu dan keamanan pangan		urusan pemerintahan bidang pertanian (3.27) bidang kelautan dan perikanan (3.25)	
			8.Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Peningkatan kemudahan berinvestasi	Penyediaan regulasi dan Kebijakan yang pro investasi	2.4. Pengembangan dan peningkatan investasi daerah.	urusan pemerintahan bidang penanaman modal (2.18)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
<b>Misi 3 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan</b>								
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	1. Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik 2. Indeks Williamson	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya -	Persentase Infrastruktur kota kondisi baik	Pengelolaan Infrastruktur kota yang sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya	Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya	5.1. Pembenahan dan penataan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata dan lingkungan kegiatan usaha yang terkait dengan pariwisata dan budaya.	Urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03)	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
					Pembangunan Fasilitas Convention Hall	5.3. Pengembangan kawasan perkantoran dan Perdagangan dalam beberapa rintisan Central Business District (CBD) yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar.		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
					Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	5.8. Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						5.10. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.		
			Cakupan Layana Air Bersih	Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota	Peningkatan dan pemeliharaan system drainase baik drainase perkotaan maupun drainase lingkungan	5.5. Penambahan drainase, septik tank publik, sarana air bersih, penataan kawasan sungai.		1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah			1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Rasio Konektivitas	Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	Fasilitasi kerjasama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya	8.1. Kerjasama memperbaiki konektivitas/ transportasi dan pariwisata Subosukowonosraten.	Urusan pemerintahan bidang perhubungan (2.15)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
					Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi	5.2. Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis, pendistribusian ulang beban layanan terminal angkutan kota dan antar-kota dan terminal angkutan barang.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kualitas Udara</li> <li>- Indeks Kualitas Air</li> <li>- Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul>	Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat	Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda	5.4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda.	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (2.11)	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
<b>Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga</b>								
Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun informal  Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota	3.1. Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.  3.2. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas.	urusan pemerintahan bidang pendidikan (1.01)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan  1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan	3.5. Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.		1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
					Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar secara tepat sasaran	3.3. Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian beasiswa kuliah kepada keluarga kurang mampu		1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
					Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal	3.4. Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik.		1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
			3. Nilai Literasi Masyarakat	Penguatan Literasi masyarakat	Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah baik secara luring maupun daring	6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	urusan pemerintahan bidang perpustakaan (2.23)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
		Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan jejaring tenaga kerja	Pelatihan kepada Pencari Kerja, berbasis kompetensi dengan uji kompetensi berbasis penempatan	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (2.07)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			5. Persentase Pertumbuhan Pemuda Wirausaha	Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda	Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk pembinaan prestasi dan promosi industri	7.2. Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan kewirausahaan	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
						7.3. Penyediaan inkubasi kewirausahaan sosial berbasis Karang Taruna seperti layanan sarana olah raga, kursus bahasa, bimbingan pendidikan/tes, dan jenis-jenis usaha sosial lainnya.		
			6. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional			7.4. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam membina bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi.	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			7. Persentase Partisipasi nasional/ internasional dalam event olahraga			4.6 Pengembangan <i>Sport Tourism</i>	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	
			8. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Penguatan resiliensi masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi	Pembentukan “kampung siaga”	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerjasama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan Covid-19.	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (2.13) unsur kewilayahan kecamatan (7.01)	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat  7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			9. Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam aktivitas pembangunan di masyarakat	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.10. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2.08)	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan  2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak
					Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada organisasi perangkat daerah	7.5. Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta.		2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	4. Laju pertumbuhan penduduk		10. iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul	Peningkatan kuantitas dan kualitas kampung KB di Surakarta	Program Bangga Kecana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (2.14)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
	5. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan	11. Pelestarian rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni	Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya	6.1. Memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
6.2. Penguatan usaha produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional) menyesuaikan dengan kenormalan baru.						urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	
Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional					6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						6.4. Diplomasi budaya untuk meningkatkan branding Surakarta sebagai Kota Budaya di forum internasional.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan
						6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	urusan pemerintahan bidang perpustakaan (2.23)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan
					Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya	6.5. Menjaga eksistensi kegiatan sanggar budaya dan kelompok kesenian berbasis kampung sebagai penopang kegiatan gelaran budaya.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
<b>Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan</b>								

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal	1. Indeks reformasi birokrasi	Terwujud- nya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	1. Indeks Merit	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang tertib, transparan, inovatif, dan berbasis kinerja	Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit.	Tantangan: Perlunya ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian (5.03) dan</li> <li>Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur pendidikan dan pelatihan (5.04)</li> </ul>	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah
			2. Maturitas Kelembagaan					4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan
			3. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi					Pemetaan manajemen resiko kebijakan dari semua OPD  2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas
					Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah		Unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah (6.01)	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			4. Nilai Pengawasan Arsip Eksternal		Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik	6.3. Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat	urusan pemerintahan bidang kearsipan (2.24)	2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
			5. Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Unsur Sekretariat DPRD	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	2. Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)		6. Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan (5.01)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		7. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Penguatan proses penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu;	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			8. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2.3. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui revaluasi aset dan penggalan usaha baru BUMD.	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)--	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						2.1 Memanfaatkan stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)-	
						2.2. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan daerah.	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)	
			9. Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi		Penguatan kerjasama antar daerah (KAD) dan Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU)	8.2. Kerjasama dan investasi lintas kota/ kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi bersama.	unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur Sekretariat daerah (4.01)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
						8.3. Kerjasama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						8.4. Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur.		
	4. Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	10. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan inovasi pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan birokrasi	5.9. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (2.16) urusan pemerintahan bidang persandian (2.21)	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
11. Indeks Inovasi Daerah			Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah			Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan (5.05)	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
12. Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata			Penguatan Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data terpadu		5.5. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (OPD: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah)	urusan pemerintahan bidang statistik (2.20)	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			13. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif</b>								
Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan	1. Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	1. Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan ekonomi masyarakat	Penyaluran bantuan bagi warga akibat dampak Pandemi COVID-19	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	Urusan pemerintahan bidang sosial (1.06)	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	2. Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)				Fasilitasi akses masyarakat terhadap modal modal, modal uang, modal ketrampilan, teknologi, pasar, dan manajemen usaha	1.4. Meningkatkan Program Padat Karya Tunai terutama untuk korban PHK dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19	Urusan pemerintahan bidang sosial (1.06)	
	2. Rasio kawasan kumuh		1. Persentase Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) , penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar.	5.6. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda.	urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan (1.04)	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			2.Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan				urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan (1.04)	Program Penatagunaan Tanah
<b>Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</b>								

<b>MISI / TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM UNGGULAN</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM NOMENKLATUR</b>
Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini	Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi	7.1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda.	urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik (8.01)	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum				urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05)	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana	3. Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerjasama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan Covid-19	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

<b>MISI / TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM UNGGULAN</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM NOMENKLATUR</b>
			4. Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar		Koordinasi lintas sektor untuk penurunan risiko bencana	5.2. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan		1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Surakarta sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menetapkan 7 prioritas dan program prioritasnya yang disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4. 2 Prioritas Nasional dan Program Prioritas**

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,	PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

		PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku PP 7. Pembangunan Wilayah Papua
3	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda PP 6. Pengentasan Kemiskinan PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4	PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5	PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar PP 2. Infrastruktur Ekonomi PP 3. Infrastruktur Perkotaan PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan PP 5. Transformasi Digital
6	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim PP 3. Pembangunan Rendah Karbon
7	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 1. Konsolidasi Demokrasi PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri PP 3. Penegakan Hukum Nasional PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023**

No	Sasaran	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.3 – 5.9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5.3 - 6
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7.5 – 8.5
4	Rasio Gini (nilai)	0.376 – 0.378
5	IPM (nilai)	73.31 – 73.49
6	Penurunan Emisi GRK	27.02
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, tema RKP Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tujuh arah kebijakan RKP 2023 meliputi sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sasaran yang ingin dicapai yaitu sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu sistem Kesehatan, Pendidikan (sistem Pendidikan dan Pendidikan karakter)
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*. Sasaran yang dicapai adalah penyediaan lapangan usaha.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha. Sasaran yang ingin dicapai yaitu revitalisasi pariwisata, dan pengembangan UMKM
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu industrialisasi, riset dan inovasi.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim). Sasaran yang ingin dicapai yaitu ekonomi rendah karbon, dan transisi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas.
8. Pembangunan Ibu Kota Negara. Sasaran yang ingin dicapai yaitu fasilitas dasar di IKN.



**Gambar 4. 1 Delapan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023**

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 sebagai berikut. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- 2) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- 3) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 yang harus disinkronkan dengan pembangunan di kabupaten /kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimuat dalam Surat Edaran Nomor: 050/0017371 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya pada:

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di semua kabupaten/kota;
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting ;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, dimana kondisi kemiskinan ekstrem saat ini (4,4 persen) atau 1.527,60 ribu jiwa,
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Indikator makro yang menjadi sasaran RKPD provinsi jawa Tengah tahun 2023 adalah:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;

4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$  persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

#### **4.2.3 Pokok Pikiran DPRD**

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Surakarta merupakan aspirasi DPRD melalui pembahasan rapat masing-masing Komisi yang disinkronkan melalui Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi DPRD Kota Surakarta.

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023, maka dengan ini disampaikan Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Surakarta sebagai berikut:

##### **A. Bidang Hukum dan Pemerintahan**

1. Walikota dan Wakil Walikota mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota modern yang berbudaya;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi pembangunan wilayah Surakarta bagian utara;
3. Penegakan disiplin ASN dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang paralel dan konsisten;
4. Penegakan peraturan daerah, pembinaan sumber daya manusia serta peningkatan pemeliharaan infrastruktur jalan kampung serta penyediaan air bersih;
5. Pembinaan sumber daya manusia untuk usaha mikro kecil menengah.

##### **B. Bidang Perekonomian dan Keuangan**

1. Pengembangan potensi ekonomi mikro dan koperasi serta memberikan daya dukung kebijakan untuk memberikan kemudahan untuk berkembang seperti terkait peraturan, perijinan, permodalan, desain dan teknologi;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri/daerah serta menjamin ketersediaan barang serta membantu promosi dan

- distribusi barang produk daerah;
3. Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi tenaga kerja dan melakukan klasifikasi, serta mengoptimalkan pembukaan lapangan kerja yang seluas luasnya bagi masyarakat;
  4. Melakukan evaluasi dan perencanaan untuk pembangunan industri kota, peningkatan pajak, mengembangkan daya tarik wisata;
  5. Mengendalikan kesehatan hewan dan pengawasan obat, meningkatkan ketersediaan ikan dan usaha pengolahannya, peningkatan ketersediaan bahan pokok, melakukan pengawasan atas distribusi dan keamanan produk pangan;
  6. Peningkatan koordinasi, evaluasi, dan pengelolaan BUMD guna meningkatkan kinerja dan pendapatan BUMD;
  7. Monitoring, antisipasi operasi pasar terhadap kenaikan harga, mutu dan penyediaan bahan pokok.

### **C. Bidang Pembangunan**

1. Perencanaan pembangunan yang visioner serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan skala prioritas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pembangunan database kota dan e planning;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta melakukan pemeliharaan dan penataan yang terintegrasi;
3. Merencanakan pembangunan sistem transportasi umum yang terintegrasi, peningkatan penggunaan sarana transportasi umum, peningkatan sarana prasarana penunjang lalu lintas atau transportasi, optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perhubungan;
4. Mempercepat pembangunan kawasan konservasi alam, melakukan penghijauan, perluasan sarana resapan air dan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan sarana PJU, penataan lahan makam dan pengamanannya, optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana umum yang memadai;
6. Fasilitasi program pensertifikatan tanah, penataan kawasan kumuh, pendataan rumah tak layak huni, peningkatan program revitalisasi rumah tak layak dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,

- dan pemadam kebakaran, serta optimalisasi sumber daya manusia yang profesional, melakukan pemetaan dan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
8. Edukasi kepada masyarakat serta menerapkan standar keamanan guna mengurangi resiko bencana.

#### **D. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

1. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan nilai nilai budaya dan sastra jawa;
2. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran obat, peningkatan kewaspadaan dini terhadap wabah dan mengupayakan pencegahannya;
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap perijinan apotek, toko alat kesehatan dan sejenisnya;
4. Pengembangan potensi sumber daya daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial daerah serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok lainnya, pengelolaan data fakir miskin, serta terus melakukan edukasi dan pemberdayaan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap wanita dan anak/pencegahan tindak kekerasan;
6. Sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dan melakukan pengendalian atas distribusi alat atau obat KB dan peningkatan pelayanan keluarga berencana di daerah;
7. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan keolahragaan;
8. Pelestarian kesenian daerah, sejarah lokal, dan peningkatan perlindungan serta pelestarian cagar budaya daerah;
9. Peningkatan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyediaan jaringan dan internet bagi organisasi perangkat daerah yang memadai, dan meningkatkan pengelolaan domain;
10. Peningkatan layanan perpustakaan daerah, penyediaan informasi perpustakaan yang terpadu dan berbasis elektronik, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah;
11. Penyelenggaraan sistem kearsipan daerah berbasis teknologi informasi, serta melakukan pengelolaan penyimpanan dan pemusnahan arsip sesuai kaidah atau aturan yang ada dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola arsip.

#### 4.2.4 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2023

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Tema RKPD Tahun 2023 yaitu : **‘Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan Inovatif’**.

**Tabel 4. 4 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kota Surakarta 2023 dengan RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

<b>Tema RKP 2023</b>	<b>Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2023</b>
Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari	‘Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan Inovatif’

Secara teknokratis prioritas RKPD Kota Surakarta tahun 2023 disusun berdasar permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 2021 (sepaimana diuraikan dalam Bab II) dan Isu strategis daerah (sepaimana disajikan dalam Bab II). Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan isu strategis, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Kota Surakarta tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Pembangunan RKPD 2023</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan	Isu 4: Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh.	PD1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan	Pengelolaan infrastruktur kota yang sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata, pemajuan budaya, dan lingkungan sehat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan wilayah	berkelanjutan	Nasional;
2	Pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan berkenaan dengan masalah pokok faktor pembentuk pendapatan masyarakat, kemampuan pengeluaran masyarakat, dan produktivitas daerah.	Isu 3: Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan;	PD2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas;</li> <li>2. Pendampingan intensif startup, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja);</li> </ol>
3	Kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga	<p>Isu 2: Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh</p> <p>Isu 5: Pembangunan Kondusivitas Kota dan Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif.</p>	PD3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan daya saing tenaga kerja</li> <li>2. Perlindungan dan Pemberdayaan sosial ekonomi</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal</li> <li>4. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan untuk mempromosikan "Kota Budaya Sehat"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya untuk Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha</li> <li>2. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism;</li> <li>3. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;</li> </ol>

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Strategi	Arah Kebijakan
4	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan Kebinekaan.	<b>Isu 1:</b> Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal	PD4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan <i>smart city</i></li> <li>2. Penguatan kapasitas Fiskal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penertiban manajemen aset daerah</li> <li>3. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, dan kesiagaan mengantisipasi gangguan <i>trantibum</i> kepada seluruh lapisan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat;</li> <li>2. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern;</li> <li>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal;</li> <li>4. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan</li> </ol>

Prioritas RKPD Kota Surakarta tahun 2023 juga menjawab sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan. Keterkaitan sasaran daerah dan prioritas RKPD Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4. 6 Keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, program prioritas RKPD 2023**

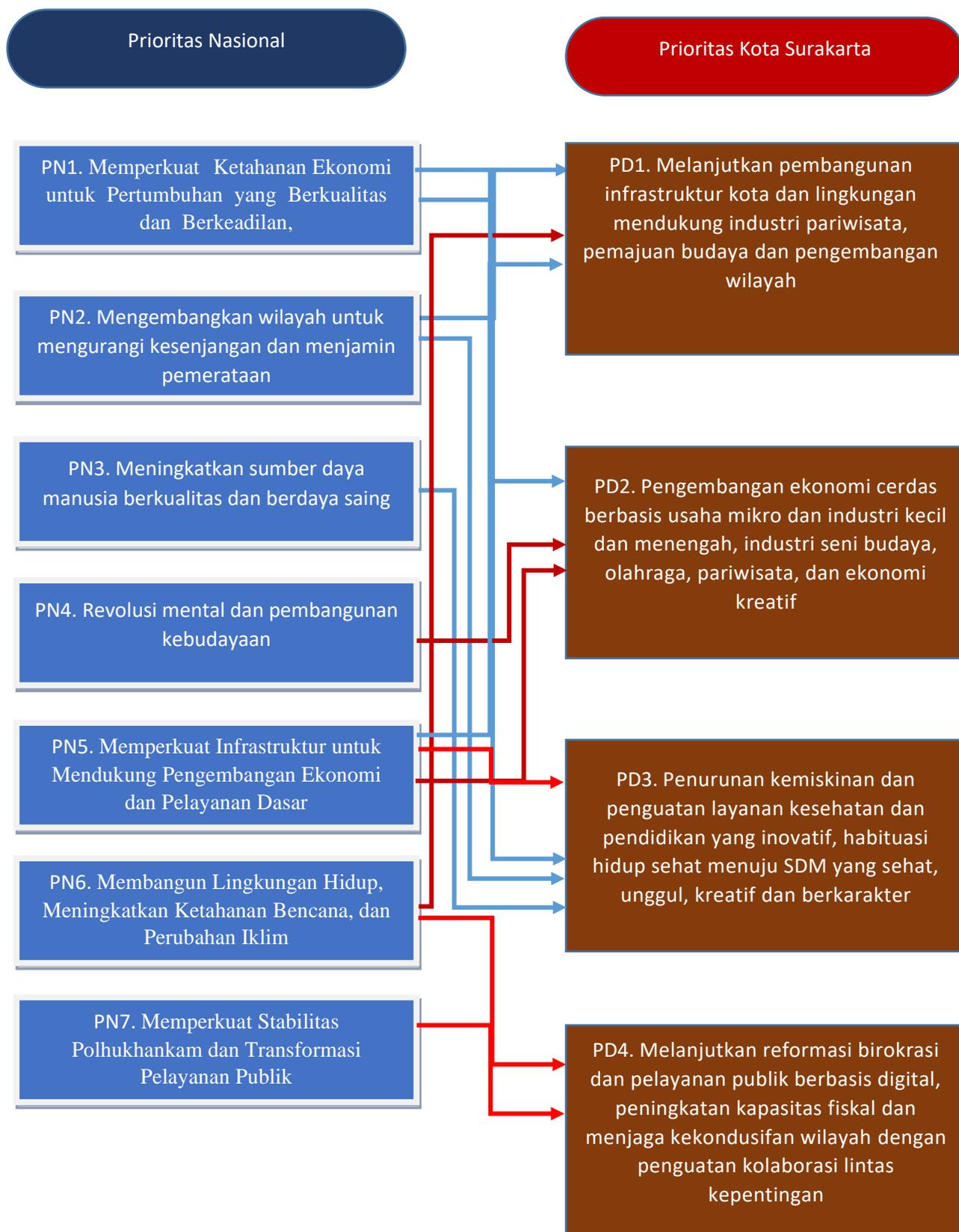
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Prioritas RKPD 2023	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
Meningkatnya derajat pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Prioritas RKPD 2023	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Prioritas 2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)		3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata
	3. Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM		2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	4. Persentase Pertumbuhan dan IKM		3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	5. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan		2.17.08 Program Pengembangan Umkm
	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	8. Persentase Peningkatan Investasi Daerah		2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik	Prioritas 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
	Cakupan Layanan Air Bersih		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>Prioritas RKPD 2023</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>
	Rasio Konektivitas		2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kualitas Udara</li> <li>- Indeks Kualitas Air</li> <li>- Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul>	Prioritas 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Terwujudnya masyarakat cerdas berkaracter unggul	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkaracter	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
			1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
			1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
	3. Nilai Literasi Masyarakat		2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Prioritas 2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	5. Persentase Pertumbuhan Pemuda Wirausaha		2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	6. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional / Internasional		2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	7. Persentase Partisipasi nasional/ internasional dalam even olahraga		
	8. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang		2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
			2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak
	9. Indeks Pemberdayaan gender (IDG)		2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

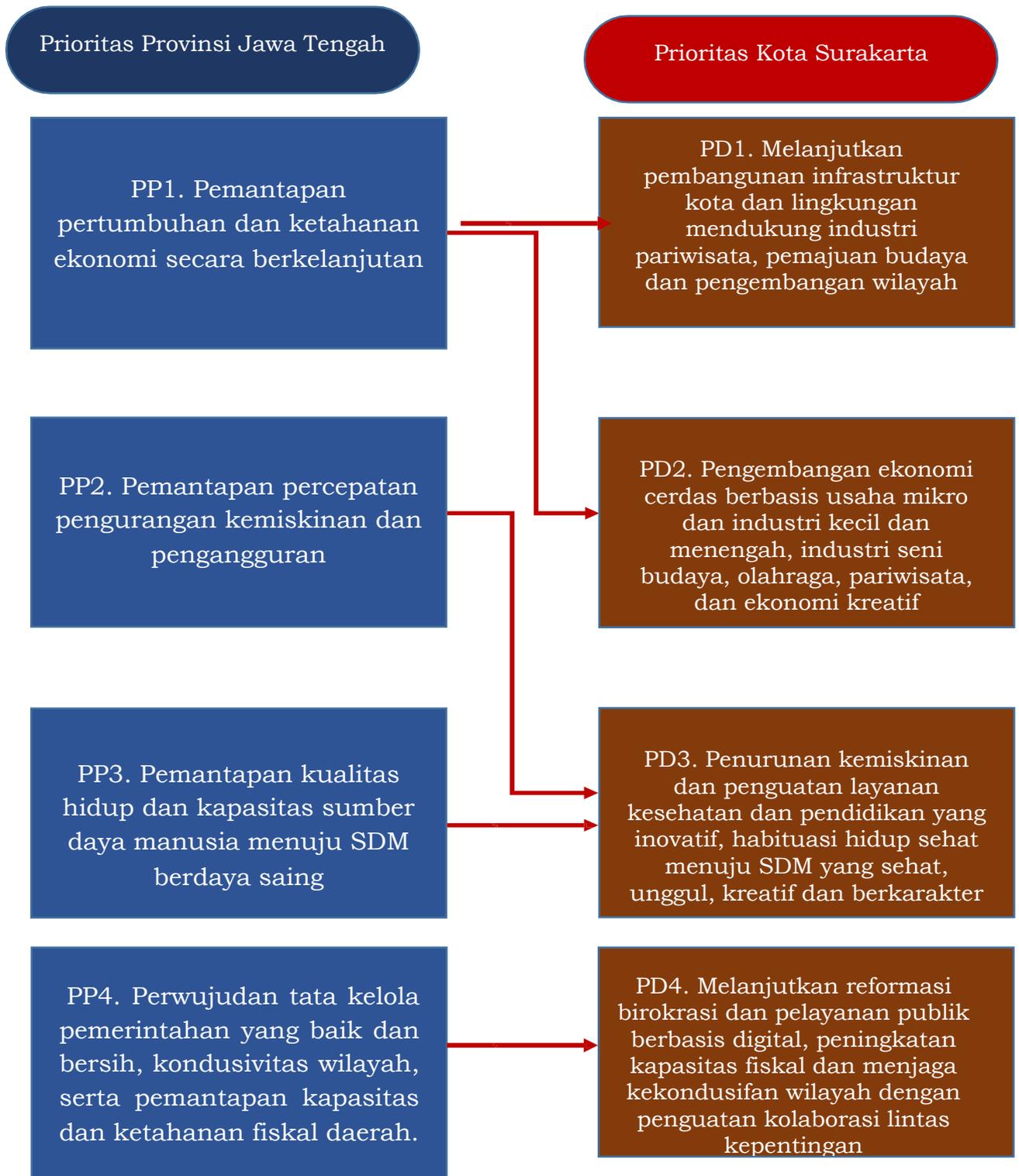
<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>Prioritas RKPD 2023</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>
	10. iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
Pembangunan karakter masyarakat dan Pemajuan kebudayaan	11. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional	Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan
			2.22.04 Program Pembinaan Sejarah
			2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan
			2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan
			2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	1. Indeks Merit	Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan.	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2. Maturitas Kelembagaan		4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan
	3. Indeks Manajemen Resiko		
	4. Indeks Persepsi Korupsi		6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan
	5. Nilai Pengawasan Arsip Eksternal		2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	6. Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan tema prioritas RKPD		4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	7. Persentase Keselarasan Program Dalam Renja Dengan Renstra		5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	8. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	9. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	10. Persentase kerjasama yang diimplementasikan pada tahun berikutnya		4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>Prioritas RKPD 2023</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	11. Indeks SPBE	Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan.	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	12. Indeks Inovasi Daerah		5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	13. Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata		2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	14. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani	Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Terwujudnya Lingkungan permukiman yang aman dan berkualitas	1. Persentase Rumah Layak Huni	Prioritas 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	2. Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan		Program Penatagunaan Tanah
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan.	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum		1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	3. Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
	4. Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar		1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



**Gambar 4. 2 Keterkaitan Prioritas Kota Surakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2023**

Keterkaitan antara prioritas Kota Surakarta dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tergambar sebagai berikut:



**Gambar 4. 3 Keterkaitan Prioritas Kota Surakarta dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Prioritas RKPD adalah instrumen yang mengarahkan supaya RKPD tahun 2023 fokus menangani isu strategis dan efektif mengeksekusi janji politik kepala daerah saat kampanye, yang dirumuskan dalam program unggulan daerah, serta mempertimbangkan pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari pendekatan politik perencanaan pembangunan.

Keterkaitan prioritas nasional, prioritas provinsi, prioritas dan fokus RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 dengan pendekatan politik Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2023 dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 4. 7 Prioritas dan Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

<b>Prioritas RKP 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021–2026</b>	<b>Prioritas Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Janji Politik Wali Kota</b>	<b>Pokok Pikirna Dewan</b>	<b>Fokus Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana</b>
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,	<b>Prioritas 1.</b> Pemanapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	<b>Misi 3:</b> Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan <b>Misi 6:</b> Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif	<b>Prioritas 1.</b> Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah.	- Tata ruang dan infrastruktur - Kerja sama Solo Raya	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta melakukan pemeliharaan dan penataan yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal, mencakup kawasan dan bangunan cagar budaya, kawasan strategis pariwisata, dan infrastruktur pusat pelayanan yang terintegrasi dengan daerah sekitar	Dinas PUPR
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						Peningkatan pemenuhan jaringan air bersih dan air limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Dinas PUPR
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim						Peningkatan sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan	- Dinas PUPR - Disperum KPP

<b>Prioritas RKP 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021-2026</b>	<b>Prioritas Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Janji Politik Wali Kota</b>	<b>Pokok Pikirna Dewan</b>	<b>Fokus Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana</b>
					Merencanakan pembangunan sistem transportasi umum yang terintegrasi, peningkatan penggunaan sarana transportasi umum, peningkatan sarana prasarana penunjang lalu lintas atau transportasi, optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perhubungan	Peningkatan sarana dan layanan transportasi publik di kawasan strategis yang terintegrasi antar wilayah Subosukawonosraten untuk menunjang aktivitas ekonomi, pariwisata budaya dan olahraga	Dinas Perhubungan
					Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta melakukan pemeliharaan dan penataan yang terintegrasi	Peningkatan pembangunan koridor dan penguatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur beridentitas budaya local	Dinas PUPR
					Mempercepat pembangunan kawasan konservasi alam, melakukan penghijauan, perluasan sarana resapan air dan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan	Peningkatan penataan kawasan RTH publik dan penguatan kerjasama daerah dalam pengelolaan sampah	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas RKP 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Janji Politik Wali Kota	Pokok Pikirna Dewan	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
					Fasilitasi program pensertifikatan tanah, penataan kawasan kumuh, pendataan rumah tak layak huni, peningkatan program revitalisasi rumah tak layak dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;	Penataan kawasan permukiman kumuh dan hunian liar, serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	DisperumKPP
						Peningkatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda	DisperumKPP
		<p><b>Misi 2:</b> Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</p> <p><b>Misi 4:</b> Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</p>	<p><b>Prioritas 2.</b> Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pariwisata dan industri kreatif</li> <li>- Bangkit dari pandemi Covid-19</li> <li>- Tata ruang dan infrastruktur</li> <li>- Pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan</li> </ul>	<p>Pengembangan potensi ekonomi mikro dan koperasi serta memberikan daya dukung kebijakan untuk memberikan kemudahan untuk berkembang seperti terkait peraturan, perijinan, permodalan, desain dan teknologi</p>	<p>Legalisasi, pendampingan intensif startup, peningkatan digitalisasi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian</p>
					Melakukan evaluasi dan perencanaan untuk pembangunan industri kota, peningkatan pajak, mengembangkan daya tarik wisata	Pengembangan kawasan wisata, jejaring dan kerjasama budaya dan pariwisata terpadu, dan sentra-sentra Industri Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas RKP 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Janji Politik Wali Kota	Pokok Pikirna Dewan	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
						Penguatan kerja sama daerah untuk meningkatkan <i>length of stay</i> (LoS) kunjungan ke Kota Surakarta.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kesehatan
					Pembinaan, pengembangan dan perlindungan nilai nilai budaya dan sastra jawa;	Peningkatan event pentas budaya tingkat nasional dan internasional untuk menunjang pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pengembangan potensi ekonomi mikro dan koperasi serta memberikan daya dukung kebijakan untuk memberikan kemudahan untuk berkembang seperti terkait peraturan, perijinan, permodalan, desain dan teknologi	Peningkatan revitalisasi pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan pengembangan wisata kuliner dan belanja	- Dinas Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Pengembangan kawasan perdagangan sebagai rintisan <i>Central Business District</i> (CBD) di wilayah Subosukawonosraten	Dinas Perdagangan

<b>Prioritas RKP 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021-2026</b>	<b>Prioritas Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Janji Politik Wali Kota</b>	<b>Pokok Pikirna Dewan</b>	<b>Fokus Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana</b>
						Penguatan kerjasama dalam perluasan akses pasar internasional bagi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan
						Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan penguatan kemitraan perusahaan besar dengan UMKM	- DPMPSTP - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
					Monitoring, antisipasi operasi pasar terhadap kenaikan harga, mutu dan penyediaan bahan pokok	Penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas RKP 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Janji Politik Wali Kota	Pokok Pikirna Dewan	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<b>Prioritas 2.</b> Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran  <b>Prioritas 3.</b> Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan</li> <li>- <b>Misi 4:</b> Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</li> <li>- <b>Misi 6:</b> Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prioritas 3.</b> Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan kesehatan</li> <li>- Investasi kebudayaan</li> <li>- Kepemudaan dan kesetaraan gender</li> <li>- Bangkit dari pandemi Covid-19</li> </ul>	Pengembangan potensi sumber daya daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial daerah serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok lainnya, pengelolaan data fakir miskin, serta terus melakukan edukasi dan pemberdayaan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;	Penguatan kerjasama dan jejaring sumber daya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas.	Dinas Sosial
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						Penguatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Kecamatan
					Peningkatan dan pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran obat, peningkatan kewaspadaan dini terhadap wabah dan mengupayakan pencegahannya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- DP3AP2KB</li> </ul>
						Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing	Dinas Pendidikan

<b>Prioritas RKP 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021-2026</b>	<b>Prioritas Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Janji Politik Wali Kota</b>	<b>Pokok Pikirna Dewan</b>	<b>Fokus Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana</b>
					Peningkatan layanan perpustakaan daerah, penyediaan informasi perpustakaan yang terpadu dan berbasis elektronik, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah	Peningkatan layanan perpustakaan digital untuk menunjang budaya literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengembangan potensi ekonomi mikro dan koperasi serta memberikan daya dukung kebijakan untuk memberikan kemudahan untuk berkembang seperti terkait peraturan, perijinan, permodalan, desain dan teknologi	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja dan wirausaha	Dinas Tenaga Kerja
					Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap wanita dan anak/pencegahan tindak kekerasan	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda wirausaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak	DP3AP2KB

Prioritas RKP 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Janji Politik Wali Kota	Pokok Pikirna Dewan	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas 4.</b> Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misi 5:</b> Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan</li> <li>- <b>Misi 7:</b> Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prioritas 4.</b> Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan</li> <li>- Investasi kebudayaan</li> <li>- Kerja sama Solo Raya</li> <li>- Tata ruang dan infrastruktur</li> <li>- Bangkit dari pandemi Covid-19</li> <li>- Kepemudaan dan kesetaraan gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyediaan jaringan dan internet bagi organisasi perangkat daerah yang memadai, dan meningkatkan pengelolaan domain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Bapenda</li> <li>- BPKAD</li> <li>- BKPSDM</li> </ul>
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana-prasarana teknologi informasi untuk menunjang smart city</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi pembangunan wilayah Surakarta bagian utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas fiskal dan penguatan tata kelola keuangan daerah.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan yang visioner serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan skala prioritas, meningkatkan peran serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan rencana pembangunan jangka panjang dan penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul>

<b>Prioritas RKP 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021-2026</b>	<b>Prioritas Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Janji Politik Wali Kota</b>	<b>Pokok Pikirna Dewan</b>	<b>Fokus Pembangunan Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Pelaksana</b>
					masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pembangunan database kota dan e-planning		
					Peningkatan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyediaan jaringan dan internet bagi organisasi perangkat daerah yang memadai, dan meningkatkan pengelolaan domain	Penguatan Iptek dan pengembangan inovasi untuk mendukung Solo Smart City	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Penyediaan data kependudukan untuk menunjang pembangunan berwawasan kependudukan		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Peningkatan pengelolaan Solo Satu Data untuk menunjang perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
				Peningkatan keamanan informasi untuk menunjang pelayanan publik		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
					Penyelenggaraan sistem kearsipan daerah berbasis teknologi informasi, serta melakukan pengelolaan penyimpanan dan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kearsipan sesuai dengan standar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas RKP 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Revisi RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Janji Politik Wali Kota	Pokok Pikirna Dewan	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
					pemusnahan arsip sesuai kaidah atau aturan yang ada dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola arsip		
					Penegakan peraturan daerah, pembinaan sumber daya manusia serta peningkatan pemeliharaan infrastruktur jalan kampung serta penyediaan air bersih	Peningkatan penegakan regulasi daerah untuk menjaga kekondusifan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol</li> <li>- Damkar</li> <li>- BPBD</li> </ul>
					Perencanaan pembangunan yang visioner serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan skala prioritas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pembangunan database kota dan e planning	Dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakesbangpol</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul>

Tema dan prioritas Kota Surakarta yang telah dirumuskan digunakan untuk mencapai sasaran makro pembangunan Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD untuk tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, target nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Persandingan sasaran makro Kota Surakarta dengan sasaran makro RKP dan RKPD Provinsi Jateng adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Persandingan Sasaran Makro RKP, RKPD Prov. Jateng dan RKPD Kota Surakarta tahun 2023**

<b>Sasaran Makro</b>	<b>RKP</b>	<b>RKPD Prov. Jateng</b>	<b>RKPD Kota Surakarta</b>
Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,9	5,0 - 5,6	5,48
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	9,51 - 9,29	7,89
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31 - 73,49	72,75	96,87
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,63 - 4,80	6,2

*Sumber: RKP Tahun 2023, SE.Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Prov. Jateng Tahun 2023.*

**Tabel 4. 9 Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
<b>Prioritas 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah.</b>				
Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal, mencakup kawasan dan bangunan cagar budaya, kawasan strategis pariwisata, dan infrastruktur pusat pelayanan yang terintegrasi dengan daerah sekitar	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	%	39,00
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	36
Peningkatan pembangunan koridor dan penguatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	91,25
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	92,2
Peningkatan pemenuhan jaringan air bersih dan air limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
Peningkatan sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	100
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	97,62
Peningkatan sarana dan layanan transportasi publik di kawasan strategis yang terintegrasi antar wilayah Subosukawonosraten untuk menunjang aktivitas ekonomi, pariwisata budaya dan olahraga	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	Angka	0,7

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
Peningkatan penataan kawasan RTH publik dan penguatan kerjasama daerah dalam pengelolaan sampah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	76,14
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	88,00
		Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	66,00
Penataan kawasan permukiman kumuh dan hunian liar, serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	36,51
Peningkatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	89,18
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100
<b>Prioritas 2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif</b>				
Legalisasi, pendampingan intensif startup, peningkatan digitalisasi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	3,35
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	3,00
Pengembangan kawasan wisata, jejaring dan kerjasama budaya dan pariwisata terpadu, dan sentra-sentra Industri Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	2.14%

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	81%
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	89
Penguatan kerja sama daerah untuk meningkatkan <i>length of stay (LoS/lama tinggal)</i> kunjungan ke Kota Surakarta.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	5
Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	5
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	5
		Tingkat hunian akomodasi	%	30
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	50,70
		Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	%	95,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan Puskesmas	%	22,22
Peningkatan event pentas budaya tingkat nasional dan internasional untuk menunjang pariwisata	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	73,86
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	100
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan gelar seni budaya	%	100

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
Peningkatan revitalisasi pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan pengembangan wisata kuliner dan belanja	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	84,09
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	5%
Pengembangan kawasan perdagangan sebagai rintisan <i>Central Business District</i> (CBD) di wilayah Subosukawonosraten				
Penguatan kerjasama dalam perluasan akses pasar internasional bagi Usaha Keci-l dan Menengah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	US\$	45.758.9 19,32
Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan penguatan kemitraan perusahaan besar dengan UMKM	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	98,29
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%	100
Penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	11,11
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi perkapita	Kilo Kalori/ Kapita/ hari	2.065,60
		Konsumsi protein perkapita	Gram/ kapita/ hari	57
		Angka Ketersediaan Energi	Kilo Kalori/k apita/ Hari	2.550

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
		Angka Ketersediaan Protein	Gram/ kapita/ hari	71,7
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	204
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	Kwintal/ Hektar	64
		Produktivitas hortikultura	Kwintal/ Hektar	7,67
		Populasi ternak	Ekor	40.155
<b>Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter</b>				
Penguatan kerjasama dan jejaring sumber daya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	70,91
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100
Penguatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	94
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	85,50
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,20
		Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	28,25

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	92
		Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100
		Persentase Kelurahan STBM	%	90
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
		Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,20
		Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	94,00
		Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	75
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100
		Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	%	98,20
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	95,25
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	100
	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,03
		Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	Angka	1,79

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	69,9
		Unmetneed	Angka	9,5
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100
		cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	2,9
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK 3-6 Tahun	%	63,86
		APS 7-12 Tahun	%	99,31
		APS 13-15 Tahun	%	98,36
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,91
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	%	87,48
Peningkatan layanan perpustakaan digital untuk menunjang budaya literasi masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2
Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja dan wirausaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	20
Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda wirausaha	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,614

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan	%	6,2
Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,78
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tercapainya pemenuhan hak anak (PHA)	%	100
<b>Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah</b>				
Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	75
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	53
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,75

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	%	100
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	Angka	82
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	100
		Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%	100
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang diimplementasikan pada tahun berikutnya	%	96
Peningkatan sarana-prasarana teknologi informasi untuk menunjang <i>smart city</i>	Program Aplikasi Informatika	% OPD yang memiliki aplikasi informatika Terintegrasi	%	88,57
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas fiskal dan penguatan tata kelola keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%	100
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	6,1
Penyiapan rencana pembangunan jangka panjang dan penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.	Program Unsur Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	80
Penguatan Iptek dan pengembangan inovasi untuk mendukung Solo <i>Smart City</i>	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	21,05

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
		Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	10
Penyediaan data kependudukan untuk menunjang pembangunan berwawasan kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100
		Persentase database yang valid dan update	%	100
Peningkatan pengelolaan Solo Satu Data untuk menunjang perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
Peningkatan keamanan informasi untuk menunjang pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2+
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kearsipan sesuai dengan standar	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	15
Peningkatan penegakan regulasi daerah untuk menjaga kekondusifan wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	%	89,00
		Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	%	1,425
		Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	20,00
		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	96,10

<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
Dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	35,00

#### **4.2.5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Kunci percepatan penanggulangan kemiskinan terletak pada peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, baik program nasional maupun program daerah. Ini dapat dicapai jika fungsi-fungsi koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program program tersebut dijalankan secara lebih baik di setiap daerah. Strategi umum penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta merujuk pada Perpres No. 15 Tahun 2010, memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Selain itu, dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 telah mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai mitra Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat.

Salah satu fungsi TKPK dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah terkait. Dalam kendali TKPK, pemantauan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait diharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Dengan demikian TKPK dapat berperan membantu perbaikan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Di samping itu, hasil pemantauan dapat berguna bagi daerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan.

TKPK diharapkan dapat memainkan peran ganda, yaitu memfasilitasi pemihakan program dan anggaran daerah pada tujuan penanggulangan kemiskinan; dan memfasilitasi perolehan informasi umpan-balik untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta, meliputi:

**Strategi 1.** Perluasan Cakupan Program Perlindungan Sosial, dengan arah kebijakan pemulihan sosial ekonomi untuk melindungi

masyarakat miskin dan rentan maupun keberlanjutan UMKM dengan memperluas program perlindungan sosial, serta jaring pengaman sosial penanganan COVID-19,

**Strategi 2.** Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi menuju Normal Pasca Pandemi COVID-19, dengan arah kebijakan reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, dan reformasi pemenuhan infrastruktur dasar, serta reformasi perlindungan sosial dan subsidi.

**Strategi 3.** Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan, dengan arah kebijakan reformasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam rangka peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

**Strategi 4.** Percepatan Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan arah kebijakan reformasi tata kelola data kemiskinan Kota Surakarta.

### **4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Terpadu**

#### **4.3.1 Tantangan Pembangunan Wilayah Kota Surakarta**

Kota Surakarta dahulunya merupakan pusat pemerintahan Keraton Mataram. Secara penanggalan, hari jadi Kota Surakarta adalah Tanggal 17 Februari 1745. Tanggal ini merupakan pemindahan pusat pemerintahan Keraton Mataram dari Kartasura ke Desa Sala oleh Paku Buwono (PB) II. Kronologis Surakarta pasca terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia adalah:

a. Daerah Istimewa Surakarta

Pasca kemerdekaan, Solo berstatus sebagai daerah setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

b. Karesidenan Surakarta

Pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan Daerah Istimewa Surakarta, Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karesidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) dengan luas daerah 5.677 km<sup>2</sup>. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (sekarang bernama Kabupaten Sragen), Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali..

c. Kota Surakarta

Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli

1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara resmi Kota Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom, sebagaimana Kota Surakarta saat ini.

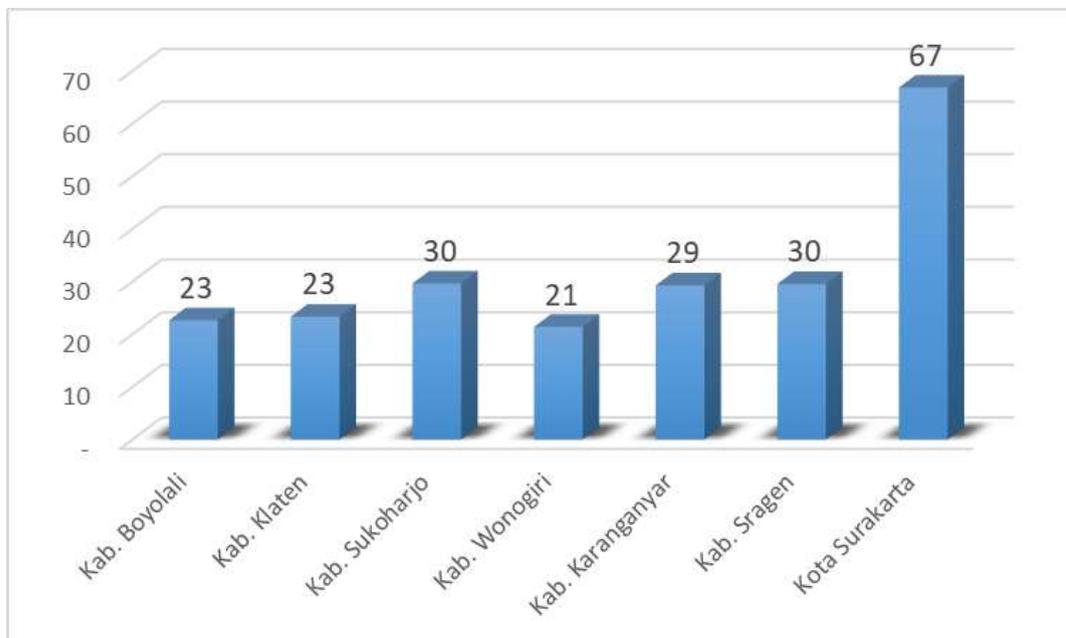
Kota Surakarta memiliki luas administrasi 4672 Ha, termasuk luasan yang kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada disekitarnya. Luas Kota Surakarta hanya 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah (Luas Provinsi Jawa Tengah 3.880.069 Ha), sedangkan dalam lingkup kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN luas Kota Surakarta hanya 1% dari luas Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN.

**Tabel 4. 10 Perbandingan Luas Kota Kota Surakarta dengan Kabupaten Disekitarnya (Kawasan SUBOSUKA WONOSTRATEN)**

NO	KOTA	LUAS (Ha)	%
1	Kab. Boyolali	100.845	18%
2	Kab. Klaten	65.822	12%
3	Kab. Sukoharjo	48.912	9%
4	Kab. Wonogiri	179.367	31%
5	Kab. Karanganyar	77.544	14%
6	Kab. Sragen	94.154	16%
7	Kota Surakarta	4.672	1%
<b>LUAS</b>		<b>571.316</b>	<b>100%</b>

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021

Walaupun memiliki luas wilayah yang kecil, Kota Surakarta merupakan daerah perkotaan yang memiliki peranan penting bagi perkembangan Kabupaten yang ada disekitarnya. Dalam hal ekonomi terdapat 4 (empat) sektor yang memiliki kontribusi dominan dalam PDRB Kota Surakarta yaitu Jasa, Kontruksi, dan Perdagangan. Dalam lingkup kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN, Kota Surakarta memiliki PDRB perkapita paling tinggi, yaitu Rp. 67 juta/ jiwa, berikut disampaikan komposisi PDRB perkapita di kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN



Sumber: Hasil olahan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021

**Gambar 4. 4 PDRB Perkapita di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN (Berdasarkan Harga Konstan)**

Sedangkan jika dibandingkan dengan daerah Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, nilai PDRB perkapita Kota Surakarta tertinggi nomor 2 (dua) setelah Kota Semarang.

Secara kewilayahan perkembangan “permukiman perkotaan Surakarta” telah keluar dari batas administrasi Kota Surakarta. Perkembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta telah menyatu. Bahkan berdasarkan kajian RP3KP Kota Surakarta yang dilakukan pada tahun 2021, jumlah penduduk “permukiman perkotaan Surakarta” telah mencapai 1.089.666 jiwa, Mengacu pada pengertian dalam PP 13/2017 tentang RTRW Nasional, bahwa perkotaan yang memiliki jumlah penduduk >1 juta dikategorikan sebagai metropolitan.



**Gambar 4. 5 Perkembangan Kota Surakarta dan Daerah Sekitarnya telah Membentuk Menjadi Kawasan Metropolitan**

Pada tahun 2021, Kota Surakarta memiliki kepadatan 112 jiwa/ ha, angka ini merupakan kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan dalam lingkup nasional Kota Surakarta menempati Kota Besar terpadat Nomor 4. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepadatan penduduk antar Kota Besar di Indonesia, meka di bawah ini disajikan data perbandingan jumlah dan kepadatan penduduk di beberapa Kota Besar di Indonesia.

**Tabel 4. 11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Besar di Indonesia**

NO	KOTA	LUAS (Ha)	KEPADATAN (jiwa/ Ha)
1	DKI Jakarta	66.415	160
2	Kota Bandung	16.767	150
3	Yogyakarta	3.250	134
<b>4</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>4.672</b>	<b>112</b>
5	Kota Surabaya	35.064	82
6	Kota Makassar	19.926	78
7	Kota Semarang	37.378	44
8	Kota Medan	26.500	44

Sumber: Hasil olahan Data BPS DKI Jakarta, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, Prov DIY, Prov Jawa Timur, Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021

Dalam pembangunan internal Kota, saat ini Kota Surakarta dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk pembangunan Kota. Berdasarkan tata guna tanah eksisting (update tahun 2020), di ketahui bahwa luas kawasan yang sudah terbangun di Kota Surakarta sudah mencapai 4178 Ha (89,42%) dan sisanya yang berupa area terbuka yang berupa jalan, sungai, RTH, dan tanah pertanian seluas 494 Ha. Berikut ini hasil luas penggunaan tanah eksisting di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran peta (Tabel 4.6).

**Tabel 4. 12 Komposisi Penggunaan Tanah Kota Surakarta**

NO	KAWASAN	LUAS (HA)	%
<b>A.</b>	<b>RUANG TERBUKA HIJAU</b>		
1	Taman	50,24	1,08%
2	Hutan Kota	40,19	0,86%
3	Kebun Binatang	8,08	0,17%
4	Lapangan Olahraga	32,96	0,71%
5	Makam	77,58	1,66%
	<b>Jumlah A</b>	<b>209,05</b>	<b>4,48%</b>
<b>B.</b>	<b>PSU</b>		
1	Sungai	66,14	1,42%
2	Badan jalan	52,44	1,12%
3	Pulau Jalan	0,60	0,01%
	<b>Jumlah B</b>	<b>119,18</b>	<b>2,55%</b>
<b>C.</b>	<b>PERMUKIMAN</b>		
1	Fasilitas kesehatan	44,41	0,95%
2	Fasilitas olahraga	5,39	0,12%
3	Fasilitas Pendidikan	269,67	5,77%
4	Fasilitas peribadatan	20,62	0,44%
5	Fasilitas sosial	0,74	0,02%
6	Fasilitas transportasi	38,07	0,81%
7	Gardu induk	3,36	0,07%
8	Industri	99,44	2,13%
9	Pariwisata dan hiburan	16,80	0,36%
10	Perdagangan dan jasa	724,60	15,51%
11	Perkantoran Pemerintah	47,27	1,01%
12	Perumahan	2874,88	61,53%
13	Pertahanan dan keamanan	12,86	0,28%
14	IPAL	1,46	0,03%

NO	KAWASAN	LUAS (HA)	%
15	TPA	18,24	0,39%
	<b>Jumlah C</b>	<b>4177,81</b>	<b>89,42%</b>
<b>D.</b>	<b>SAWAH &amp; TANAH KOSONG</b>		
1	Sawah Irigasi	15,47	0,33%
2	Sawah setengah teknis	37,30	0,80%
3	Sawah tadah hujan	10,60	0,23%
4	Tegalan	85,09	1,82%
5	Tanah kosong	17,87	0,38%
	<b>Jumlah D</b>	<b>166,33</b>	<b>3,56%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4672,37</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: Hasil pengolahan peta tata guna Tanah eksisting 2020

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dalam kajian RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041, disimpulkan bahwa tantangan pembangunan wilayah Kota Surakarta adalah:

- a. Penyinerjian pembangunan Kota Surakarta dengan pengembangan Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN.
- b. Keterbatasan Ruang dan Lahan melalui pemanfaatan ruang yang efisien dan produktif
- c. Peningkatan investasi.
- d. Pengembangan ruang yang beridentitas budaya.
- e. Perwujudan tata ruang yang tertib melalui pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian Pemanfaatan ruang.
- f. Perwujudan ruang yang berkualitas, melalui pengembangan lingkungan permukiman perkotaan yang layak huni (livable) dan perwujudan RTH publik sebesar 20% dari luas Kota.
- g. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan Rencana Pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan dan tujuan penataan ruang.

#### **4.3.2 Arah Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041 (Tujuan, Kebijakan, dan Strategi)**

Kota Surakarta dalam penataan ruang wilayah nasional<sup>1</sup> ditetapkan sebagai **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**<sup>2</sup> dan menjadi bagian dari **kawasan andalan**<sup>3</sup> SUBOSUKAWONOSRATEN (Kawasan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten).

Arah penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 tertuang

dalam tujuan penataan Kota Surakarta, yaitu: “memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi:

- a. kebijakan penataan ruang Kota Surakarta meliputi:
  - 1) pemantapan peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
  - 2) pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;
  - 3) pengembangan Kota sebagai pusat Kawasan Andalan Subosukawonosraten;
  - 4) pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar; dan
  - 5) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
  - 6) peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
  - 7) pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
  - 8) peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
  - 9) peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
  - 10) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Dalam rangka melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota dirumuskan strategi penataan ruang Kota sebagai berikut:
  - 1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemantapan peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional meliputi:
    - a) mendorong kemudahan akses kegiatan skala nasional;
    - b) mendorong mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung Kota sebagai pintu gerbang nasional dan internasional;
  - 2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif meliputi:
    - a) mengidentifikasi dan menata kegiatan usaha industri kreatif di wilayah Kota;

---

<sup>1</sup> PP 13/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

<sup>2</sup> PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

<sup>3</sup> Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Sektor unggulan yang ditetapkan di Kawasan andalan Subosuka Wonosraten adalah Industri, pariwisata, pertanian, dan panas bumi.

- b) mengembangkan ruang pameran yang terintegrasi dengan pengembangan pusat pelayanan; dan
  - c) meningkatkan fungsi pasar tradisional dan pasar modern sebagai etalase pemasaran industri kreatif sehingga mempunyai pelayanan dan akses pemasaran skala nasional.
- 3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kota sebagai pusat Kawasan Andalan Subosukawonosraten, dilakukan melalui strategi:
- a) meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan
  - b) meningkatkan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran dengan daerah sekitar.
- 4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar dilakukan melalui strategi:
- a) mengembangkan sub pusat pelayanan Kota yang mampu melayani wilayah internal Kota dan daerah sekitar; dan
  - b) mengembangkan sistem kawasan berorientasi transit (TOD) meliputi pembangunan dan pengembangan terminal/stasiun antar moda pada PUsat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat pelayanan Kota (SPK).
- 5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana meliputi:
- a) meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;
  - b) meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi;
  - c) meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
  - d) meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
  - e) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum ;
  - f) meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
  - g) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan
  - h) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.
- 6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung meliputi:
- a) menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung;
  - b) melestarikan kawasan cagar budaya; dan
  - c) mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka

- hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.
- 7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan meliputi:
    - a) mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - b) mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi;
    - c) mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;
    - d) mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.
  - 8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota meliputi:
    - a) menetapkan kawasan strategis Kota; dan
    - b) meningkatkan pengelolaan kawasan strategis Kota.
  - 9) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi:
    - a) mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
    - b) mengintegrasikan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan
    - c) mendorong perwujudan kota tangguh bencana.
  - 10) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
    - a) mewujudkan arahan peraturan zonasi yang dinamis yang mampu mengarahkan pemanfaatan di kawasan lindung dan budidaya;
    - b) meningkatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    - c) mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
    - d) meningkatkan pemahaman adanya sanksi dalam setiap pelanggaran penataan ruang.

#### **4.3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 88 Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, bahwa kebijakan pengembangan wilayah Kota Surakarta adalah:

- a. Peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten, dilakukan melalui:

- 1) peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan
  - 2) peningkatan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran masing-masing daerah dalam Kawasan Subosukawonosraten.
- b. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- 1) pengembangan SPK yang mampu melayani wilayah internal Daerah dan daerah sekitar; dan
  - 2) pengembangan TOD di kawasan PPK dan kawasan SPK.
- c. Pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- 1) pengembangan Daerah bagian Selatan melalui pendekatan:
    - a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan keunikan lokal, tradisi, dan budaya;
    - b) peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan pelestarian cagar budaya; dan
    - c) peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan.
  - 2) pengembangan perekonomian Daerah bagian Utara melalui:
    - a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan
    - b) peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern.
- d. Pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- 1) pengembangan wisata sejarah Keraton Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran beserta peninggalannya;
  - 2) peningkatan pengelolaan atraksi tradisi budaya dalam sistem ekonomi kepariwisataan;
  - 3) pengembangan wisata pasar tradisional;
  - 4) pengembangan kawasan kuliner yang mengedepankan keunikan dan kekhasan Daerah;
  - 5) mengembangkan moda wisata transportasi jalan raya, kereta api, dan sungai; dan

- 6) pengembangan ruang terbuka publik untuk mendukung atraksi dan kreasi seni masyarakat.

#### **4.3.4 Prioritas Program Pengembangan Wilayah Kota Surakarta**

Perumusan prioritas pengembangan wilayah Kota Surakarta dilakukan dengan menyinergikan arahahan yang tertuang dalam Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 dengan Perda 6/2021 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Dari hasil penyandingan kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 13 Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Perda 4/2021 Tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041, Dan Perda 6/2021 Tentang RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, serta Penentuan Arahan Program Prioritas**

<p align="center"><b>ARAHAN RTRW (PERDA 4/2021 TENTANG RTRW KOTA SURAKARTA 2021-2041)</b></p>	<p align="center"><b>ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD (PERDA 6/2021 TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026)</b></p>	<p align="center"><b>ANALISIS KORELASI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RTRW DAN RPJMD KOTA SURAKARTA</b></p>	<p align="center"><b>ARAHAN PROGRAM PRIORITAS</b></p>
<p align="center">Pasal 88</p> <p>(1) Kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten;</li> <li>b. pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar;</li> <li>c. pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah; dan</li> <li>d. pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya.</li> </ol> <p>(2) Peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan</li> </ol>	<p><b><u>Dokumen RPJMD, Halaman VI-83</u></b></p> <p>Dari hasil penjabaran visi-misi Kepala Daerah dan Konstelasi Kebijakan terkait, maka Strategi Pengembangan Wilayah Kota Surakarta dalam mewujudkan visi misi Walikota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>);</li> <li>2. Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa, meliputi pasar tradisional, sektor ekonomi informal, dan creative hub;</li> <li>3. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur kota untuk mendukung pariwisata;</li> <li>4. Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan, transportasi publik, dan</li> </ol>	<p>Dari hasil penyandingan kebijakan pengembangan wilayah yang ada dalam RTRW Kota Surakarta 2021-2041 dengan RPJMD Kota Surakarta, terdapat korelasi yang saling menguatkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW khususnya pada aspek peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten, dan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar, selaras dengan kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan</li> </ul> </li> </ol>	<p>Mempertimbangkan arahan RTRW dan RPJMD, maka beberapa prioritas program pengembangan wilayah perlu dilakukan ditahun 2023 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian pengembangan dan strategi interkoneksi kawasan Pusat dan Sub Pusat Pelayanan; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan Kawasan Pusat Kota;</li> <li>▪ Penataan Kawasan Simpang Tujuh Joglo;</li> <li>▪ Penataan kawasan Purwosari;</li> <li>▪ Penataan Kawasan Jebres;</li> <li>▪ Penataan Kawasan Gading;</li> </ul> </li> <li>2. Pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Taman Wisata Jurug menjadi Destinasi wisata Nasional.</li> <li>▪ Pengembangan Taman Balekambang sebagai pusat budaya Nasional.</li> <li>▪ Pembangunan Fasilitas</li> </ul> </li> </ol>

<p align="center"><b>ARAHAN RTRW (PERDA 4/2021 TENTANG RTRW KOTA SURAKARTA 2021-2041)</b></p>	<p align="center"><b>ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD (PERDA 6/2021 TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026)</b></p>	<p align="center"><b>ANALISIS KORELASI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RTRW DAN RPJMD KOTA SURAKARTA</b></p>	<p align="center"><b>ARAHAN PROGRAM PRIORITAS</b></p>
<p>b. peningkatan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran masing-masing daerah dalam Kawasan Subosukawonosraten.</p> <p>(3) Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan SPK yang mampu melayani wilayah internal Daerah dan daerah sekitar; dan</p> <p>b. pengembangan TOD di kawasan PPK dan kawasan SPK.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan Daerah bagian Selatan melalui pendekatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan keunikan lokal, tradisi, dan budaya;</li> <li>2. peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan pelestarian cagar budaya; dan</li> <li>3. peningkatan prasarana, sarana,</li> </ol>	<p>konektivitas Kawasan secara lokal, nasional maupun internasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemerataan infrastruktur Surakarta bagian utara;</li> <li>6. Peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar;</li> <li>7. Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemukiman liar;</li> <li>8. Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat dengan konsep Green City;</li> <li>9. Peningkatan sistem pelayanan publik yang cerdas (Smart City) dan penguasaan Teknologi Informasi; media informasi, komunikasi di era digital; dan</li> <li>10. Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata.</li> </ol>	<p>dengan daerah sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata</li> </ul> <p>b. pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah, selaras dengan kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan, transportasi publik, dan konektivitas Kawasan secara lokal, nasional maupun internasional;</li> <li>▪ Pemerataan infrastruktur Surakarta bagian utara;</li> <li>▪ Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemukiman liar;</li> </ul>	<p>Islamic Centre berskala Nasional (Kompleks Masjid Syekh Zayed).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revitalisasi Lokananta sebagai pusat kreasi seniman.</li> <li>▪ Penataan kawasan perdagangan yang bercorak budaya</li> <li>▪ Pelaksanaan event budaya berskala nasional/ internasional.</li> </ul> <p>3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program penanganan dan peningkatan kawasan kumuh dan RTLH;</li> <li>▪ Pembangunan dan peningkatan RUSUN untuk menangani backlog;</li> <li>▪ Kerjasama antar daerah untuk menangani permasalahan permukiman di kawasan perbatasan;</li> <li>▪ Peningkatan jalan kota dan jalan lingkungan;</li> <li>▪ Peningkatan sanitasi kota (peningkatan pengelolaan sampah, air minum, drainase, dan limbah)</li> <li>▪ Pengembangan fasilitas</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>ARAHAN RTRW (PERDA 4/2021 TENTANG RTRW KOTA SURAKARTA 2021-2041)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD (PERDA 6/2021 TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ANALISIS KORELASI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RTRW DAN RPJMD KOTA SURAKARTA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ARAHAN PROGRAM PRIORITAS</b></p>
<p>dan utilitas permukiman perkotaan.</p> <p>b. pengembangan perekonomian Daerah bagian Utara melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan</li> <li>2. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern.</li> </ol> <p>(5) Pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan wisata sejarah Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran beserta peninggalannya;</li> <li>b. peningkatan pengelolaan atraksi tradisi budaya dalam sistem ekonomi kepariwisataan;</li> <li>c. pengembangan wisata pasar tradisional;</li> <li>d. pengembangan kawasan kuliner yang mengedepankan keunikan dan</li> </ol>	<p><b><u>Dokumen RPJMD, Halaman VI-90</u></b></p> <p>Dengan kondisi seperti itu maka arah pengembangan wilayah Kota Surakarta tahun 2021–2026 ke depan lebih diarahkan pada kawasan peruntukan perdagangan, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Budidaya tahun 2021–2026 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai budaya dan Pariwisata;</li> <li>b. Mengembangkan sentra-sentra Industri Kreatif yang mendukung perwujudan ruang-ruang kreatif Kota;</li> <li>c. Mengembangkan Kegiatan-kegiatan wisata tematik pada pusat-pusat aktivitas kerja sama dengan swasta (sport tourism dan wellness tourism);</li> <li>d. Mewujudkan perwujudan ruang yang berkualitas dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat dengan konsep Green City;</li> <li>▪ Peningkatan sistem pelayanan publik yang cerdas (Smart City) dan penguasaan Teknologi Informasi; media informasi, komunikasi di era digital; dan</li> </ul> <p>c. pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya, selaras dengan kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (eco socio tourism);</li> <li>▪ Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa, meliputi pasar</li> </ul>	<p>pelayanan di Kawasan Perbatasan Kota Surakarta;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan sistem pelayanan publik yang cerdas (Smart City) dan penguasaan Teknologi Informasi; media informasi, komunikasi di era digital <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revitaliasi Teknopark sebagai pusat pengembangan teknologi nasional.</li> <li>▪ Pengembangan sistem pengelolaan prasarana – sarana kota berbasis on-line (melalui pengaduan dan pelaporan penanganan).</li> <li>▪ Pengembangan peningkatan pelayanan sistem transportasi public.</li> </ul> </li> <li>5. Perwujudan Kota Hijau (<i>Green City</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Masterplan RTH (roadmap menuju RTH Publik 20%)</li> <li>▪ Program pengadaan tanah untuk pembangunan RTH</li> <li>▪ Program peningkatan taman lingkungan</li> <li>▪ Revitalisasi taman menjadi taman tematik</li> </ul> </li> <li>6. Pengembangan kerja sama</li> </ol>

<b>ARAHAN RTRW (PERDA 4/2021 TENTANG RTRW KOTA SURAKARTA 2021-2041)</b>	<b>ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD (PERDA 6/2021 TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA 2021-2026)</b>	<b>ANALISIS KORELASI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH RTRW DAN RPJMD KOTA SURAKARTA</b>	<b>ARAHAN PROGRAM PRIORITAS</b>
kekhasan Daerah; e. mengembangkan moda wisata transportasi jalan raya, kereta api, dan sungai; dan f. pengembangan ruang terbuka publik untuk mendukung atraksi dan kreasi seni masyarakat.	produktif (Creative hub, pasar tradisional, Penataan Sektor informal kota); e. Pengembangan Kawasan Solo Utara; f. Strategi peningkatan keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan dengan daerah sekitar;	tradisional, sektor ekonomi informal, dan creative hub; ▪ Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur kota untuk mendukung pariwisata;	antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata.

Mempertimbangkan arahan program prioritas, selanjutnya dirumuskan kegiatan pengembangan wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4. 14 Kegiatan Pengembangan Wilayah**

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
1	Kajian pengembangan dan strategi interkoneksi kawasan Pusat dan Sub Pusat Pelayanan;					
	▪ Penataan Kawasan Pusat Kota	Penyusunan RTBL Kawasan Karaton dan Kasunanan sekitarnya				
	▪ Penataan Kawasan Simpang Tujuh Joglo;				Penyusunan RTBL Kawasan Simpang Tujuh Joglo	
	▪ Penataan kawasan Purwosari;			Penyusunan RTBL Kawasan Purwosari		

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan Kawasan Jebres;</li> </ul>					Penyusunan RTBL Kawasan Jebres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan Kawasan Gading;</li> </ul>		Penyusunan RTBL Kawasan Gading			
2	Pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata;					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Taman Wisata Jurug menjadi Destinasi wisata Nasional.</li> </ul>					Penyusunan RTBL Kawasan Jurug
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Taman balekambang sebagai pusat budaya Nasional.</li> </ul>				Penyusunan RTBL Kawasan Balekambang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Fasilitas Islamic Centre berskala Nasional (Kompleks Masjid Syekh Zayed).</li> </ul>				Penyusunan RTBL Kawasan Islamic Centre	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revitalisasi Lokananta sebagai pusat kreasi seniman.</li> </ul>			Penyusunan RTBL Kawasan Lokananta		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kawasan perdagangan yang bercorak budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Gedung Tempat Gamelan , Pos Linmas, dan Pagar Samping Kecamatan</li> </ul>	RTBL Kawasan Gatot Subroto dan Mangkunegaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan gedung sarana budaya dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Gedung Serba Guna</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan event budaya berksla nasional/ internasional.</li> </ul>					
3	Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program penanganan dan peningkatan kawasan kumuh dan RTLH;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur resapan dangkal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur resapan dangkal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur resapan dangkal</li> <li>Rehab Berat-Sedang Rusun/ Rumah Deret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur resapan dangkal</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan peningkatan RUSUN untuk menangani backlog;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehab Berat-Sedang Rusun/ Rumah Deret</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehab Berat-Sedang Rusun/ Rumah Deret</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama antar daerah untuk menangani permasalahan permukiman di kawasan perbatasan;</li> </ul>	Sinkronisasi dan kerjasama pembangunan Kawasan Pasar Kliwon dan wilayah berbatasan di Kabupaten Sukoharjo	Sinkronisasi dan kerjasama pembangunan Kawasan Serengan dan wilayah berbatasan di Kabupaten Sukoharjo	Sinkronisasi dan kerjasama pembangunan Kawasan Laweyan dan wilayah berbatasan di Kabupaten Sukoharjo	Sinkronisasi dan kerjasama pembangunan Kawasan Banjarsari dan wilayah berbatasan di Kabupaten Karanganyar	Sinkronisasi dan kerjasama pembangunan Kawasan Jebres dan wilayah berbatasan di Kabupaten Karanganyar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jalan kota dan jalan lingkungan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jalan Bengawan Solo</li> <li>Peningkatan Jalan Kyai Mojo</li> <li>Peningkatan Pedestrian Jalan Hasyim Ashari (Lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan II</li> <li>Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan kota tidak bernomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan kota tidak bernomor ruas)</li> <li>Peningkatan Jalan Baron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jalan AMD Bayan</li> <li>Peningkatan Jalan Clolo II</li> <li>Peningkatan Jalan Kolonel Sugiono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Koridor Jalan K.H. Dewantoro Sisi Utara</li> <li>Peningkatan Jalan Juanda (Lanjutan)</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Jembatan Mojo</li> <li>▪ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan kota tidak bernomor ruas)</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan IV</li> <li>▪ Pemeliharaan Jalan Lingkungan</li> </ul>	ruas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecil</li> <li>▪ Pembangunan Jembatan Songgolan Jalan Sidomukti Timur</li> <li>▪ Pemeliharaan Jembatan Kota</li> <li>▪ Pemeliharaan Jalan Lingkungan</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Jalan Pleret Raya dan Kutai Raya</li> <li>▪ Peningkatan Jalan Popda</li> <li>▪ Rehabilitasi Jalan Setia Budi</li> <li>▪ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan kota tidak bernomor ruas)</li> <li>▪ Pembangunan Jembatan Nayu</li> <li>▪ Pembangunan Jembatan Ngemplak</li> <li>▪ Rehabilitasi Jembatan Kahuripan Timur</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan Pedestrian dan Jalur Lambat Jalan Kolonel Sutarto</li> <li>▪ Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan kota tidak bernomor ruas)</li> <li>▪ Rehabilitasi Jembatan Genengan Jalan Letjen Sutoyo</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan III</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan sanitasi kota (peningkatan pengelolaan sampah, air minum, drainase, dan limbah)</li> </ul>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Drainase Citywalk Segmen</li> </ul>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Jl. M.</li> </ul>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran</li> </ul>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan IPAL</li> <li>▪ Pembuatan sumur resapan dalam</li> <li>▪ Pembuatan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
		BCA ke Arah Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Penuntasan Kawasan Alun-alun dan Jl. Dr Rajiman</li> <li>▪ Normalisasi Saluran Kawasan Veteran dan Gajahan</li> <li>▪ Perbaikan Saluran Tegal Konas</li> <li>▪ Pembangunan Talud HP 00001 Kel. Mojo (Eks. HP 16 Semanggi)</li> </ul>	Yamin Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Jl. Wisanggeni</li> </ul>	Drainase Citywalk Segmen BCA ke Arah Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Drainase Citywalk Segmen Sriwedari – Purwosari</li> <li>▪ Pembangunan Saluran Drainase Citywalk Segmen Sriwedari – Purwosari</li> <li>▪ Peningkatan Saluran Jl. Transito</li> <li>▪ Perbaikan Inlet dan Manhole saluran jalan Kota</li> </ul>	Pembuangan (Gorong gorong) taman cerdas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Saluran Jl. Hasanudin</li> <li>▪ Pembangunan Saluran Jl. Mr Sartono dan kawasan SMP 7</li> <li>▪ Peningkatan Saluran Penuntasan Genangan UNISRI</li> </ul>	sumur resapan dangkal <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana TPA Putri Cempo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan fasilitas pelayanan di Kawasan Perbatasan Kota Surakarta;</li> </ul>					
4	Peningkatan sistem pelayanan publik yang cerdas ( <i>Smart City</i> ) dan penguasaan Teknologi Informasi; media informasi, komunikasi di					

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
	era digital					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitaliasi Solo Technopark sebagai pusat pengembangan teknologi nasional.</li> </ul>					Penyusunan RTBL kawasan Solo Technopark
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem pengelolaan prasarana –sarana kota berbasis on-line (melalui pengaduan dan pelaporan penanganan).</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan peningkatan pelayanan sistem transportasi public.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Titik Integrasi Interchange antarmoda (5 titik : Panggung, Faroka, Gemblegan, Vastenburg, Pasar Klewer)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Sub Terminal (Ngipang dan Pelangi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Titik Integrasi Interchange antarmoda (5 titik : Panggung, Faroka, Gemblegan, Vastenburg, Pasar Klewer)</li> </ul>
5	Perwujudan Kota Hijau ( <i>Green City</i> )					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Masterplan RTH (roadmap menuju RTH Publik 20%)</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengadaan tanah untuk pembangunan RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk peningkatan RTH</li> <li>Penataan RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk peningkatan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN				
		PASAR KLIWON	SERENGAN	LAWEYAN	BANJARSARI	JEBRES
		pengadaan vertikal garden	RTH ▪ Penataan RTH pengadaan vertikal garden	RTH ▪ Penataan RTH pengadaan vertikal garden	RTH ▪ Penataan RTH pengadaan vertikal garden	RTH ▪ Penataan RTH pengadaan vertikal garden
	▪ Program peningkatan taman lingkungan	▪ Penataan dan Pemeliharaan RTH Kecamatan ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Penataan dan Pemeliharaan RTH Kecamatan ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Penataan dan Pemeliharaan RTH Kecamatan ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Penataan dan Pemeliharaan RTH Kecamatan ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Penataan dan Pemeliharaan RTH Kecamatan ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	▪ Revitalisasi taman menjadi taman tematik	▪ Pembangunan Taman Cerdas Losari ▪ Pembangunan Taman Ramah Anak Wiropaten	▪ Pembangunan taman batas tugu kota ▪ Belanja Pemeliharaan RTH ▪ Pembangunan Penanda Taman Pringgondani	▪ Pembangunan taman cerdas		
6	Pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata.					

#### **4.4 Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten/ Kota**

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah perbatasan, maka perlu adanya kerjasama baik dalam segala bidang sehingga tidak terjadi ketimpangan dari berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi dan fisik) antara kabupaten/ Kota. Dalam melakukan sinergitas antar kawasan perbatasan, Kota Surakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Kawasan Subosukowonosraten dengan berbagai program regional pada kawasan ini.

Ada 5 (lima) konsep pengembangan wilayah perbatasan yaitu:

- a. Pengembangan wilayah adalah upaya mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya untuk merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan wilayah;
- b. Keselarasan adalah keberlanjutan program
- c. Penanganan konflik/ potensi konflik
- d. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/ sarana prasarana pada wilayah perbatasan
- e. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan implementasi peraturan

Pengembangan Kota Surakarta saat ini lebih kepada sektor jasa perdagangan dan industri kreatif, sedangkan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surakarta mulai berkembang dengan sektor perdagangan dan pariwisata. Ketimpangan pertumbuhan pembangunan dan pelayanan publik antar kawasan perbatasan diharapkan tidak terjadi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu adanya kerjasama antar daerah secara regional yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Berdasarkan aspek Kebijakan kewilayahan Nasional, Sasaran Pembangunan Nasional terhadap Wilayah Jawa – Bali sebagai penggerak perekonomian nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian. Strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada:

- a. menjaga lahan pertanian,
- b. peningkatan keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri pengolahan maupun kreatif,
- c. perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan

nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo - Wonosobo - Magelang - Kota Magelang - Temanggung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Purwomanggung, dilakukan pengembangan kawasan pendukung Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten.



**Gambar 4. 6 MICE Kota Surakarta dan Wisata Pemprov Jateng**

Optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di Jawa Tengah dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur, khususnya untuk kawasan- kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun. Penguatan infrastruktur tersebut diterapkan untuk kawasan Purwomanggung dengan quick win pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Beberapa program pengembangan Kawasan Subosukowanosraten khususnya di Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 79/2019 dalam mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur, meliputi :

- a. Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta

- b. Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo" Kota Surakarta
- c. Pengembangan Sentra IKM, Kota Surakarta
- d. Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kota Surakarta
- e. Pengembangan ekonomi kreatif, Kota Surakarta

Saat ini untuk aspek kebijakan kewilayahan / regional dengan kabupaten sekitar guna mendukung sasaran pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Peningkatan pelayanan/ peningkatan frekuensi kereta api regional Solo- Semarang.
- b. Fasilitasi penyelesaian jalan tol Solo-Kertosono dan fasilitasi pembangunan jalan tol Solo-Yogya.
- c. Peningkatan jalan provinsi penghubung Surakarta-Grobogan-Pati.
- d. Pembangunan utama kawasan pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Suku, dan lain – lain) berupa fasilitasi pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata di wilayah Subosukawonosraten.
- e. Fasilitasi pengembangan Bandara Adisumarmo dan jaringan transportasi penghubungnya (Koridor Batik Solo Trans / BST).
- f. Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta yang melintasi Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
- g. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada Kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng Koridor Terminal Tirtonadi-Sangiran-Terminal Sumberlawang sebagai dukungan peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata dan pembukaan koridor baru Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan penyeberangan sungai melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dermaga pada Sungai Bengawan Solo lintas penyeberangan Kota Surakarta (Dermaga Sangkrah)- Kabupaten Sukoharjo (Dermaga Gading).
- i. Fasilitasi Kerjasama pengembangan SPAM Regional Wosusokas
- j. Penanganan pencemaran di anak sungai Bengawan Solo dan industri kecil

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Kerangka Pendanaan**

Pada akhirnya berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi harus diselesaikan dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2023 tidak hanya bersumber dari APBD Kota Surakarta, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, CSR, dan Perusahaan Umum Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

#### **5.2 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023**

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program dan kegiatan prioritas daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

**5.2.1 Program dan Kegiatan prioritas yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 serta dukungannya pada Prioritas Nasional**

**Tabel 5. 1 Program dan Kegiatan prioritas yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023**

<b>Prioritas Nasional Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>OPD</b>
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<b>PD3.</b> Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter				
		Penguatan kerja sama dan jejaring sumber daya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	3.254.518.336	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	14.680.000.000	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (untuk PPKS non PPM di rumah singgah dan di masyarakat)	50.000.000	Dinas Sosial
		Penguatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	38.690.496.170	Kecamatan

<b>Prioritas Nasional Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>OPD</b>
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	<b>PD3.</b> Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif Penurunan kemiskinan dan penguatan dan berkarakter				
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.308.000	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	57.025.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		3.180.000	Dinas Kesehatan
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	170.404.000	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	597.364.000	Dinas Kesehatan

<b>Prioritas Nasional Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>OPD</b>
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.175.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota	378.290.000	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	56.950.000	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	387.062.893	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	741.837.107	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.450.515	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.476.386.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	510.192.831	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.062.159.475	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	272.534.737	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.824.160.600	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.110.292.000	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.514.350.000	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	567.365.000	Dinas Pendidikan
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	313.310.000	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	212.225.000	Dinas Pendidikan
		Peningkatan layanan perpustakaan digital untuk menunjang budaya literasi masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.187.404.250	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.800.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<b>PD3.</b> Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter				
		Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja dan wirausaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.230.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda wirausaha	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,	2.483.940.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	545.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	260.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	414.184.400
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	160.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	810.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	281.641.738	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.182.416	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,	PP1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan	<b>PD 2.</b> Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif				
		Peningkatan revitalisasi pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan pengembangan wisata kuliner dan belanja	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.862.481.760	Dinas Perdagangan
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.064.850.000	Dinas Perdagangan

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan kawasan perdagangan sebagai rintisan <i>Central Business District</i> (CBD) di wilayah Subosukawonosraten				
		Penguatan kerjasama dalam perluasan akses pasar internasional bagi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	760.000.000	Dinas Perdagangan
		Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan penguatan kemitraan perusahaan besar dengan UMKM	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	80.000.000	Dinas Perdagangan
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0	Dinas Perdagangan
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0	Dinas Perdagangan
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	0	Dinas Perdagangan
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,	110.000.000	Dinas Perdagangan

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	63.000.000	Dinas Perdagangan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1.125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	130.000.000	Dinas Perdagangan
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	245.000.000	Dinas Perdagangan
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perdagangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	236.340.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pasokan dan Harga Pangan		
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	652.256.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	210.781.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	80.324.150	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	329.366.619	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	146.704.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian	212.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan	<b>PD 2.</b> Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif				
		Legalisasi, pendampingan intensif startup, peningkatan digitalisasi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil dan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.095.200.000	Dinkop UKM Dan Perindustrian

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Menengah (IKM)	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	969.011.932	Dinkop UKM Dan Perindustrian
		Pengembangan kawasan wisata, jejaring dan kerjasama budaya dan pariwisata terpadu, dan sentra-sentra Industri Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.081.295.590	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4.825.415.040	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penguatan kerja sama daerah untuk meningkatkan <i>length of stay</i> (LoS/lama tinggal) kunjungan ke Kota Surakarta.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.220.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.870.801.444	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	54.104.887.000
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.236.027.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	883.682.327	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	48.831.850.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.170.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	394.308.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan event pentas budaya tingkat nasional dan internasional untuk menunjang pariwisata	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.220.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.570.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.040.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	975.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.130.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan	<b>PD 1.</b> Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah				
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	14.953.654.600	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	33.172.804.084	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
		Penataan kawasan permukiman kumuh dan hunian liar, serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	357.384.877	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.802.384.877	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Peningkatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.085.286.397	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	710.200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan	<b>PD 1.</b> Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah				
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal, mencakup kawasan dan bangunan cagar budaya, kawasan strategis pariwisata, dan infrastruktur pusat pelayanan yang terintegrasi dengan daerah sekitar	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.098.197.680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>Prioritas Nasional Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>OPD</b>
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.947.710.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan pembangunan koridor dan penguatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur beridentitas budaya local	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	47.919.580.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan pemenuhan jaringan air bersih dan air limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.561.678.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.348.204.160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	40.868.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Peningkatan sarana dan layanan transportasi publik di kawasan strategis yang terintegrasi antar wilayah Subosukawonosraten untuk menunjang aktivitas ekonomi,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.642.552.000	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
		pariwisata budaya dan olahraga				
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pementapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	<b>PD4.</b> Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekondusifan wilayah				
		Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Mutasi dan Promosi ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Pengembangan Kompetensi ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	618.274.733	Sekretariat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.326.000.000	Inspektorat
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	105.000.000	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	56.682.000	Inspektorat
				Pendampingan dan Asistensi	461.110.702	Inspektorat
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.647.526.961	Sekretariat DPRD
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	326.997.000	Sekretariat DPRD
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	326.997.000	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Peningkatan Kapasitas DPRD	616.594.000	Sekretariat DPRD
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	616.594.000	Sekretariat DPRD
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	11.000.000	Sekretariat DPRD
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	616.594.000	Sekretariat DPRD
				Fasilitasi Tugas DPRD	2.514.776.000	Sekretariat DPRD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	5.559.306.301	Sekretariat Daerah
		Peningkatan sarana-prasarana teknologi informasi untuk menunjang <i>smart city</i>	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.567.256.000	Diskominfo SP
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas fiskal dan penguatan tata kelola keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.256.894.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Badan Pendapatan Daerah
		Penyiapan rencana pembangunan jangka panjang dan penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan: air,	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.308.635.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
		sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	698.030.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penguatan Iptek dan pengembangan inovasi untuk mendukung Solo <i>Smart City</i>	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan data kependudukan untuk menunjang pembangunan berwawasan kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.291.103	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Peningkatan pengelolaan Solo Satu Data untuk menunjang perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	507.120.000	Diskominfo SP
		Peningkatan keamanan informasi untuk menunjang pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	385.000.000	Diskominfo SP
		Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kearsipan sesuai dengan standar	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	492.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan penegakan regulasi daerah untuk menjaga kekondusifan wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.474.801.681	Satpol PP
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	907.443.585	Satpol PP
			Program Pencegahan, Penanggulangan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	414.215.872	Dinas Pemadam Kebakaran

<b>Prioritas Nasional Tahun 2023</b>	<b>Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023</b>	<b>Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>OPD</b>
			Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	97.690.725	Dinas Pemadam Kebakaran
				Investigasi Kejadian Kebakaran	10.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	257.866.017	Dinas Pemadam Kebakaran
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	140.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
		Dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.165.470.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### 5.2.2 Rencana Kerja dan Program Prioritas RKPD 2023.

Alokasi Pagu Anggaran untuk Program dan Kegiatan Menurut Sasaran Prioritas Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5. 2 Program, Kegiatan Prioritas, Pagu menurut Sasaran Daerah**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	OPD
Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,53	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</li> <li>- Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas</li> <li>- Persentase Fasyankes yang terakreditasi</li> <li>- Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan</li> <li>- Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan</li> <li>- Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani</li> <li>- Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya</li> <li>- Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan</li> <li>- Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar</li> <li>- Presentase Kelurahan STBM</li> <li>- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk</li> <li>- Terselenggara nya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas</li> </ul>	131.236.886.825	Dinas Kesehatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	OPD
			1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	957.097.311	Dinas Kesehatan
			1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	1.652.266.241	Dinas Kesehatan
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,36	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	- Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan - Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4.825.415.040	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.432.422	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	- Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara - Tingkat hunian akomodasi	2.870.801.444	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3. Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	6,20	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan UMKM	1.047.272.988	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
	4. Persentase Pertumbuhan dan IKM	0,35	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	3.095.200.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
			2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	969.011.932	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
	5. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	20,96	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar - Persentase PKL yang tertata	70.767.331.760	Dinas Perdagangan

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>OPD</b>
			3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	455.000.000	Dinas Perdagangan
	6.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,2	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Angka Ketersediaan Energi - Angka Ketersediaan Protein - Konsumsi energi perkapita - Konsumsi protein perkapita	1.099.377.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	7.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,9				
	8.Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5,35	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	475.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik	90,27	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	3.098.197.680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	7.947.710.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Air Bersih	100	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	4.561.678.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio Konektivitas	86	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		104.029.941.869	Dinas Perhubungan

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>OPD</b>				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	- Indeks Kualitas Udara	81,79	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase RTH dalam kondisi baik	15.558.654.600	Dinas Lingkungan Hidup				
	- Indeks Kualitas Air	52,80								
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,34								
Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul, dan kreatif	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,1	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	- APK 3-6 Tahun - APS 13-15 Tahun - APS 7-12 Tahun - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	365.826.894.907	Dinas Pendidikan				
	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,81					1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	212.225.000	Dinas Pendidikan
							1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	880.675.000	Dinas Pendidikan
	3. Nilai Literasi Masyarakat	2	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.684.204.250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,81	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	1.927.500.000	Dinas Tenaga Kerja				
	5. Persentase Pertumbuhan Pemuda Wirausaha	7,7	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3.383.940.000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	OPD	
	6. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional / Internasional	54,3	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional - Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	109.226.446.327	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	7. Persentase Partisipan nasional / internasional dalam even olahraga	0,77					
	8. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	94		2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.766.827.338	Kecamatan Banjarsari
						7.048.900.000	Kecamatan Jebres
						2.168.500.000	Kecamatan Laweyan
						4.424.300.000	Kecamatan Pasarkliwon
						1.204.099.000	Kecamatan Serengan
				7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase tingkat kelurahan berkembang	5.606.014.770	Kecamatan Banjarsari
						7.279.041.275	Kecamatan Jebres
						7.630.866.000	Kecamatan Laweyan
						11.618.115.500	Kecamatan Pasarkliwon
			9.135.853.315	Kecamatan Serengan			
	9. Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	79,45	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1.487.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	OPD
			2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	1.734.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Terhadap APBD	3.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	10. iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	56,29	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	- Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun - Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun - Persentase Kampung KB mandiri - Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	6.909.213.713	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan	11. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional	49,58	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	485.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	8.185.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	1.130.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	OPD
			2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.684.204.250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan gelar seni budaya	4.750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	1. Indeks Merit	0,8	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	- Persentase ASN yang berkinerja minimal baik - Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya - Persentase pemenuhan formasi CASN	5.687.284.175	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Persentase pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN - Persentase ASN yang lulus diklat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	6.420.290.337	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	2. Maturitas Kelembagaan	38	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Manajemen Risiko Indeks	5.130.020.851	Sekretariat Daerah
	3. Indeks Manajemen Resiko	2,75	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	1.431.000.000	Inspektorat
	4. Maturitas SPIP	2,8				
	5. Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	92	2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	453.750.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	6. Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	48,78	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	32.245.254.804	Sekretariat DPRD

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>OPD</b>
	7. Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	70	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	3.855.319.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	8. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD - Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD - Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP - Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya - Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan - Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	8.400.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	32	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	10.600.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	10. Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	8	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Nilai LPPD - Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	12.334.374.851	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	11. Indeks SPBE	3,6	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	5.971.845.154	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>OPD</b>
	12. Indeks Inovasi Daerah	3.735	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	- Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan - Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	9.042.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	13. Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	30	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	507.120.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	14. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	98,16	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data - Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	773.800.001	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	Rasio PPKS yang tertangani	67,62	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	3.327.518.336	Dinas Sosial
	1. Persentase Rumah Layak Huni	8918	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	8.802.384.877	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	7.085.286.397	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>OPD</b>
	2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	80	2.10.10 Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	710.200.000	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	5	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	2.036.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	3,75	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk</li> <li>- Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)</li> <li>- Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada</li> <li>- Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas</li> <li>- Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan</li> </ul>	5.767.502.266	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	3. Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	2	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	4.980.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4. Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	100	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	4.538.772.614	Dinas Pemadam Kebakaran

### 5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. 3 Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dinas Kesehatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</li> <li>• Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</li> <li>• Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</li> </ul>	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

#### 5.4 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 5. 4 Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
1	<b>Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</b>			
	<b>Indikator SDGs 1.2.1 *) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.230.000.000	Dinas Tenaga kerja
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	130.000.000	Dinas Tenaga kerja
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	Dinas Tenaga kerja
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	90.000.000	Dinas Tenaga kerja
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	251.153.805	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 1.3.1 (b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</b>			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	<b>Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	14.680.000.000	Dinas Sosial
	<b>Indikator SDGs 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.254.518.336	Dinas Sosial
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>			
	<b>Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.450.515	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.476.386.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	510.192.831	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.561.678.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</b>			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	357.384.877	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.085.286.397	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.824.160.600	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran</b>			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	945.962.533	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	246.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>2</b>	<b>Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>			
	<b>Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.1.1 (a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 2.1.2 *): Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</b>			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	16.960.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	570.583.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 2.1.2 (a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.</b>			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 2.2.1*) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2*) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan</b>			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	236.340.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi	210.781.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 2.3.1*) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)</b>			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	181.684.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>3</b>	<b>Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>			
	<b>Indikator SDGs 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 3.2.2.(b) Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)</b>			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.062.159.475	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.057.318.900	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.</b>			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota	378.290.000	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.</b>			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.690.496.170	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.</b>			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	170.404.000	Dinas Kesehatan
4	<b>Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>			
	<b>Indikator SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.545.807.840	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.824.160.600	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun.)</b>			
	<b>Indikator SDGs 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.110.292.000	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.(Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat)</b>			
	<b>Indikator SDGs 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik</b>			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	212.225.000	Dinas Pendidikan
<b>5</b>	<b>Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan</b>			
	<b>Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.</b>			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	935.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	545.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
		Kabupaten / Kota		PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	414.184.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.</b>			
	<b>Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	545.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
		Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.</b>			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	810.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</b>			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	810.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PEREMPUAN	Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota		ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.</b>			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	993.342.451	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	<b>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Berkelanjutan</b>			
	<b>Indikator SDGs 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.561.678.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.1.1.(b) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau</b>			
	<b>Indikator SDGs 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.561.678.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</b>			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	378.290.000	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kecamatan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</b>			
	PROGRAM	Pelaksanaan Sehat	378.290.000	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>			
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.242.691.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>7</b>	<b>Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau</b>			
	<b>Tidak ada</b>			
<b>8</b>	<b>Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>			
	<b>Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.</b>			
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.100.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	325.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	<b>Indikator SDGs 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan</b>			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.047.272.988	Dinkop UMKM Dan Perindustrian
	<b>Indikator SDGs 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</b>			
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan ( mancanegara &amp; nusantara )</b>			
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan</b>			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.220.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	210.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
		Kabupaten/Kota		
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.870.801.444	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>			
	<b>Indikator SDGs 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.</b>			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4.825.415.040	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Indikator SDGs 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</b>			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.047.272.988	Dinkop UMKM Dan Perindustrian
<b>9</b>	<b>Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>			
	<b>Indikator SDGs 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	47.919.580.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.095.200.000	Dinkop UMKM Dan Perindustrian
<b>10</b>	<b>Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan</b>			
	<b>10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.254.518.336	Dinas Sosial
<b>11</b>	<b>Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>			
	<b>Indikator SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.492.552.000	Dinas Perhubungan
	<b>Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil</b>			
	PROGRAM	Pengelolaan Museum	2.353.702.000	Dinas Kebudayaan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kabupaten/Kota		dan Pariwisata
	<b>Indikator SDGs 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	246.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	325.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	33.172.804.084	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indikator SDGs 11.6.1.(b) Pengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	33.172.804.084	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	14.953.654.600	Dinas Lingkungan Hidup
<b>12</b>	<b>Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>			
	<b>Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</b>			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN	Penyimpanan Sementara Limbah B3	164.525.728	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	<b>Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	33.172.804.084	Dinas Lingkungan Hidup
<b>13</b>	<b>Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>			
	<b>Indikator SDGs 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.955.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	165.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.</b>			
	<b>13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.</b>			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	439.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>13.3.1.(a) Jumlah satuan</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.</b>			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>			
	<b>Indikator SDGs 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.</b>			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.550.000.000	Sekretariat Daerah
<b>14</b>	<b>Tujuan 14. Ekosistem lautan</b>			
	Tidak ada			
<b>15</b>	<b>Tujuan 15. Ekosistem daratan</b>			
	Tidak ada			
<b>16</b>	<b>Indikator SDGs 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</b>			
	<b>Indikator SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.</b>			
	<b>Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-</b>			

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</b>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	545.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)</b>			
	PROGRAM	Penyusunan	2.308.635.000	Badan

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan dan Pendanaan		Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	808.455.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	698.030.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	2.933.057.600	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.</b>			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	667.738.074,80	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Kota).</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	2.933.057.600	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kota).</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	2.933.057.600	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</b>			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	810.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
		Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).</b>			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	810.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>Indikator SDGs Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</b>			
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.399.909.000	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.</b>			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	945.962.533	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.</b>			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	945.962.533	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2023 (Rp.)	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.</b>			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	945.962.533	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>17</b>	<b>Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan</b>			
	<b>Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	313.008.067	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	507.120.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

## 5.5 Program Inovasi Daerah

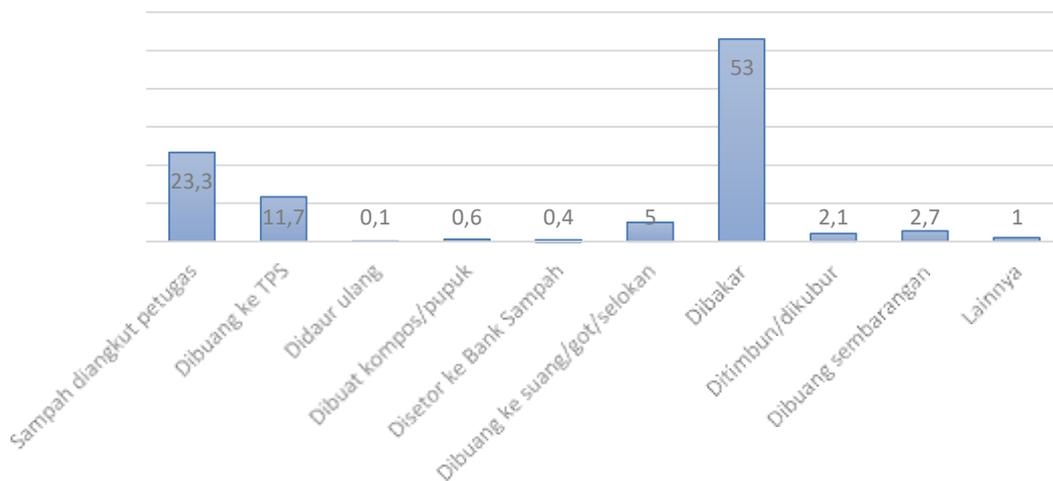
### 5.5.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik melakukan survei terhadap rumah tangga atau individu yang berkenaan dengan perilaku rumah tangga yang baik secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak kepada lingkungan hidup. Hasil survei tersebut menjadi dasar untuk menghitung ketidakpedulian terhadap lingkungan yaitu penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, dan pengurangan polusi udara yang selanjutnya tersaji dalam Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia 2018.

IPKLH memiliki nilai antara 0 sampai 1, dengan nilai mendekati 1 berarti menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan. Indonesia memiliki IPKLH 2017 sebesar 0,51 yang tersusun dari dimensi penghematan air 0,44, pengelolaan energi 0,16, transportasi pribadi 0,71, dan pengelolaan sampah 0,72. Dari data dimensi tersebut, tingkat ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia tergolong tinggi. Untuk penghitungan dimensi pengelolaan sampah terdiri

dari komponen pemilahan sampah, penanganan terhadap sampah, perlakuan terhadap barang bekas, dan membawa tas belanja sendiri.

Kondisi tersebut paling tidak memberikan gambaran nyata bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Kecenderungannya, sampah rumah tangga akan dijadikan satu sebelum diambil oleh petugas sampah. Hal ini juga bisa dimaklumi bahwa secara umum, Tempat Pembuangan Akhir sampah di Indonesia kebanyakan tidak memiliki fasilitas pengolahan sampah yang sudah terpilah. Jadi muncul anggapan bahwa percuma melakukan pemilahan sampah rumah tangga, jika pada akhirnya hanya akan dijadikan satu di TPA.



Sumber: Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia 2018, BPS

**Gambar 5. 1 Penanganan Sampah yang Paling Sering Dilakukan, 2017**

Dari barchart di atas, persentase daur ulang, pembuatan kompos, dan penyetoran ke bank sampah, sebagai representasi kepedulian masyarakat untuk memilah sampah bahkan tidak sampai menyentuh angka 1%. Perilaku penanganan sampah ini memang tidak lepas dari kesadaran tiap individu masyarakat. Sehingga, untuk mencapai kesadaran atas lingkungan yang lebih baik, tentunya dibutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat.

Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta guna meningkatkan kesadaran lingkungan hidup masyarakat Kota Surakarta, khususnya dalam penanganan sampah mulai dari tingkat rumah tangga adalah melaksanakan inovasi PAPI SARIMAH (Paksa Pilah Sampah dari Rumah). Inovasi ini diinisiasi oleh Kecamatan Banjarsari, dengan proyeksi akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Surakarta.

### 5.5.2 Permasalahan

Persoalan sampah menjadi persoalan yang dihadapi oleh tiap daerah di Indonesia. Pengolahan sampah juga belum bisa menyelesaikan persoalan sampah di tiap-tiap kota. Surakarta menjadi salah satu kota yang menghadapi persoalan sampah. Sampah harian di Kota Surakarta mencapai 300 – 350 ton per hari, dan hanya dikirimkan ke TPA Putri Cempo Surakarta di lahan seluas kurang lebih 8 hektar. Secara kapasitas, TPA Putri Cempo hanya akan bertahan menampung sampah sampai dengan tahun 2022 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya keras untuk mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan sampah, dan sudah dimulai sejak tahun 2010 sejak masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta. Metode *Public Private Partnership* dicoba diimplementasikan untuk pengelolaan sampah di Surakarta. Hampir lebih dari satu dekade, proyek yang digagas yaitu pembangkit listrik tenaga sampah menemui banyak kendala, mulai dari tumpang tindih aturan, minimalnya koordinasi antar pihak/kementerian yang berwenang dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan, proyek ini belum bisa operasional sampai dengan tahun ini.

Dalam rangka menunggu implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Surakarta, terdapat inisiatif dari wilayah untuk ikut berkontribusi dalam pengurangan sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA Putri Cempo. Ini didasarkan pada persoalan di lapangan bahwa bongkar muat sampah membawa persoalan tersendiri, yakni sampah menjadi berhamburan dan memberikan beban kerja lebih pada petugas sampah.



**Gambar 5. 2 Foto sampah berserakan**

Oleh karenanya, dilakukan inisiasi untuk menggerakkan masyarakat untuk dapat memilah sampah dari rumah. Sehingga pemilahan sampah ini dapat mempercepat pelayanan persampahan di wilayah, meringankan beban petugas sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat atas tanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri.

### **5.5.3 Inovasi PAPI SARIMAH (Paksa Pilih Sampah dari Rumah)**

Inovasi yang digagas oleh Kecamatan Banjarsari pada akhir tahun 2021 ini merupakan program yang berdimensi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk memaksa masyarakat di wilayah untuk memilah sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dengan kegiatan ini, selain menumbuhkan kesadaran atas tanggung jawab sampah masing-masing, kegiatan ini juga secara langsung akan membantu pekerjaan tukang sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan. Bagi masyarakat yang tidak melakukan upaya pemilahan sampah, maka akan dikenakan sanksi untuk warga tersebut, yakni petugas sampah tidak akan mengambil sampahnya.

Dalam melaksanakan inovasi ini, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah sosialisasi kepada seluruh warga di Kecamatan Banjarsari, penguatan dan pembinaan kepada petugas sampah di masing-masing kelurahan di Kecamatan Banjarsari, penyiapan sarana kantong plastik, serta kerjasama dengan bank sampah.



**Gambar 5. 3 Pembinaan Petugas Sampah dalam rangka pelaksanaan PAPI SARIMAH**

Inovasi PAPI SARIMAH ini secara langsung turut berperan dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan dari masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Aspek ini sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan, semakin meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta. Secara ekonomis, pemilahan sampah, khususnya sampah yang bisa didaur ulang, memberikan kontribusi nyata penambahan penghasilan para petugas sampah. Ini adalah wujud gotong royong dari masyarakat untuk mendukung secara ekonomis para petugas sampah yang membersihkan sampah warga tiap harinya.



**Gambar 5. 4 Foto Sampah yang telah dipilah**

Cara kerja program pilah sampah ini dibedakan berdasarkan kendaraan pengangkut yang digunakan petugas. Ada gerobak nonmesin dan ada gerobak motor (germo). Alur pengangkutan sampah menggunakan gerobak nonmesin yakni:

1. Pemilahan sampah organik dan anorganik oleh warga di rumah
2. Petugas sampah masing-masing RW mengambil sampah di rumah warga mulai pukul 05.00 WIB.
3. Petugas sampah membawa gerobak dan karung untuk memisahkan sampah yang telah dipilah warga
4. Petugas sampah mengumpulkan sampah di satu lokasi
5. Pukul 07.00 WIB truk sampah mengambil tumpukan sampah organik
6. Sampah anorganik dijual oleh warga sendiri, jika warga tidak menjualnya akan diambil oleh petugas pengumpul sampah
7. Apabila belum penuh, truk akan menghampiri lokasi pengumpulan sampah di RW lain
8. Sampah diangkut truk menuju TPA Putri Cempo sekita pukul 11.00 WIB.

Alur pengumpulan sampah menggunakan germo (gerobak motor):

1. Pemilahan sampah organik dan anorganik oleh warga di rumah
2. Petugas mengambil sampah warga menggunakan gerobak motor

- sekitar pukul 07.00 WIB
3. Sampah organik diangkut germo langsung menuju TPA Putri Cempo tanpa melalui truk kurang lebih pukul 11.00 WIB
  4. Sampah anorganik yang dipisah dan tidak dijual oleh warga akan diambil petugas sampah.

Dalam program ini warga diharuskan memilah sampah sejenis plastik atau nonorganik yang tidak bisa didaur ulang dan sampah organik yang bisa didaur ulang seperti sisa makanan, sayuran, popok. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara khusus untuk sampah yang memiliki nilai jual, misal sampah botol bekas, kemudian kertas, tembaga, dan lainnya ditampung di bank sampah dan dijual untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengepul sebagai penampung sampah nonorganik bakal membawanya ke pabrik daur ulang.

Bagi masyarakat yang mungkin repot tidak bisa menghantarkan sampah daur ulang akan diambil di rumah. Selanjutnya botol-botol bekas ini didaur ulang menjadi barang kerajinan. Misal jadi kincir angin, pot bunga yang nanti bisa dipasang di pojok-pojok kampung untuk hiasan. Saat ini pengelolaan lewat bank sampah sudah cukup ideal untuk dilakukan. Melalui komunitas tersebut masyarakat lebih teredukasi, mereka juga jadi tahu muara sampahnya ke mana. Jika sudah terbentuk di semua kelurahan, bahkan bisa dibuat program rutin pengolahan sampah.

Inovasi PAPI SARIMAH ini akan direplikasikan pada seluruh wilayah Kota Surakarta, mengingat besarnya manfaat yang didapat. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi PAPI SARIMAH akan dicarikan jalan keluar pada tingkat kota.

Dari sisi perencanaan, Inovasi ini dapat menyentuh beberapa urusan, di antaranya adalah urusan kewilayahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan lingkungan hidup, termasuk urusan pendidikan. Dari sisi kewilayahan, program kegiatan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga persampahan dan sarana prasarana pengangkutan sampah. Penguatan kapasitas warga masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan hidup dapat menjadi fokus program kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup bisa mengambil peran yang maksimal dalam menjalankan program kegiatan guna memaksimalkan inovasi PAPI SARIMAH. Yang terakhir, tentunya guna meningkatkan kesadaran lingkungan hidup, urusan Pendidikan perlu mengambil posisi strategis untuk mendidik anak-anak yang bisa menjadi agen perubahan lingkungan

hidup di keluarga masing-masing.

## **5.6 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023**

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

### **5.6.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Pendidikan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra, difokuskan pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **2. Kesehatan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan, UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di dokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perumahan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

#### **5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;

## **6. Sosial**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di fokuskan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- c. Program Rehabilitasi Sosial di fokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial di fokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penanganan Bencana di fokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan di fokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

## **5.6.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga kerja**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Hubungan Industrial di fokuskan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di fokuskan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah, Kabupaten/Kota.

### **2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

- Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga di fokuskan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - f. Program Perlindungan Khusus Anak, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **3. Pangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota,

- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dif fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

#### **4. Pertanian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penatagunaan Tanah, di fokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Lingkungan hidup**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), di fokuskan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- i. Program Pengelolaan Persampahan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

## **6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

## **7. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## **8. Pemberdayaan masyarakat dan desa**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

## **9. Perhubungan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **10. Komunikasi dan informatika**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d. Program Aplikasi Informatika, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi di fokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, di fokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, di fokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- g. Program Pengembangan UMKM di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

## **12. Penanaman modal**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- b. Program Promosi Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **13. Kepemudaan dan olah raga**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

- Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

#### **14. Statistik**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan statistik yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

#### **15. Persandian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan persandian yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **16. Kebudayaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pembinaan Sejarah di fokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Permuseuman, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

## **17. Perpustakaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, di fokuskan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **18. Kearsipan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
- b. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

### **5.6.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan perikanan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil

(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

## **2. Pariwisata**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

## **3. Pertanian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- e. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
- g. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

#### **4. Perdagangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan

- b. Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, di fokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- g. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

## **5. Perindustrian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan, Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk

#### **5.6.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **1. Perencanaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait perencanaan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

##### **2. Penelitian dan Pengembangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Program.

##### **3. Keuangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

##### **4. Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah, di fokuskan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

## **5. Sekretariat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, di fokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

## **6. Sekretariat DPRD**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, di fokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD

## **7. Pengawasan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

## **8. Kewilayahan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

## **9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan

- Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

#### **5.6.5 Program Seluruh Perangkat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Layanan Administrasi DPRD

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 tercantum pada tabel berikut.

#### **6.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kota Surakarta tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

<b>Misi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan</b>
M1	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,33	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
M2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,48	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	PDRB per kapita	Rp	102.879.440	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	Laju Inflasi	%	1,94	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
M3	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	90,915	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	58,31	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Williamson	Angka	0,348	5.01 Unsur Perencanaan
	IPM (Indek Pembangunan Manusia)	Indek	83,56	5.01 Unsur Perencanaan
	TPT	%	6,2	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

<b>Misi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan</b>
M4	IPG (Indek Pembangunan Gender)	Indek	96,87	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,53	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	46,33	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
M5	Indeks reformasi birokrasi	angka	75	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	huruf	A	5.02 Unsur Keuangan
	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	8,21	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
M6	Angka Kemiskinan	%	7,89	5.01 Unsur Perencanaan
	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)*	%	19,36	5.01 Unsur Perencanaan
	Rasio kawasan kumuh	%	1,99	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
M7	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	%	96,1	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

## **6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

**Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta  
Tahun 2023**

<b>Sasaran Misi</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan</b>
<b>Sasaran 1.</b>	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,53	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
<b>Sasaran 2.</b>	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,36	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.432.422	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,20	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Persentase Pertumbuhan IKM	%	0,35	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	20,96	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,2	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	96,9	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5,35	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
<b>Sasaran 3.1.</b>	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	90,27	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	
	Rasio Konektivitas	%	86	
<b>Sasaran 3.2</b>	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,79	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Angka	52,80	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	24,34	
<b>Sasaran 4.1.</b>	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	
	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	2	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

<b>Sasaran Misi</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan</b>
<b>Sasaran 4.2.</b>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,81	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	7,7	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional	%	54,3	
	Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga	%	0,77	
	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.01 Kecamatan
	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Angka	79,45	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	56,29	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Sasaran 4.3.</b>	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	49,58	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
<b>Sasaran 5.1.</b>	Indeks Merit	Angka	0,8	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
	Maturitas Kelembagaan	Nilai	38	4.01 Sekretariat Daerah
	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	2,8	6.01 Inspektorat
	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	48,78	4.02 Sekretariat DPRD
	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	92	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	%	70	5.01 Perencanaan
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	5.02 Keuangan
	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	32	5.02 Keuangan

<b>Sasaran Misi</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan</b>
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	8	4.01 Sekretariat Daerah
<b>Sasaran 5.2.</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,6	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.735	5.05 Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	30	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	98,16	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Sasaran 6.</b>	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	67,62	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,18	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
<b>Sasaran 7.1.</b>	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,75	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
<b>Sasaran 7.2.</b>	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		Level 2	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023	Urusan
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

### 6.3 Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada Tabel 6.3 berikut ini.

**Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,48	Urusan perencanaan
2.	PDRB per kapita	Rp.	102.879.440	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
3.	Laju Inflasi	%	1,94	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
4.	Angka Kemiskinan	%	7,89	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
5.	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	19,36	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
6.	Indeks Williamson	Angka	0,348	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,33	Urusan perencanaan
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	83,56	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	Urusan perencanaan
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,87	Urusan pendidikan
11.	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	46,33	Urusan pendidikan
				Urusan Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
12.	Rasio kawasan kumuh	%	1,99	Urusan penanaman modal
13.	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	%	96,1	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Pendidikan</b>			
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,1	Dinas Pendidikan
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	Dinas Pendidikan
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	88	Dinas Pendidikan
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,58	Dinas Pendidikan
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,3	Dinas Kesehatan
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,91	Dinas Kesehatan
	<b>Kesehatan</b>			
7.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,53	Dinas Kesehatan
8.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7,2	Dinas Kesehatan
9.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	85,5	Dinas Kesehatan
10.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Dinas Kesehatan
11.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Dinas Kesehatan

<b>No.</b>	<b>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan/OPD</b>
12.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	Dinas Kesehatan
13.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
14.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
15.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
16.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
17.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
18.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
19.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
20.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
21.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
22.	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	90,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
24.	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	97,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29.	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	91,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
32.	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,18	Disperumperkimtan
33.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan
34.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
35.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	36,51	Disperumperkimtan
36.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,82	Disperumperkimtan
37.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	2.686	Disperumperkimtan
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
38.	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,75	Satpol PP
39.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		Level 2	Satpol PP
40.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	BPBD
41.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	BPBD
42.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	BPBD
43.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Org	100	Dinas Pemadam Kebakaran
44.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Org	1.100	Dinas Pemadam Kebakaran
45.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Org	100	Dinas Pemadam Kebakaran
46.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	Dinas Pemadam Kebakaran
47.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	menit	8	Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
<b>Sosial</b>				
48.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	67,62	Dinas Sosial
49.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial
50.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Dinas Sosial
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>Tenaga Kerja</b>				
51.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,81	Disnaker
52.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	100	Disnaker
53.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,42	Disnaker
54.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	74,18	Disnaker
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
55.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	79,45	DP3AP2KB
56.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
57.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	DP3AP2KB
58.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,78	DP3AP2KB
<b>Pangan</b>				
59.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
60.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	96,9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
61.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Pertanahan</b>				
62.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	Disperumperkimtan
<b>Lingkungan Hidup</b>				
63.	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,79	Dinas Lingkungan Hidup
64.	Indeks Kualitas Air	Angka	52,8	Dinas Lingkungan Hidup
65.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	24,34	Dinas Lingkungan Hidup
66.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	88	Dinas Lingkungan Hidup
67.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	40,91	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
68.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	98,16	Disadmindukcapil
69.	Perekaman KTP elektronik	%	99,94	Disadmindukcapil

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
70.	Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	94	Disadmindukcapil
71.	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	Disadmindukcapil
72.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	45,45	Disadmindukcapil
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
73.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	DP3AP2KB
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
74.	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	56,29	DP3AP2KB
75.	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	Angka	2,03	DP3AP2KB
76.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern ( <i>modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	%	69,9	DP3AP2KB
77.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	14	DP3AP2KB
<b>Perhubungan</b>				
78.	Rasio konektivitas	%	86	Dinas Perhubungan
79.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,7	Dinas Perhubungan
<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
80.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,6	Diskominfo SP
81.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	Diskominfo SP
82.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	Diskominfo SP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
83.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	75,36	Diskominfo SP
84.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	Diskominfo SP
85.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	Diskominfo SP
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>				
86.	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,2	Dinkop UKM Perin
87.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53,38	Dinkop UKM Perin
88.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	10	Dinkop UKM Perin
<b>Penanaman Modal</b>				
89.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5,35	DPMPTSP
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
90.	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	7,7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
91.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	54,3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
92.	Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga	%	0,77	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
93.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,614	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
94.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
95.	Peningkatan prestasi olahraga	%	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>Statistik</b>				
96.	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	30	Diskominfo SP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
97.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
98.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
<b>Persandian</b>				
99.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	2+	Diskominfo SP
<b>Kebudayaan</b>				
100.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	49,58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
101.	Terlestariannya Cagar Budaya	%	73,86	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>Perpustakaan</b>				
102.	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Kearsipan</b>				
103.	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai	31.2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Urusan pilihan</b>				
<b>Kelautan dan Perikanan</b>				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
106.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	45,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Pariwisata</b>				
107.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.432.422	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
109.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
110.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
111.	Tingkat hunian akomodasi	%	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
112.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
113.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,49	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>Pertanian</b>				
114.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
115.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Perdagangan</b>				
116.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	20,96	Dinas Perdagangan
117.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	Dinas Perdagangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
118.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	66,66	Dinas Perdagangan
119.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,99	Dinas Perdagangan
<b>Perindustrian</b>				
120.	Persentase Pertumbuhan IKM	%	0,35	Dinkop UKM Perin
121.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	Dinkop UKM Perin
122.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	60,15	Dinkop UKM Perin
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Unsur sekretariat daerah</b>				
123.	Maturitas Kelembagaan	Level	3	Sekretariat Daerah
124.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	8	Sekretariat Daerah
125.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,18	Sekretariat Daerah
126.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35	Sekretariat Daerah
<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>				
127.	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	48,78	Sekretariat Dewan
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Unsur perencanaan</b>				
128.	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	70	Bappeda
<b>Unsur Keuangan</b>				
129.	Persentase Kenaikan PAD	%	6,1	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan/OPD
130.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	32	BPKAD
131.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15	BPKAD
132.	Rasio PAD	%	1	BPKAD
133.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	32	BPKAD
134.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	BPKAD
135.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-14	BPKAD
136.	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-14	BPKAD
137.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-14	BPKAD
<b>Unsur Kepegawaian dan Diklat</b>				
138.	Indeks Merit	Angka	0,8	BKPSDM
139.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	83,26	BKPSDM
140.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,94	BKPSDM
141.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,54	BKPSDM
<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>				
142.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.735	Bappeda
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Inspektorat Daerah</b>				
143.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	2,8	Inspektorat

<b>No.</b>	<b>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Urusan/OPD</b>
144.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,1	Inspektorat
145.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	Inspektorat
<b>Unsur Kewilayahan</b>				
<b>Kecamatan</b>				
146.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	Kecamatan
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>				
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
147.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	Bakesbangpol
<b>C Aspek Daya Saing</b>				
1.	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	90,915	DPUPR
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,31	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Indeks reformasi birokrasi	Angka	75	Sekretariat Daerah
4.	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	Bappeda
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	BPKAD
6.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	8,21	Diskominfo SP

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kaidah pelaksanaan RKPD Kota Surakarta tahun 2023 yang perlu diatur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. RKPD tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. RKPD tahun 2023 akan dijabarkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta tahun 2023 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2023 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2023, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2023 ke dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA APBD Tahun Anggaran 2023, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2023.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2023.

Semoga dengan terimplementasikannya RKPD Tahun 2023, pembangunan semakin terarah menuju pencapaian visi jangka menengah Kota Surakarta tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”**.

